

KAPITA SELEKTA PENDIDIKAN

Konseptual Pendidikan Dari Berbagai Sudut Pandang

Dr. Nurhikmah H., S.Pd., M.Si.



Badan Penerbit UNM

Kapita Selektta Pendidikan

Hak Cipta @ 2018 oleh **Dr. Nurhikmah H., S.Pd., M.Si.**

Hak cipta dilindungi undang-undang

Cetakan pertama, 2018

Diterbitkan oleh Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar

Gedung Perpustakaan Lt. 1 Kampus UNM Gunungsari

Jl. Raya Pendidikan 90222

Tlp./Fax. (0411) 865677 / (0411) 861377

ANGGOTA IKAPI No. 011/SSL/2010

ANGGOTA APPTI No. 093/KTA/APPTI/X/2015

Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk apapun tanpa
izin tertulis dari penerbit

Kapita Selektta Pendidikan/

Dr. Nurhikmah H., S.Pd., M.Si.- cet.1

Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar

Makassar 2018

177 hlm; 23 cm

ISBN : 978-602-6883-97-1

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nyalah sehingga penulis mampu menyelesaikan buku referensi “Kapita Selekta Pendidikan”. Buku ini disusun sebagai pegangan mahasiswa tingkat sarjana maupun pascasarjana terkhusus dalam bidang pendidikan. Penulis menyadari bahwa masalah pendidikan yang sangat kompleks memerlukan penanganan yang tepat sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karenanya buku referensi ini disusun agar dapat membantu memahami secara konseptual berbagai topik pilihan yang aktual dan fenomenal tentang pendidikan yang akan berguna kelak memperkuat struktur intelektual yang dimiliki sebagai pendidik/tenaga kependidikan.

Buku ini akan menjadi pedoman yang tepat bagi mahasiswa terutama calon pendidik untuk memahami berbagai konsep-konsep pendidikan dari berbagai sudut pandang, agar mahasiswa dan calon pendidik dapat mempersiapkan diri menghadapi masalah pendidikan dalam dunia nyata. Buku ini disusun melalui berbagai pengalaman yang telah dilalui penulis, pengamatan langsung dan juga teori-teori belajar dari berbagai literatur.

Ucapan terimakasih kepada Rektor UNM dan jajarannya, Dekan FIP UNM dan jajarannya, Kaprodi Teknologi Pendidikan FIP UNM dan teman sejawat, serta tim yang telah membantu penyelesaian buku referensi ini terkhusus kepada Bapak Almarhum Martoenoes Arifin sebagai narasumber buku ini. Buku referensi Kapita Selekta Pendidikan diharapkan mampu menjadi jawaban bagi mahasiswa, calon pendidik, pendidik dan masyarakat pada umumnya atas berbagai pertanyaan terkait masalah pendidikan yang di Indonesia.

Makassar, November 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i	
KATA PENGANTAR.....	ii	
BAB I		
PENDAHULUAN	1	
A. Tujuan Dan Manfaat Mata Kuliah.....	1	
B. Deskripsi Mata Kuliah.....	1	
BAB II		
REFORMASI PENDIDIKAN NASIONAL		
A. Tujuan Pembelajaran	3	
B. Pendahuluan	3	
C. Uraian Materi	5	
D. Latihan.....	22	
BAB III		
BUDAYA NASIONAL SEBAGAI DASAR PENDIDIKAN		23
A. Tujuan Pembelajaran.....	23	
B. Pendahuluan.....	23	
C. Uraian Materi	25	
D. Latihan	35	
BAB IV		
WAJIB BELAJAR DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL		37
A. Tujuan Pembelajaran	37	
B. Pendahuluan	37	
C. Uraian Materi	38	
D. Latihan.....	52	
BAB V		
PENDIDIKAN PRASEKOLAH		55
A. Tujuan Pembelajaran	55	
B. Pendahuluan	55	
C. Uraian Materi	56	
D. Latihan.....	63	
BAB VI		
SEKOLAH DASAR SEKOLAH RENDAH		65
A. Tujuan Pembelajaran	65	
B. Pendahuluan	65	
C. Uraian Materi	66	

D. Latihan.....	72
BAB VII	
SEKOLAH MENENGAH KOMPREHENSIF.....	73
A. Tujuan Pembelajaran	73
B. Pendahuluan	73
C. Uraian Materi	74
D. Latihan.....	87
BAB VIII	
PENDIDIKAN GURU	89
A. Tujuan Pembelajaran	89
B. Pendahuluan	89
C. Uraian Materi	90
D. Latihan.....	107
BAB IX	
PENDIDIKAN INTERNASIONAL.....	109
A. Tujuan Pembelajaran	109
B. Pendahuluan	109
C. Uraian Materi	110
D. Latihan.....	130
BAB X	
PENDIDIKAN WANITA.....	131
A. Tujuan Pembelajaran	131
B. Pendahuluan	131
C. Uraian Materi	132
D. Latihan.....	149
BAB XI	
PENDIDIKAN SEKS.....	151
A. Tujuan Pembelajaran	151
B. Pendahuluan	151
C. Uraian Materi	152
D. Latihan.....	170
DAFTAR PUSTAKA.....	171

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Tujuan dan Manfaat Mata Kuliah

Disadari sepenuhnya bahwa untuk menjadi seorang pendidik, maka orang harus memiliki wawasan yang luas tentang seluk beluk pendidikan itu. Namun disadari pula bahwa setiap program pendidikan/jurusan manapun dalam lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) mempunyai obyek material terbatas, sehingga banyak esensial dan krusial mengenai pendidikan yang tak tersentuh dalam program tersebut. Oleh karena itu mata kuliah ini ditawarkan agar anda memahami secara konseptual berbagai topik pilihan yang aktual dan fenomenal tentang pendidikan yang akan berguna kelak memperkuat struktur intelektual yang anda miliki sebagai pendidik/tenaga kependidikan.

B. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini bersifat pengantar yang dapat mendorong anda untuk mengkaji lebih jauh persoalan-persoalan/issu-issu pendidikan lainnya. Mata kuliah ini akan membahas tentang kerangka kajian seperti: Reformasi pendidikan nasional, budaya nasional sebagai dasar pendidikan nasional, konsep dasar wajib belajar, pendidikan pra-sekolah, sekolah dasar dan sekolah rendah, sekolah menengah konprehensif, pendidikan guru, konsep pendidikan Internasional, pendidikan wanita, pendidikan seks dan sebagainya. Mata kuliah ini berusaha sejauh mungkin menghubungkan pokok bahasan dengan isu-isu bidang pendidikan di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan.

BAB 2

REFORMASI PENDIDIKAN NASIONAL

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari uraian materi pada bab ini, maka mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan perkembangan sistem pendidikan di Indonesia.
2. Menjelaskan pengertian reformasi pendidikan dan asumsi-asumsi pelaksanaan reformasi pendidikan nasional.
3. Menjelaskan tendensi reformasi pendidikan nasional.
4. Mampu mendeskripsikan kondisi reformasi pendidikan di Indonesia.
5. Memahami implementasi reformasi pendidikan nasional.
6. Menjelaskan implikasi problem reformasi pendidikan nasional.
7. Menjelaskan solusi alternatif pemecahan masalah reformasi pendidikan nasional.

B. Pendahuluan

Masyarakat dan bangsa Indonesia kini memasuki millenium ketiga dengan segumpal tantangan dan harapan. Masyarakat dan bangsa Indonesia baru saja melewati masa krisis yang berkepanjangan, bahkan hampir-hampir membawa bangsa ini ke arah disintegrasikan. Kini setelah keluar dari masa krisis mulai terlihat tanda-tanda adanya kegelairan hidup. Masa krisis telah membawa hikmah, yaitu belajar dari kekeliruan-kekeliruan masa lalu. Salah satu yang kita peroleh dari masa krisis ialah perlunya dikembangkan kehidupan demokratis antara lain terwujudnya kebebasan berpendapat, sekaligus merangsang kita, terutama bagi para pemimpin, para pendidik, dan pemerhati pendidikan untuk terus menerus berefleksi mengenai pendidikan anak bangsa. Pendidikan adalah bagian dari proses kehidupan manusia yang terus berkembang. Perkembangan aspek pendidikan tidak terlepas dari dampak perkembangan zaman yang banyak membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan bangsa.

Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah untuk mencerdaskan kehidupan

bangsa. Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang mampu berjuang (*survive*) dalam menghadapi berbagai macam kesulitan. Kenyataannya, dewasa ini bangsa Indonesia masih berada di tengah-tengah krisis global yang menyeluruh, dilanda krisis politik, krisis ekonomi, krisis hukum, krisis kebudayaan, dan tidak dapat disangkal juga dalam bidang pendidikan.

Ada dua hal yang menonjol di dalam masa krisis dewasa ini, yaitu:

1. Pendidikan tidak terlepas dari keseluruhan hidup manusia di dalam segala aspeknya yaitu aspek politik, ekonomi, hukum, dan kebudayaan.
2. Krisis yang dialami bangsa Indonesia dewasa ini merupakan pula refleksi dari krisis pendidikan nasional.

Orde baru bukan hanya sekedar suatu rezim pemerintahan juga suatu “*state of thinking*” atau model berfikir dalam kaitan ini orde baru merupakan suatu paradigma. Sudah kita lihat betapa pendidikan nasional tidak dapat dipisahkan dari usaha bangsa kita untuk membangun masyarakat Indonesia baru dengan berdasarkan kebudayaan nasional. Memasuki era reformasi, dengan pengalaman-pengalaman masa lalu yang telah membentuk masyarakat dan budaya Indonesia yang kini mengalami krisis, maka pertanyaan yang muncul ialah “apakah fungsi dari pendidikan nasional di dalam menghadapi tantangan era reformasi.” Pertama-tama tentunya perlu ada kesepakatan bersama mengenai bentuk masyarakat Indonesia baru yang ingin kita bangun. Masyarakat yang kita inginkan adalah suatu masyarakat yang adil dan makmur dengan supremasi hukum, masyarakat itu adalah suatu masyarakat madani. Masyarakat madani adalah salah satu bentuk yang ideal dari suatu masyarakat demokratis. Terbentuknya masyarakat madani tidak terlepas dari kehidupan masyarakat dan budaya suatu bangsa. Oleh sebab itu pula masyarakat madani Indonesia haruslah bertitik tolak dari pandangan kita mengenai masyarakat dan kebudayaan Indonesia.

Perubahan dan pembaharuan dalam pendidikan adalah sesuatu yang wajar dikarenakan dalam hidup ini pendidikan bagaikan air sungai yang mengalir terus. Apakah perubahan itu ?. Pada prinsipnya perubahan adalah meninggalkan atau mengganti yang lama dengan yang baru atau meningkatkan yang lama menjadi sesuatu yang baru namun kenyataan dapat terjadi perubahan asalkan berubah. Apapun alasannya sesuatu perubahan haruslah memperlihatkan secara kuantitatif dan kualitatif lebih baik dari yang sebelumnya. Tujuan diadakannya sebuah reformasi pendidikan, tidak lain dilandaskan pada tujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, cerdas, dan berkualitas sehingga mampu mewujudkan generasi emas dalam masyarakat madani. Pada kajian bab ini

akan dibahas mengenai sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sampai dengan keadaan pendidikan Indonesia saat ini, sistem pendidikan di Indonesia, dan sumber daya manusia seperti apa yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan global.

C. Uraian Materi

1. Perkembangan Sistem Pendidikan di Indonesia

Suatu sistem terdiri dari komponen atau unsur-unsur yang saling terkait dan berhubungan satu sama lain. Apabila dikontekskan ke dalam definisi sistem pendidikan, maka yang dimaksud ialah komponen-komponen pendidikan (pendidik, peserta didik, lingkungan, kurikulum, dan media) yang saling terkait/berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan. Perkembangan sistem pendidikan di Indonesia telah dimulai sejak zaman penjajahan Belanda. Saat itu, pola pendidikan di Indonesia bercirikan paham feodal dan tidak memandang anak sebagai pribadi unik yang harus dihargai keberadaannya. Pendidikan pada zaman dahulu bertujuan untuk menghasilkan manusia yang mengabdikan kepada sistem status dan feodalisme (Mangunwijaya, 1998).

Seiring dengan perkembangan sejarah bangsa, perkembangan pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh pokok-pokok pikiran yang diambil dari bangsa Barat. Apabila diamati, sebagian hasil kebijakan sistem pendidikan di Indonesia mengacu pada keberhasilan sistem pendidikan yang banyak diterapkan di Barat. Teori-teori belajar dan pembelajaran pun tak lepas dari paham tokoh-tokoh asing yang lebih diyakini kebenarannya dalam mewujudkan proses pendidikan yang bermutu.

Kemajuan informasi, teknologi dan komunikasi di abad ke-21, tidak dapat dipungkiri telah memberikan dampak perubahan pada berbagai aspek. Aspek pendidikan merupakan salah satu aspek yang potensial yang perlu dikembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, sebab pendidikan merupakan proses investasi sepanjang hayat. Sistem pendidikan yang dirancang dengan baik, tentu akan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing secara global. Saat ini sistem pendidikan di Indonesia lebih populer didasarkan pada 4 prinsip dari UNESCO yang dirumuskan di Melbourne tahun 1998, keempat prinsip tersebut yakni:

a. Learning to know

Pada proses pembelajaran melalui penerapan paradigma ini, peserta didik akan dapat memahami dan menghayati bagaimana suatu pengetahuan dapat diperoleh dari fenomena yang terdapat dalam lingkungannya.

b. *Learning to do*

Proses pembelajaran dengan penekanan agar peserta didik menghayati proses belajar dengan melakukan sesuatu yang bermakna "*Active Learning*". Peserta didik memperoleh kesempatan belajar dan berlatih untuk dapat menguasai dan memiliki standar kompetensi dasar yang dipersyaratkan dalam dirinya. Proses pembelajaran yang dilakukan menggali dan menemukan informasi (*information searching and exploring*), mengolah informasi dan mengambil keputusan (*information processing and decision making skill*), serta memecahkan masalah secara kreatif.

c. *Learning to be*

Kemandirian belajar merupakan kunci terbentuknya rasa tanggung jawab dan kepercayaan diri untuk berkembang secara mandiri. Sikap percaya diri akan lahir dari pemahaman dan pengenalan diri secara tepat. Belajar mandiri harus didorong melalui penumbuhan motivasi diri. Banyak pendekatan pembelajaran yang dapat diterapkan dalam melatih kemandirian peserta didik, misalnya; pendekatan sinektik, *problem solving*, keterampilan proses, *discovery*, *inquiry*, kooperatif, dan sebagainya. Pendekatan pembelajaran tersebut mengutamakan keterlibatan peserta didik secara efektif. Pendekatan-pendekatan pembelajaran ini pada dasarnya suatu proses sosial, peserta didik dibantu dalam melakukan peran sebagai pengamat yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi.

d. *Learning to life together*

Proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik menghayati hubungan antar manusia secara intensif dan terus menerus untuk menghindarkan pertentangan ras/etnis, agama, suku, keyakinan politik, dan kepentingan ekonomi. Peningkatan pendidikan nilai kemanusiaan, moral, dan agama yang melandasi hubungan antar manusia.

Reformasi pendidikan diperlukan untuk merumuskan sumber daya manusia yang unggul dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Reformasi mendasar pertama yang perlu dilakukan adalah bagaimana mengubah *mind set*, pola pikir dan perilaku pada semua komponen pendidikan di Indonesia. Reformasi pendidikan tidak hanya menyentuh pengetahuan dan pemahaman peserta didik, namun sikap, perilaku, dan kepribadian peserta didik juga perlu dibentuk (Drost, 2001). Reformasi pendidikan juga berkaitan dengan pergeseran paradigma pendidikan. Sayling Wen dalam bukunya "*Future of Education*" menyebutkan beberapa pergeseran paradigma pendidikan diantaranya:

1. Pendidikan yang berorientasi pada pengetahuan bergeser menjadi pengembangan ke segala potensi yang seimbang.

Dahulu, pembelajaran di sekolah-sekolah hanya sebatas mengajarkan hafalan dan proses pembelajaran yang hanya cenderung pada aspek kognitif. Namun, seiring dengan adanya perkembangan teori dan kesadaran akan kebutuhan masyarakat yang jauh lebih kompleks, pendidikan kini berusaha mengarahkan dan memfasilitasi peserta didik untuk mampu mengembangkan potensinya secara lebih optimal.

2. Dari keseragaman pembelajaran bersama yang sentralistik menjadi keberagaman yang terdesentralisasi dan terindividuulasikan.

Pendidikan di zaman sekarang, terutama pada abad ke-21 dalam praktiknya telah membebaskan peserta didik untuk mengakses pengetahuan secara lebih luas. Belajar dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja, dan kini sumber belajar tidak terbatas hanya pada guru yang mengajar di ruang kelas.

3. Pembelajaran dengan model penjenjangan yang terbatas menjadi pembelajaran seumur hidup.

Pendidikan seumur hidup maksudnya proses belajar bisa berlangsung terus menerus, tidak terbatas usia, tempat (hanya di persekolahan) maupun fasilitas. Sebagai contoh, saat ini banyak ditemukan pelatihan-pelatihan UMKM ataupun kelompok PKK terkait dengan keterampilan yang bisa dikelola menjadi sumber penghasilan, hal ini menunjukkan bahwa proses belajar tidak hanya dimiliki oleh yang mengenyam pendidikan formal saja (SD, SMP, dan SMA).

4. Dari pengakuan gelar kearah pengakuan kekuatan-kekuatan nyata (profesionalisme).

Indikator yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini ialah bukan lagi dilihat dari gelar yang diperoleh seseorang, namun lebih kepada pengakuan atas kinerja dan kompetensinya dalam memecahkan suatu permasalahan. Sebagai contoh kasus Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Apabila dilihat dari status jenjang pendidikannya, Ibu Susi pernah tidak menyelesaikan pendidikan SMA-nya namun pada kenyataannya kinerjanya diakui dan bahkan mendapat salah satu penghargaan dari WWF sebagai *Leaders for a Living Planet Award* tahun 2016 atas perannya dalam memajukan sektor perikanan yang berkelanjutan, pelestarian alam laut, dan pemberantasan pencurian ikan.

5. Pembelajaran yang berbasis pada pencapaian target kurikulum bergeser menjadi pembelajaran yang berbasis pada kompetensi dan produksi.
Kurikulum harus mampu memfasilitasi peserta didik untuk mampu menguasai kompetensi menyeluruh, dibandingkan dengan hanya mengejar terpenuhinya pokok bahasan dalam satu semester. Kompetensi yang dirumuskan pun harus diarahkan sesuai dengan kebutuhan dunia global.
6. Pendidikan sebagai investasi manusia dengan *high cost*, yang dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas, khususnya pendidikan tinggi.
Pendidikan kini dapat diakses oleh siapapun, terbuka banyak kesempatan untuk masyarakat golongan menengah ke bawah untuk dapat mengakses pendidikan tinggi secara cuma-cuma, misalnya dengan memanfaatkan kesempatan beasiswa, pertukaran pelajar, dan sebagainya.

2. Pengertian Reformasi Pendidikan Nasional

Reformasi secara etimologi berasal dari kata formasi, yang berarti susunan atau bentuk susunan instansi. Pendidikan yaitu pengetahuan tentang mendidik. Nasional yaitu yang berkenaan dengan bangsa sendiri. Reformasi berarti perubahan radikal untuk perbaikan dalam bidang sosial, politik atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan pada peraturan negara tersebut, misalkan di negara Indonesia berarti pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Menurut David D. Curris (2000), mengemukakan ada empat strategi mayor dalam reformasi pendidikan, yaitu:

a. Akuntabilitas berbasis standar

Dengan menetapkan standar pengeluaran yang jelas, serta pengujian secara sistematis atas kemajuan siswa, berupa statement kepercayaan dimana guru dan siswa akan di dorong pada fokus usaha pembelajaran dan arah yang benar. Ada lima elemen kunci akuntabilitas berbasis standar, yaitu:

1. Standar isi yang padat dan dapat dimengerti;
2. Instrument pengujian yang valid sesuai dengan standar yang ditetapkan;
3. Pengembangan profesional sebagai kunci utama pencapaian standar itu;
4. Pelaporan hasil secara tepat waktu, akurat dan dapat dimengerti;

5. Ketepatan ganjaran, sanksi, dan bantuan yang ditargetkan;

b. Reformasi sekolah secara menyeluruh

Bentuk kebijakan yang hanya memacu target spesifik, struktur, dan metode-metode instruksional yang kaku. Reformasi pendidikan persekolahan yang berpijak pada serba keterbatasan, hanya memilih cara termudah dan termurah dalam pengalokasian sumber-sumber, dan dukungan politik yang minim, maka hasil yang akan dicapai tidak lebih bersifat terfragmentasi dan temporal. Karena itulah, usaha-usaha kekinian dimaksudkan untuk mencapai reformasi sekolah secara menyeluruh. Untuk hal ini diperlukan investasi yang mahal, dan perumusan kebijakan dilakukan dengan berbasis kepada hasil-hasil penelitian, pendekatan komprehensif, terkoordinasi, target-target pencapaian yang terukur, dan dukungan yang kuat di tingkat sekolah.

c. Strategi pasar

Sebagai perantara sosial yang menawarkan jasa layanan yang bersifat intelektual, afeksi, psikomotorik, emosional, dan spiritual. Untuk merenspons kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang semakin bervariasi, sekolah-sekolah harus dapat tampil secara diferensiatif, memiliki keunggulan yang berbeda dibandingkan dengan sekolah lain. Keunggulan-keunggulan dimaksud menyangkut satu atau beberapa bidang, seperti akademik, ekstrakurikuler, tenaga pengajar, kedisiplinan, bangunan fisik, elitis, pemberian beasiswa, dan lain-lain. Termasuk dalam skema unggulan ini adalah kemampuan sekolah menyediakan semacam *voucher* atau beasiswa bagi anak-anak yang dikategorikan kurang beruntung karena kemiskinan, yatim piatu, diabaikan oleh keluarga, terisolasi secara geografis, dan lain-lain.

d. Pembuatan keputusan yang bersifat demokratis atau pelimpahan kewenangan

Keputusan partisipatif merupakan strategi sistematis yang berfokus kepada pemberdayaan guru dan administrator di tingkat sekolah. Rasionalnya, adalah masyarakat mengetahui bahwa siswa-siswa terbaik mempunyai otonomi untuk berkreasi dan mengimplemantasikan program-program secara responsive. Pendekatan ini dilakukan dengan variasi nama, dari manajemen berbasis sekolah ke pembuatan keputusan secara partisipatif, dengan fokus utama lebih pada proses daripada produk khusus dari reformasi.

Empat strategi ini diharapkan dapat menjadi agenda reformasi dalam merumuskan kebijakan pendidikan di Indonesia. Reformasi pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai terjadinya perubahan mendasar

ke arah yang lebih baik, mengingat selama ini keberadaan pendidikan tidak jarang menjadi alat politis, yang akhirnya merugikan dunia pendidikan itu sendiri. Jadi reformasi pendidikan nasional adalah perubahan radikal yang ada dalam suatu instansi pendidikan yang berada dalam naungan suatu negara kebangsaan.

3. Asumsi Pelaksanaan Reformasi Pendidikan Nasional

Salah satu hakikat hidup demokratis ialah kebebasan untuk mencari kebenaran. Kebenaran di dalam kehidupan demokratis merupakan perpaduan antara yang universal, yang tidak pernah dapat dicapai, dengan kebenaran yang lahir dari kondisi sosial obyektif pada suatu masa. Kebenaran adalah kemungkinan yang terus menerus disempurnakan, sedangkan kebenaran abadi hanya ada pada Sang Pencipta. Namun manusia hidup di dalam alam demokrasi, hidup di dalam dinamika kebebasan berfikir yang menghargai adanya perbedaan pendapat tetapi juga kemungkinan terus mencapai kesepakatan bersama untuk mencari yang terbaik untuk semua.

Esensi lain dari kehidupan berdemokrasi ialah adanya kesediaan untuk mengapresiasi perbedaan. Seringkali kita harus sepakat bahwa kita saling berseberangan pendirian, namun kedua pihak bersepakat pula dalam suatu keinginan untuk bersama-sama mencari yang terbaik dengan mengasah pikiran dan konsep-konsep dari semua pihak. Salah satu esensi kehidupan manusia ialah mencari kesepakatan. Begitupula dalam pendidikan, perubahan-perubahan yang terjadi akan menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak, namun akhirnya terjadi kesepakatan.

Ada beberapa asumsi pelaksanaan reformasi pendidikan, diantaranya:

a. Pendidikan adalah sesuatu yang menetap

Selama ini nampak bahwa betapa pendidikan telah direduksi sebagai proses untuk lulus UN (Ujian Nasional) dan ujian masuk perhuruan tingginegeri (SBMPTN, SNMPTN, dan jalur Mandiri) tetapi tidak diarahkan kepada pembentukan masyarakat yang bermoral dan beradab. Sesuai dengan UUD 1945 pendidikan seharusnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini berarti pendidikan adalah usaha untuk memberdayakan manusia. Manusia yang berdaya adalah manusia yang dapat berfikir kreatif, yang mandiri, dan yang dapat membangun dirinya dan masyarakatnya yang diiringi dengan nilai-nilai moral yang tinggi yang diperoleh dan telah ada sejak dulu dan merupakan warisan dari nenek moyang yang tidak boleh lepas dari kehidupan, walaupun arus teknologi dan globalisasi semakin

cepat, tetapi ada satu hal yang tidak boleh hilang yaitu moral yang dapat diperoleh dari proses pendidikan.

b. Pendidikan adalah sesuatu yang berubah

Kehidupan global dalam dunia terbuka dengan perdagangan bebas serta kerjasama regional memerlukan manusia-manusia yang berkualitas. Manusia yang berkualitas adalah manusia yang bisa bersaing di dalam arti yang baik. Di dalam persaingan diperlukan kualitas individu sehingga hasil karya atau produk-produk yang dihasilkan dapat berkompetisi yang berarti mendorong ke arah kualitas yang semakin lama semakin meningkat. Kualitas yang baik dan terus menerus meningkat hanya dapat diciptakan oleh manusia-manusia yang mempunyai kemampuan berkompetisi dengan jalan memberikan pendidikan yang kondusif bagi lahirnya pribadi-pribadi yang kompetitif, tetapi bukan berarti pribadi yang egoistik.

c. Pendidikan adalah sesuatu yang menetap dan sesuatu yang berubah

Kehidupan global akan melahirkan kebudayaan global, lihat saja kepada berbagai bentuk *life style* yang mulai melanda kehidupan generasi muda terutama di kota-kota besar. Cara hidup global, tontonan global, makanan global, cita rasa global telah memasuki kehidupan masyarakat kita. Di satu pihak budaya global dapat membuka horizon pemikiran anggota masyarakat, tetapi juga kemungkinan masuknya unsur-unsur kebudayaan asing akan meracuni kehidupan generasi muda kita. Tugas pendidikan nasional adalah mengembangkan identitas peserta didik agar supaya dia bangga menjadi bangsa Indonesia yang penuh percaya diri memasuki kehidupan global sebagai seorang yang berbudaya. Pendidikan memang bukan hanya bertujuan menghasilkan manusia yang pintar dan terdidik tetapi yang penting adalah manusia yang terdidik dan berbudaya (*educated and civilized human being*). Artinya, kita tetap mengikuti perkembangan zaman dan nilai-nilai moral tidak ditinggalkan, tetapi dijadikan pegangan dan pengikat dalam menyaring dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan IPTEK dan dunia global. Dari kenyataan yang ada terdapat kecenderungan untuk melakukan perubahan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi, dan lain-lain.

Selain adanya asumsi bahwa pendidikan adalah sesuatu yang menetap dan sesuatu yang berubah, perlunya dilakukan reformasi (rekonstruksi) sistem pendidikan di Indonesia diantaranya disebabkan oleh:

1. Perubahan atau reformasi sistem pendidikan selalu berorientasi pada aspek-aspek yang positif demi kemajuan bangsa dan sumber daya manusianya, sebagai contoh semakin minimnya kesenjangan pendidikan, adanya peningkatan subsidi pemerintah di bidang pendidikan, dan sebagainya.

2. Adanya perubahan zaman dari masa ke masa. Apabila sistem pendidikan tidak disesuaikan dengan tuntutan perubahan zaman, maka bangsa kita akan menjadi bangsa yang semakin tertinggal. Oleh sebab itu, pendidikan sebagai alat pembentuk generasi penerus bangsa, harusnya mampu mengidentifikasi perkembangan zaman yang perlu disesuaikan dengan pola sistem pendidikan Indonesia. Namun, dalam prakteknya jangan sampai perkembangan zaman juga sampai pada merubah landasan-landasan pendidikan yang justru merupakan ciri khas bangsa Indonesia.
3. Reformasi diperlukan untuk dapat merumuskan pendidikan yang bersifat lebih strategis dan praktis.

4. Tendensi Reformasi Pendidikan Nasional

Sebuah proses reformasi tentu akan memberikan dampak perubahan bagi sistem pendidikan yang sedang berjalan. Dampak perubahan dapat membawa variasi sistem pendidikan yang semakin baik, namun terkadang juga dapat menimbulkan berbagai persoalan baru. Reformasi pendidikan nasional pada intinya selalu mengacu pada dasar pendidikan nasional yaitu UUD 45 dan dasar negara, Pancasila. Pada prakteknya dapat diamati adanya beberapa tendensi (kecenderungan) arah reformasi pendidikan nasional yang dilihat dari aspek perubahannya terhadap sistem pendidikan Indonesia, yaitu:

1. Adanya reformasi di bidang kurikulum dan program-program belajar di institusi pendidikan.
2. Perubahan berfokus pada perombakan kurikulum secara terus menerus yang mengarah pada inovasi dan distribusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) yang merata.
3. Materi ajar dan metode pembelajaran senantiasa berkembang dengan mengadopsi teori-teori belajar dan pembelajaran dari luar yang terbukti efektif.
4. Reformasi menghasilkan berbagai kebijakan-kebijakan baru yang harus diikuti oleh kesiapan sumber daya dan sumber daya manusia yang siap. Reformasi pendidikan nasional kita seyogyanya didasarkan atas pertumbuhan yang komprehensif meliputi antara lain: ekonomi, politik, lapangan kerja, geografis, penemuan-penemuan ilmiah kemudian sosial *outlook* dan nilai-nilai kehidupan.
5. Berfokus pada pembangunan pendidikan yang komprehensif, termasuk penyediaan sarana prasarana institusi pendidikan,

alokasi bantuan dana pendidikan, hingga pemberian tunjangan kesejahteraan pada guru.

Reformasi pendidikan nasional yang dilakukan dapat dilihat dari isi jangkauannya, yakni:

1. Perubahan total yaitu merombak pendidikan nasional sampai ke akar-akarnya dan menggantinya dengan sesuatu yang baru.
2. Perubahan menyeluruh yaitu merombak hal-hal penting yang terdapat pada setiap komponen pendidikan nasional itu.
3. Perubahan berbagai komponen pendidikan yaitu merombak hal-hal yang dipandang penting pada berbagai komponen pendidikan nasional.

Sedangkan apabila dilihat dari isi kandungannya, adalah:

1. Perubahan fundamental konseptual yaitu merombak hal yang mendasar mengganti dengan pemikiran yang baru.
2. Perubahan fundamental fenomenal yaitu memperbaiki pelaksanaan pendidikan dari apa adanya menjadi lebih baik.
3. Perubahan baik konseptual maupun implemental.

5. Dasar Reformasi Pendidikan Nasional

Perubahan sistem pendidikan sebagai dampak reformasi pendidikan, harus selalu diarahkan untuk mencerminkan adanya demokratisasi dalam pendidikan nasional. Secara substansial perubahan atau reformasi itu dilakukan atas dasar:

1. Undang-undang pendidikan nasional, yaitu koreksi dan perbaikan atas undang-undang pendidikan nasional yang ada.
2. Reformasi atas sistem dan komponen sistem nasional dalam menterjemahkan undang-undang secara rinci dan jelas dalam sistem pendidikan nasional.
3. Reformasi dalam pelaksanaan pendidikan nasional menggambarkan konsistensi perilaku pendidikan dengan undang-undang pendidikan dan konsep dalam pendidikan nasional yang ada.

6. Implementasi Reformasi Pendidikan Nasional

Reformasi pendidikan adalah upaya perbaikan pada bidang pendidikan. Reformasi pendidikan memiliki dua karakteristik dasar yaitu terprogram dan sistemik. Reformasi pendidikan yang terprogram menunjuk pada kurikulum atau program suatu institusi pendidikan. Yang termasuk ke dalam reformasi terprogram ini adalah inovasi.

Inovasi adalah memperkenalkan ide baru, metode baru atau sarana baru untuk meningkatkan beberapa aspek dalam proses pendidikan agar terjadi perubahan secara kontras dari sebelumnya dengan maksud tertentu yang ditetapkan. Sedangkan reformasi sistemik berkaitan dengan adanya hubungan kewenangan dan distribusi serta alokasi sumber daya yang mengontrol sistem pendidikan secara keseluruhan. Hal ini seringkali terjadi di luar sekolah dan berada pada kekuatan sosial dan politik.

Karakteristik reformasi sistemik ini sulit sekali diwujudkan karena menyangkut struktur kekuasaan yang ada. Sementara itu kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada manajer untuk bergerak. Kebijakan juga berarti suatu keputusan yang luas untuk menjadi patokan dasar bagi pelaksanaan manajemen. Kebijakan adalah keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak.

Pendidikan sudah sepatutnya menentukan masa depan suatu negara. Bila visi pendidikan tidak jelas, yang dipertaruhkan adalah kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Visi pendidikan harus diterjemahkan ke dalam sistem pendidikan yang memiliki sasaran jelas, dan tanggap terhadap masalah-masalah bangsa. Karena itu, perubahan dalam subsistem pendidikan merupakan suatu hal yang sangat wajar, karena kepedulian untuk menyesuaikan perkembangan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sudah seyogyanya sistem pendidikan tidak boleh jalan di tempat, namun setiap perubahan juga harus disertai dan dilandasi visi yang mantap dalam menjawab tantangan zaman.

Studi tentang kebijakan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari pengkajian politik pendidikan itu sendiri. Politik pendidikan sebagai sebuah lapangan kajian keilmuan memiliki akar intelektualnya dalam ilmu politik. Dengan demikian, perhatian utama politik pendidikan akan mempergunakan pula domain-domain ilmu politik seperti: kekuasaan (*power*), pengaruh (*influmce*), pertikaian (*conflic*), dan alokasi nilai-nilai otoritatif (*authoritatioe allocation of oalues*).

Di Indonesia, berubahnya subsistem pendidikan (kurikulum, UU) biasanya tidak ditanggapi dengan antusiasme, namun malah sebaliknya membuat masyarakat ragu apakah penguasa di Indonesia memiliki visi pendidikan yang jelas atau tidak. Visi pendidikan diharapkan mampu menentukan tujuan pendidikan yang jelas. Karena, tujuan pendidikan yang jelas pada gilirannya akan mengarahkan ke pencapaian kompetensi yang dibutuhkan serta metode pembelajaran yang efektif, yang pada akhirnya, kelak pendidikan mampu menjawab tuntutan untuk

mensejahterakan masyarakat dan kemajuan bangsa. Setidaknya ada empat tujuan yang menjadi idealisme pendidikan.

Sejarah sistem pendidikan di Indonesia pada masa reformasi diwarnai oleh keadaan politik dan ekonomi pada saat itu. Pada masa tersebut telah lahir Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam bidang pendidikan bukan lagi merupakan tanggung jawab pemerintah pusat tetapi diserahkan kepada tanggung jawab pemerintah daerah. Selain itu pada masa ini telah terjadi beberapa pergantian presiden yang menyebabkan pergantian nama dari Depdikbud menjadi Depdiknas dan saat ini Kemendikbud.

Sejarah sistem pendidikan nasional pada masa reformasi diterapkan juga hingga sekarang yaitu dalam proses pendidikan, guru tidak hanya menjalankan fungsi sebagai pemindah ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*) dari guru ke murid (*top down*), tetapi juga berfungsi sebagai orang yang menanamkan nilai (*values*), membangun karakter (*character building*) serta mengembangkan potensi besar yang dimiliki murid secara berkelanjutan.

Reformasi merupakan istilah yang amat populer pada masa krisis dan menjadi kata kunci dalam membenahi seluruh tatanan hidup berbangsa dan bernegara di tanah air tercinta ini, termasuk reformasi di bidang pendidikan. Pada era reformasi, masyarakat Indonesia ingin mewujudkan perubahan dalam semua aspek kehidupan. Masyarakat Indonesia kini sedang berada dalam masa transformasi. Era reformasi telah lahir dan masyarakat Indonesia ingin mewujudkan perubahan dalam semua aspek kehidupannya. Euforia demokrasi sedang marak dalam masyarakat Indonesia.

Di tengah euforia demokrasi ini lahir berbagai jenis pendapat, pandangan, konsep, yang tidak jarang yang satu bertentangan dengan yang lain, antara lain berbagai pandangan mengenai bentuk masyarakat dan bangsa Indonesia yang dicita-citakan di masa depan. Upaya untuk membangun suatu masyarakat, bukan pekerjaan yang mudah, karena sangat berkaitan dengan persoalan budaya dan sikap hidup masyarakat. Era kepemimpinan presiden Habibie tidak lama digantikan dengan Abdurrahman wahid. Era Abdurrahman wahid (Gusdur) adalah era yang penuh ketidakpastian, berkali-kali Gusdur melakukan pergantian kabinet.

Di bidang pendidikan tidak terlalu banyak prestasi yang diraih, kecuali mengganti nama Departemen Pendidikan Kebudayaan (Depdikbud) menjadi Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dan adanya kenaikan gaji pokok PNS yang cukup signifikan. Kekurangannya BBM dan nilai rupiah terhadap dolar Amerika sangat rendah. Sebenarnya sektor pendidikan menjadi tumpuan harapan dan memiliki peran strategis dan fungsional dalam

upaya membangun dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Pendidikan sebenarnya selalu didesain untuk senantiasa berusaha menjawab kebutuhan dan tantangan yang muncul di kalangan masyarakat sebagai konsekuensi dari suatu perubahan. Tetapi pada kenyataannya, kondisi “pendidikan kita masih melahirkan *mismatch* yang luar biasa dengan tuntutan dunia kerja. Kondisi seperti ini juga berarti bahwa daya saing kita secara global amat rendah. Apabila kita merenungkan kondisi sekarang ini, dengan munculnya kekerasan, masyarakat bertindak menghakimi sendiri, dan berbagai macam bentuk perilaku kekerasan, menggambarkan bangsa ini sedang sakit. Nampaknya ada sesuatu yang “salah” dari reformasi, apakah sistem pendidikan yang “salah” karena hanya “membentuk” manusia-manusia yang tidak “mampu”, menjadi beban dan brutal, atukah merupakan akses dari kebijakan dan praktek pendidikan di masa rezim orde baru yang otoriter telah melahirkan sistem pendidikan yang tidak mampu melakukan pemberdayaan masyarakat secara efektif. Walaupun secara kuantitatif rezim ini memang telah mampu menunjukkan prestasi yang cukup baik dibidang pendidikan.

Patut diakui kemajuan-kemajuan pendidikan secara kuantitatif bisa kita rasakan selama orde baru. Namun keberhasilan kuantitatif ini belum terlihat pemberdayaan masyarakat secara luas sebagai cermin dari keberhasilan suatu sistem pendidikan, dan tidak pernah terjadi. “Mengapa demikian? Karena orde baru, setelah lima tahun pertama berkuasa, secara sistematis telah menyiapkan skenario pemerintahan yang memiliki visi dan misi utama untuk melestarikan kekuasaan dengan berbagai cara dan metode. Akibatnya, sistem pendidikan kemudian dijadikan sebagai salah satu instrumen untuk menciptakan *safetynet* bagi pelestarian kekuasaan.

Visi dan misi pelestarian kekuasaan itu, melahirkan kebijakan pendidikan yang bersifat *straight jacket*. Pendidikan produk orde baru belum bisa diharapkan untuk membangun dan memberdayakan masyarakat, karena pendidikan yang berjalan pada masa orde baru dan produknya dapat dirasakan sekarang ini, sebatas pada sosialisasi nilai dengan pola hafalan dan kreativitas dipasung. Menurut Tilaar, bahwa “sistem pendidikan nasional sangat erat kaitannya dengan kehidupan politik bangsa pada saat itu.

Maka selama orde baru telah tercipta suatu hidupan bangsa yang tidak sesuai dengan cita-cita UUD 1945. Pemerintah orde baru yang represif telah menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang tertekan, tidak kritis, bertindak dan berpikir dalam acuan suatu struktur kekuasaan yang hanya mengabdikan kepada kepentingan sekelompok kecil rakyat. Indonesia patut diakui, bahwa produk pendidikan orde baru, masih berpengaruh sampai sekarang ini.

Kehidupan politik bangsa sekarang sudah mengalami perubahan mulai dari era reformasi sampai saat ini di pemerintahan Jokowi dan JK, sehingga paradigma yang digunakan pada era orde baru tidak dapat digunakan pada era reformasi, karena pada era reformasi menuntut kembali kedaulatan rakyat yang telah hilang, begitupula saat ini yang menuntut kebebasan memperoleh ilmu pengetahuan kapan dan dimana saja yakni memasuki era *digital*.

Sementara dalam usaha merubah kehidupan masyarakat, baik pada pola pikir, pandangan, dan tindakan masih menggunakan paradigma orde baru. Maka, pada era reformasi sekarang yang sedang bergulir ini, seharusnya pendidikan nasional dikembalikan kepada fungsinya yaitu memberdayakan masyarakat dengan mengembalikan kedaulatan rakyat untuk membangun dirinya sendiri.

Pendidikan nasional perlu direformasi untuk mewujudkan visi baru masyarakat Indonesia yaitu suatu masyarakat madani Indonesia. Hal ini, juga terjadi pada pendidikan Islam, karena pendidikan Islam mempunyai kedudukan yang sama dalam sistem pendidikan nasional Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk itu, pendidikan Islam harus diupayakan untuk direformasi, karena posisi pendidikan sebagai sub sistem pendidikan nasional tidak terlepas dari kehidupan politik bangsa yang sedang mengalami perubahan.

Pendidikan pada zaman reformasi mengalami suatu perkembangan yang pada dasarnya lebih maju daripada pendidikan pada zaman orde baru. Pendidikan pada zaman reformasi mengutamakan pada perkembangan peserta didik yang lebih terfokus pada pengelolaan masing – masing daerah (otonomi pendidikan). Dalam hal tenaga kependidikan diberlakukan suatu kualifikasi profesional untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Sedangkan sarana dan prasarana juga sudah mengalami suatu peningkatan yang baik.

Namun daripada hal tersebut pendidikan yang ada di Indonesia masih belum mengalami suatu pemerataan. Ini terlihat dari adanya beberapa sekolah-sekolah terutama di daerah pedalaman masih terdapat keterbatasan dalam berbagai aspek penyelenggaraannya. Dinamika sosial politik Indonesia yang juga berdampak pada perubahan kurikulum merupakan suatu bentuk penyempurnaan dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Pelaksanaan reformasi pendidikan tidak mudah untuk dapat dilakukan secara sekaligus tetapi harus bertahap. Apabila dilakukan secara bertahap maka diperlukan prioritas dengan mempertimbangkan:

1. Kejelasan hal-hal yang bersifat mendasar dan konseptual. Hal yang mendasar dan konseptual itu akan menentukan dalam pelaksanaan pendidikan.
2. Konsistensi pelaksanaan pendidikan dengan konsep dasar serta dalam hal-hal yang merupakan pelaksanaan pendidikan.
3. Untuk hal-hal tertentu, reformasi konsep dan pelaksanaan dapat dilakukan secara bersamaan.

Adapun sampai saat ini, beberapa poin penting dari pelaksanaan reformasi pendidikan nasional di Indonesia adalah adanya peningkatan dalam:

1. Pemerataan pendidikan, terutama pemerataan kesempatan pendidikan pada masyarakat daerah 3T maupun pemerataan tenaga pendidik di daerah-daerah.
2. Terbukanya akses Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) sebagai solusi keterbatasan kondisi geografis Indonesia.
3. Terbukanya akses pendidikan terpadu dari tingkat pendidikan anak usia dini sampai pada pendidikan tinggi.

7. Kondisi Reformasi Pendidikan Di Indonesia

Saat ini fokus kerja pemerintah masih bertumpu pada sektor pendidikan formal. Untuk kinerja itu pun pemerintah Indonesia oleh UNDP (United Nations Development Programs) dalam "Human Development Report 2006" untuk kualitas pembangunan manusia diganjar peringkat 108 dari 177 negara di dunia. Potret UNDP itu membangun dengan data BPS (Biro Pusat Statistik) tahun 2005 tentang angka pengangguran menurut pendidikan dan wilayah desa kota: presentase pengangguran tamatan SMA keatas lebih besar dibanding tamatan SMP kebawah. Artinya, sistem pendidikan nasional belum berhasil mengantarkan anak bangsa untuk *survive* mandiri dan terampil berwusaha untuk kelangsungan hidupnya sendiri.

Tentu saja aspek moral tidak boleh dilupakan. Sekolah adalah tempat menumbuhkan suburkan nilai-nilai luhur dalam diri anak bangsa yang menjadi peserta didik. Tawuran perilaku asusila sebagian oknum pelajar/mahasiswa adalah cermin belum terimplementasikannya amanat UUD 1945 dan UU sistem pendidikan nasional tentang nilai-nilai agama. Kegiatan sekolah lebih besar porsi untuk pengajaran.

Padahal pengajaran tanpa bingkai pendidikan moral hanya menciptakan orang pintar yang kehilangan arah dari hakikat kemuliaan eksistensinya sebagai makhluk mulia yang bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa. Karena itu, seluruh komponen bangsa harus bersatu padu dan

meningkatkan komitmen untuk merumuskan merealisasikan kebijakan peningkatan mutu pendidikan. Sebab, pembangunan dan penyelenggara pendidikan nasional yang benar dan efektif merupakan amanat konstitusi sekaligus tuntutan zaman yang tak bisa dielakan tanpa itu, bangsa besar ini akan masuk dalam daftar sejarah sebagai bangsa yang kalah dan musnah.

Pada era pemerintahan Habibie masih menggunakan kurikulum 1994 yang disempurnakan sampai pada masa pemerintahan Gusdur.

Pada masa pemerintahan oleh presiden ke lima Indonesia yaitu Megawati terjadi beberapa perubahan tatanan di bidang pendidikan, antara lain:

1. Dirubahnya kurikulum 1994 menjadi kurikulum 2000 dan akhirnya disempurnakan menjadi kurikulum 2002 (KBK). KBK atau Kurikulum Berbasis Kompetensi merupakan kurikulum yang pada dasarnya berorientasi pada pengembangan tiga aspek utama, yang terdapat dalam kurikulum yang hendak dicapai oleh peserta didik antara lain aspek afektif (sikap), kognitif (pengetahuan) dan psikomotorik (ketrampilan).
2. Pada tanggal 8 juli 2003 disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memberikan dasar hukum untuk membangun pendidikan nasional dengan menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, otonomi, keadilan dan menjunjung Hak Asasi Manusia.

Menurut Lembaran Negara Nomor 4301 Pendidikan dalam UU Republik Indonesia No. 20/2003, pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Visi dari pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Adapun misi dari pendidikan nasional adalah sebagai berikut:

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.
3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.

4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, ketrampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global.
5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian setelah Megawati turun dari jabatannya dan digantikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, UU No. 20/2003 masih tetap berlaku, namun pada masa SBY juga ditetapkan UU RI No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen. Penetapan Undang-Undang tersebut disusul dengan pergantian kurikulum KBK menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum ini berasaskan pada PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. KTSP merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan serta silabus (BSNP, 2006: 2). KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik serta lingkungan.
2. Beragam dan terpadu.
3. Tanggapan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan.
5. Menyeluruh dan berkesinambungan.
6. Belajar sepanjang hayat.
7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah

Tujuan pendidikan KTSP :

1. Untuk pendidikan dasar, diantaranya meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
2. Untuk pendidikan menengah, meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
3. Untuk pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta

ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.

8. Implikasi Permasalahan Reformasi Pendidikan Nasional

Setiap perubahan, sewajarnya akan selalu membawa dampak dan konsekuensi. Besar atau kecilnya resiko, bukanlah masalah yang berarti asalkan sudah diantisipasi dan dipersiapkan dengan baik. Oleh sebab itu, reformasi pendidikan perlu diikuti dengan adanya kesiapan:

1. Biaya pendidikan yang mencukupi, baik untuk mendukung pelaksanaan pendidikan maupun bagi pengadaan sarana/fasilitas pendidikan.
2. Sistem pengelolaan pendidikan yang efektif, efisien, dan memiliki kesiapan sumber daya manusia yang baik, sehingga konsep baru dapat diaplikasikan secara optimal.
3. Kualitas, loyalitas, dan *mindset* tenaga pendidik yang siap menerima perubahan.
4. Pemerataan akses informasi hingga ke daerah-daerah.
5. Tersedianya kemantapan konsep, yang diikuti dengan sosialisasi dan pendampingan.

Dampak dari sebuah perubahan tidak mungkin dapat dihindari, berikut ini beberapa dampak atau implikasi permasalahan yang muncul sebagai akibat dari adanya reformasi pendidikan nasional:

1. Pendidikan lebih berorientasi pada pembentukan aspek kognitif dan mengabaikan perkembangan aspek kepribadian siswa.
2. Adanya perubahan kurikulum mengakibatkan ketidak jelasan tujuan pendidikan serta kekaburan landasan pendidikan yang ingin dicapai.
3. Ditemukannya ketidaksesuaian kurikulum dengan kebutuhan zaman dan kebutuhan masyarakat.
4. Kesenjangan pendidikan yang ada di kota dengan yang ada di daerah, misalnya dalam hal sarana prasana dan ketersediaan tenaga pendidik yang profesional.

9. Solusi Permasalahan Reformasi Pendidikan Nasional

Diperoleh pemerataan yang efektif untuk memecahkan berbagai masalah reformasi pendidikan nasional, antara lain:

- 1) Pajak pendidikan merupakan salah satu sumber biaya pendidikan yang perlu dikelola dengan baik.

- 2) Perlu suatu deferesiensi pengolaan pendidikan sebelum menuju desentralisasi sistem pendidikan.
- 3) Meningkatkan penggunaan jasa bagi pemerataan dan kesempatan memperoleh pendidikan.
- 4) Diperlukan *in-service training* yang efektif untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan.

D. Latihan

1. Apakah yang dimaksud dengan reformasi pendidikan nasional ?
2. Jelaskan tendensi reformasi pendidikan nasional !
3. Kemukakan asumsi-asumsi dasar yang mendasari reformasi pendidikan nasional !
4. Kemukakan dan jelaskan teori dan konsepsi dasar reformasi pendidikan !
5. Jelaskan kondisi sistem pendidikan nasional di Indonesia saat ini !
6. Jelaskan implikasi problema reformasi pendidikan nasional !
7. Solusi-solusi alternatif apa saja yang bisa dilakukan dalam memecahkan masalah reformasi pendidikan ?

BAB III

BUDAYA NASIONAL SEBAGAI DASAR PENDIDIKAN

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari uraian materi pada bab ini, maka mahasiswa diharapkan dapat:

1. Mampu menjelaskan pengertian pendidikan dan budaya.
2. Mampu menjelaskan konsep budaya nasional sebagai dasar pendidikan.
3. Mampu menjelaskan keterkaitan antara pendidikan dan kebudayaan.
4. Mampu mendeskripsikan fungsi dan nilai-nilai budaya nasional sebagai dasar pendidikan.
5. Mampu mendeskripsikan implementasi budaya nasional sebagai dasar pendidikan.
6. Mampu menjelaskan implikasi masalah beserta solusi terkait budaya nasional sebagai dasar pendidikan.

B. Pendahuluan

Hanya manusialah yang memiliki budaya, kebudayaan bukan hanya membentuk pribadi seseorang tetapi juga dikembangkan oleh manusia itu sendiri. Dengan demikian jelaslah kiranya bahwa pendidikan tidak lain adalah proses pembudayaan. Artinya apabila pendidikan itu dilepaskan dari kebudayaan maka tujuan pendidikan dapat dimanipulasi kearah yang kurang jelas atau bahkan kearah yang salah dan bahkan dapat direayasa oleh kekuatan-kekuatan politik penguasa. Tanpa pendidikan yang inovatif dan kreatif maka kebudayaan akan hilang.

Didalam pengertian yang sebenarnya proses pendidikan tidak dapat di artikan secara sempit yaitu proses mendidik didalam gedung sekolah (*scholling*). Proses pendidikan mempunyai berbagai bentuk yaitu formal, non-formal, dan informal. Didalam bentuk pendidikan formal secara tradisional ditekankan kepada perkembangan kemampuan intelektual peserta didik meskipun sebenarnya bukan itu tujuan yang pokok dari pendidikan formal.

Namun demikian sejarah pendidikan modern terlalu menekankan kepada segi intelektual tersebut, sehingga banyak sekali kritik yang disampaikan ke alamat pendidikan formal seperti Paulo Freire, Giroux, dan para pembaharu pendidikan rakyat lainnya.

Didalam bentuk pendidikan non-formal yang ditekankan adalah pembentukan keterampilan seseorang untuk hidup. Oleh sebab itu lembaga-lembaga pendidikan non-formal sangat beragam dan terbuka, baik didalam kurikulumnya maupun di dalam pesertanya. Sedangkan pendidikan informal didalamnya dibentuk emosi dan berbagai jenis kemampuan intelegensi lainnya yang terabaikan didalam lembaga-lembaga pendidikan formal dan non-formal. Disinilah peranan kebudayaan sebagai lembaga pendidikan yang menghasilkan manusia seutuhnya. Namun justru bentuk pendidikan inilah yang dewasa ini telah terabaikan karena pendidikan telah dilacurkan sebagai pendidikan intelektual semata atau hanya untuk menghasilkan tenaga kerja semata.

Apabila kita telaah hakikat pendidikan maka ternyata hanya manusialah yang memerlukan pendidikan diantara segala makhluk ciptaan Ilahi. Oleh sebab itu dapat kita rumuskan hakikat pendidikan sebagai hakikat pemanusiaan. Dalam kaitan ini kita pinjam rumusan Romo Mangunwijaya yang mengatakan bahwa proses pendidikan mempunyai dua aspek yang saling mengisi yaitu proses hominisasi dan proses humanisasi.

Pendidikan sebagai proses hominisasi melihat manusia itu sebagai makhluk hidup didalam dunia atau ekologiannya. Dalam proses ini manusia memerlukan kebutuhan-kebutuhan biologis seperti makan, beranak pinak, pemukiman dan pekerjaan untuk menopang kehidupannya. Dengan singkat proses hominisasi memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk biologis. Sementara proses humanisasi melihat manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang bermoral (*human being*). Makhluk yang bermoral berarti manusia bukan hanya sekedar hidup tetapi hidup untuk mewujudkan suatu eksistensi yaitu bahwa manusia hidup bersama-sama dengan sesama manusia sebagai ciptaan Yang Maha Kuasa. Di dalam proses ini tingkah laku manusia diarahkan kepada nilai-nilai kehidupan yang vertikal didalam kenyataan hidup bersama dengan sesama manusia. Nilai-nilai luhur tersebut apakah diwahyukan ataupun yang dipelihara didalam kehidupan bersama yang disepakati dan dapat mengikat kehidupan bersama menuju suatu cita-cita bersama yaitu kehidupan yang lebih baik, tenteram dan berkeadilan. Hal-hal tersebut dijalin dan terjalin didalam nilai-nilai kebudayaan suatu masyarakat atau suatu kelompok hidup bersama. Proses humanisasi mencapai puncaknya pada seseorang yang berpendidikan dan berbudaya (*educated and civilized human being*).

C. Uraian Materi

1. Pengertian Pendidikan dan Budaya

Menurut Driyakarya, pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia muda. Crow and Corw berpendapat bahwa pendidikan adalah proses yang berisi berbagai macam kegiatan yang cocok bagi individu untuk kehidupan sosialnya, membantu meneruskan adat dan budaya serta kelembagaansosial dari generasi ke generasi. Sedangkan Ki Hajar Dewantara juga berpendapat bahwa pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (intelektual) dan jasmani.

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 bab 1 ayat 1 dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan adalah dasar, pondasi atau fondasi yang memperkuat dan memperkokoh dunia pendidikan dalam rangka untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas dan bermutu.

Dari beberapa pendapat tentang pengertian pendidikan diatas, pada dasarnya pendidikan merupakan suatu proses mendidik, yakni proses dalam rangka mempengaruhi peserta didik agar mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dalam lingkungannya sehingga akan menimbulkan perubahan dalam dirinya, yang dilakukan dalam bentuk pembimbingan, pengajaran, dan atau pelatihan.

Pendidikan menurut UU Sisdiknas 2003 Pasal 1 ayat 1 adalah *“usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”*.

Pendidikan Nasional yang dimaksud menurut UU Sisdiknas 2003 Pasal 1 ayat 2 adalah *“pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman”*.

Secara sosiologi pendidikan adalah sebuah warisan budaya dari generasi ke generasi, agar kehidupan masyarakat berkelanjutan, dan identitas masyarakat itu tetap terpelihara. Budaya merupakan bagian hidup manusia yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan hampir setiap kegiatan manusia tidak terlepas dari unsur budaya.

Memasuki abad ke 21 dan menyongsong milenium ketiga tentu akan terjadi banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat sebagai akibat dari era globalisasi. Dan pada kenyataannya masyarakat mengalami perubahan budaya yang begitu cepat, maju dan memperlihatkan gejala *desintegratif* yang meliputi berbagai sendi kehidupan dan menjadi masalah, salah satunya dirasakan oleh dunia pendidikan. Budaya berpengaruh besar dalam dunia pendidikan akibat dari pergeseran paradigma pendidikan yaitu mengubah cara hidup, berkomunikasi, berpikir, dan cara bagaimana mencapai kesejahteraan. Dengan mengetahui begitu pesatnya arus perkembangan dunia diharapkan dunia pendidikan dapat merespon hal-hal tersebut secara baik dan bijak.

Jadi, pendidikan nasional berakar pada tiga nilai, yaitu: nilai-nilai yang bersumber dari agama dan nilai-nilai yang bersumber dari kebudayaan nasional dan perkembangan tuntutan perubahan zaman.

a. Nilai-nilai Agama.

Pendidikan di Indonesia salah satunya didasarkan pada nilai-nilai agama walaupun secara tegas dinyatakan bahwa Indonesia bukan negara agama dan bukan pula negara sekuler, tetapi negara pancasila. Dengan status negara yang demikian, maka wajar kalau kemudian pemerintah Indonesia tetap memandang bahwa agama menduduki posisi penting di negeri ini sebagai sumber nilai yang berlaku. Karena negara ini adalah negara pancasila dan sesuai dengan pengalaman sila ke-1, maka nilai agama disini diambil dari semua agama yang diakui oleh negara Indonesia (pancasila). Misalnya nilai agama Islam dapat bersumberkan pada Al-Qur'an dan Hadis, Kristen pada Injil, dan seterusnya.

b. Nilai-nilai Kebudayaan Nasional.

Nilai-nilai Kebudayaan Nasional; dapat berupa gagasan, konsep, tata sosial, sistem nilai, perundangan, perilaku yang menunjukkan jati diri bangsa Indonesia.

c. Tuntutan perubahan zaman Pendidikan perlu menyesuaikan dengan perubahan zaman, misalnya dalam hal perkembangan TIK dan sebagainya.

2. Konsep Budaya Nasional sebagai Dasar Pendidikan

Budaya adalah karya dan hasil cipta manusia dalam mengubah alam ini. Pendidikan hanya dapat berbeda bila dilihat dari sudut yang berbeda. Dari sudut pendidikan budaya adalah :

1. Segala sesuatu yang terjadi sebagai hasil belajar.
2. Segala sesuatu yang menjadi rencana kebiasaan atau tradisi yang tepat dalam masyarakat.
3. Segala sesuatu yang hendak disesuaikan adalah dari generasi yang lebih tua kepada generasi yang lebih muda.

Budaya menurut Sorokin dibedakan atas 3 level.

- 1) Idiologi level, yaitu sistem nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat.
- 2) Behavioral level, yaitu sistem realisasi nilai-nilai dalam bentuk akhir.
- 3) Material level, yaitu materi atau media untuk mewujudkan nilai-nilai itu.

Dikemukakan oleh Ruth Benadieft terdapat tiga aliran budaya yaitu:

1. Relativisme, mengajak suatu masyarakat punya budaya berbeda dengan masyarakat lain. Antara budaya suatu masyarakat dengan budaya masyarakat lain dengan budaya lain tidak ada titik pertemuannya.
2. Universalisme, memandang semua budaya pada dasarnya sama dengan begitu terdapat titik pertemuan diantara semua budaya.
3. Konfigurasiisme yang menyatakan sentralisasi antara relativisme dan universalisme dengan anggapan terdapat titik perbedaan dan titik pertemuan diantara semua budaya itu, jadi pertemukanlah apa yang dapat dipertemukan, dan jangan pertemukan apa yang tidak mungkin dipertemukan. Adapun yang tidak mungkin dapat dipertemukan diantara budaya yaitu adalah apa yang bersifat individu dari suatu budaya (budaya inti).

Kebudayaan adalah perwujudan kemampuan manusia sebagai makhluk individu dan sosial mengolah usaha budi dalam menanggapi lingkungannya. Budaya Nasional sebagai dasar pendidikan itu harus mencerminkan semua komponen sistem pendidikan termasuk pada proses dan hasil pendidikan.

3. Keterkaitan Antara Pendidikan dan Kebudayaan

Interelasi antara pendidikan dan kebudayaan menjadi topik yang sangat menarik. Pertama karena pendidikan telah direduksikan sebagai pembentukan intelektual semata-mata. Seperti kita tetapi meliputi berbagai segi kehidupan manusia termasuk teknologi, seni sastra dan musik, olahraga dan macam-macam lagi manifestasi kebudayaan yang dikenal manusia. Ketahui bahwa kehidupan manusia bukan hanya kehidupan intelektual saja.

Di negara manapun budaya nasional selalu dijadikan dasar pendidikan nasional sejak awal kemerdekaan nasional pendidikan nasional. Sejak didirikan atas kebudayaan nasional dinyatakan oleh K.H. Dewantoro bahwa pendidikan nasional harus disesuaikan atas kebudayaan nasional Indonesia. Seperti apakah kebudayaan nasional itu? Macam apa pendidikan yang disesuaikan oleh kebudayaan nasional itu. Hal ini akan kita bahas lebih jauh. Di sini beberapa asumsi yang perlu ditunjukkan adalah sebagai berikut :

a. Pendidikan adalah suatu proses pewarisan budaya (*Culture Heritage*).

Salah satu kodrat manusia yang tidak dimiliki oleh binatang adalah kemampuannya untuk mempertahankan dan melangsungkan hidupnya melalui kebudayaan yang diciptakannya. Para ahli antropologi berpendapat bahwa kemampuan manusia menciptakan kebudayaan bersamaan dengan lahirnya generasi nenek moyang manusia pada sekitar 800.000 tahun yang lalu.

Tumbuh dan berkembangnya kebudayaan manusia, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya secara berkesinambungan. Kebudayaan bangsa yang kita miliki sekarang juga tidak terlepas dari proses pewarisan budaya yang terus menerus berlangsung sejak dulu. Dalam proses pewarisan budaya ini setiap individu mengalami pembentukan sikap melalui proses pembelajaran, sehingga segala tingkah laku ataupun perbuatannya dapat ia sesuaikan dengan budaya yang dianut oleh kelompoknya atau masyarakatnya.

b. Pendidikan akan membuat manusia menjadi manusia budaya

Ahli antropologi seperti Geertz menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang terkungkung dalam jaringan arti yang diciptakannya sendiri. Maknanya bahwa manusia tidak dapat menjadi dewasa apabila dia tercabut dari masyarakatnya yang mempunyai kebudayaannya sendiri. Namun demikian, manusia bukanlah semata-mata hasil kungkungan nilai-nilai kebudayaannya. Kreativitas, inovasi, enkulturisasi dan akulturisasi di dalam transmisi kebudayaan menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang aktif, kemampuan tersebut merupakan hasil dari proses pendidikan. Hal ini berarti bahwa apabila proses pendidikan tidak melahirkan manusia-manusia yang kreatif dan kritis maka jaringan arti yang ditunuhnya semakin lama semakin kaku dan kadaluarsa serta akhirnya mati. Kebudayaan yang hidup dengan demikian berarti mempunyai praksis pendidikan yang kreatif. Dengan kata lain, kebudayaan tidak terlepas dari proses pendidikan, sebagaimana proses pendidikan itu sendiri tidak terlepas dari jaringan kebudayaan.

c. Dengan budaya manusia dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya.

Pada dasarnya kebudayaan dalam masyarakat merupakan perwujudan atau abstraksi dari perilaku manusia, sedangkan perilaku manusia dibentuk melalui kepribadian. Hal ini berarti, kepribadian merupakan latar belakang dari perilaku yang ada dalam diri seseorang atau individu.

Walaupun kepribadian setiap individu dalam suatu masyarakat akan berbeda dengan kepribadian individu lainnya, tetapi setiap masyarakat mempunyai pola perilaku yang berlaku umum. Apabila diperhatikan kebiasaan-kebiasaan masyarakat di dunia ini akan dijumpai perilaku-perilaku yang disatu masyarakat dianjurkan tetapi dimasyarakat lain dilarang. Terdapat banyak contoh hidup yang membuktikan betapa besarnya pengaruh kebudayaan terhadap perilaku seseorang serta kepribadian yang terdapat dibaliknya. Dengan pemahaman kita tentang budaya yang beragam, maka masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan manusia utamanya yang berkaitan dengan pola hidup, nilai dan moral setidaknya dapat diatasi.

Tilaar mengemukakan keterkaitan yang sangat erat antar pendidikan dan kebudayaan. Bahkan kaitan keduanya adalah kaitan *ontologis* dan *epistemologis*. Dalam rangka lahirnya etno-nasionalisme, keterkaitan antara pendidikan dan kebudayaan akan semakin menonjol. Didalam praksis pendidikan untuk pengembangan sikap toleransi dalam masyarakat demokratis terdapat berbagai model pendidikan untuk kesadaran dan pengembangan kohesi sosial, yaitu pendidikan *multi-kultural*, pendidikan *trans-kultural*, dan pendidikan *inter-kultural*.

Pendidikan *inter-kultural* ditekankan kepada eksistensi budaya-budaya atau sub-budaya yang ada. Dalam rangka pengembangan kohesi sosial maka yang diperlukan ialah kegiatan interaksi budaya. Bentuk yang lain ialah *trans-kultural* yang mencari bentuk-bentuk *universalitas* dari budaya-budaya yang ada. Model *trans-kultural* ini barangkali yang telah kita gunakan didalam praksis pendidikan selama orde baru.

Bagi masyarakat Indonesia dalam rangka otonomi daerah, model yang tepat ialah pendidikan *multi-kultural*. Artinya masing-masing budaya etnis yang ada didalam masyarakat mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkembang. Didalam pengembangan tersebut tidak ada campur tangan pemerintah, tetapi sepenuhnya menjadi urusan masyarakat pemiliknya. Pemerintah hanya menjaga supaya tidak menjadi benturan budaya yang merugikan.

Pemerintah mempunyai tugas menjaga terjadinya perkembangan budaya yang alamiyah dan kemungkinan terjadinya akulturasi atau pengembangan budaya seperti yang dikemukakan oleh Levi-Strauss. Didalam

model trans-kultural ada kemungkinan pemerintah mempunyai keinginan untuk memaksakan adanya unsur-unsur yang universal yang harus dilaksanakan oleh semua budaya etnis. Didalam model *inter-kultural* yang dipentingkan bukannya perkembangan sub budaya itu sendiri, tetapi bagaimana menjadi interaksi antar sub-budaya sehingga tidak terjadi ketegangan-ketegangan.

4. Konsepsi Budaya Nasional

1. Budaya adalah karya dan hasil cipta manusia dalam mengubah alam ini.
2. Pendidikan hanya dapat berbeda bila dilihat dari sudut yang berbeda. Dari sudut pendidikan budaya adalah :
 - 1) Segala sesuatu yang terjadi sebagai hasil belajar.
 - 2) Segala sesuatu yang menjadi berencana kebiasaan atau tradisi yang tepat dalam masyarakat.
 - 3) Segala sesuatu yang hendak disesuaikan adalah dari generasi yang lebih tua kepada generasi yang lebih muda.
3. Budaya menurut Sorokin dibedakan atas 3 level :
 - 1) Idiologi level, yaitu sistem nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat.
 - 2) Behavioral level, yaitu sistem realisasi nilai-nilai dalam bentuk akhir.
 - 3) Material level, yaitu materi atau media untuk mewujudkan nilai-nilai itu.
4. Menurut A. Tofbec terdapat dua macam budaya yang menghambat kemajuan manusia yaitu :
 - 1) Budaya membeku
 - 2) Budaya semuDengan budaya membeku tak dapat digunakan manusia untuk mengatasi budaya yang dihadapinya. Sedangkan budaya semu dapat digunakan untuk mengatasi masalah namun agak terbatas.
5. Dikemukakan oleh Ruth Benadielt terdapat tiga aliran budaya yaitu :
 - 1) Relativisme, mengajak suatu masyarakat punya budaya berbeda dengan masyarakat lain. Antara budaya suatu masyarakat dengan budaya masyarakat lain dengan budaya lain tidak ada titik pertemuannya.
 - 2) Universalisme, memandang semua budaya pada dasarnya sama dengan begitu terdapat titik pertemuan di antara semua budaya.
 - 3) Konfigurasinisme yang menyatakan sentralisasi antara relativisme dan universalisme dengan anggapan terdapat titik perbedaan dan titik pertemuan diantara semua budaya itu, jadi pertemukanlah

apa yang dapat dipertemukan, dan jangan pertemukan apa yang tidak mungkin dipertemukan. Adapun yang tidak mungkin dapat dipertemukan di antara budaya yaitu adalah apa yang bersifat individu dari suatu budaya (budaya inti).

6. Apa yang disebut budaya nasional terdapat dua aliran/anggapan yang berbeda yaitu

1) Teori elemen.

Teori elemen ini budaya nasional itu adalah kumpulan/himpunan dari unsur budaya daerah lokal.

2) Teori gestalt

Menurut teori ini budaya nasional itu adalah sesuatu yang merupakan wujud keseluruhan dari budaya lokal/daerah itu.

Kedua teori tersebut sesungguhnya memiliki kelemahan tersendiri yaitu :

a) Teori elemen, semua unsur budaya lokal meskipun turut menjalin ikatan massal ke dalam budaya nasional.

b) Teori gestalt, menjadi baru dari sesuatu keseluruhan dapat menghasilkan sesuatu yang asing atau sesuatu yang turut memiliki jiwa/semangat nasional.

Barangkali teori yang lebih sesuai untuk apa yang disebut budaya nasional itu adalah teori dinamisme elemen yaitu budaya nasional adalah keseluruhan dari unsur budaya daerah yang dinamis.

Contoh: Istilah atau hal dari bahasa daerah yang dinamis (populer, tepat, efisien, dan sebagainya), akan diasimiliasi menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.

7. Budaya nasional sebagai dasar pendidikan itu harus mencerminkan semua komponen sistem pendidikan termasuk pada proses dan hasil pendidikan.

8. Budaya adalah karya dan hasil cipta manusia dalam mengubah alam ini.

9. Pendidikan hanya dapat berbeda bila dilihat dari sudut yang berbeda. Dari sudut pendidikan budaya adalah :

1) Segala sesuatu yang terjadi sebagai hasil belajar.

2) Segala sesuatu yang menjadi kebiasaan atau tradisi yang tepat dalam masyarakat.

3) Segala sesuatu yang hendak disesuaikan adalah dari generasi yang lebih tua kepada generasi yang lebih muda.

10. Budaya menurut Sorokin dibedakan atas 3 level. :

1) Idiologi level, yaitu sistem nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat.

- 2) Behavioral level, yaitu sistem realisasi nilai-nilai dalam bentuk akhir.
 - 3) Material level, yaitu materi atau media untuk mewujudkan nilai-nilai itu.
11. Menurut A. Tofbec terdapat dua macam budaya yang menghambat kemajuan manusia yaitu:
- 1) Budaya membeku
 - 2) Budaya semu
Dengan budaya membeku tak dapat digunakan manusia untuk mengatasi budaya yang dihadapinya. Sedangkan budaya semu dapat digunakan untuk mengatasi masalah namun agak terbatas.
12. Dikemukakan oleh Ruth Benadielt terdapat tiga aliran budaya yaitu :
- 1) Relativisme, mengajak suatu masyarakat punya budaya berbeda dengan masyarakat lain. Antara budaya suatu masyarakat dengan budaya masyarakat lain dengan budaya lain tidak ada titik pertemuannya.
 - 2) Universalisme, memandang semua budaya pada dasarnya sama dengan begitu terdapat titik pertemuan di antara semua budaya.
 - 3) Konfigurasinisme yang menyatakan sentralisasi antara relativisme dan universalisme dengan anggapan terdapat titik perbedaan dan titik pertemuan di antara semua budaya itu, jadi pertemukanlah apa yang dapat dipertemukan, dan jangan pertemukan apa yang tidak mungkin dipertemukan. Adapun yang tidak mungkin dapat dipertemukan di antara budaya yaitu adalah apa yang bersifat individu dari suatu budaya (budaya inti).
13. Apa yang disebut budaya nasional terdapat dua aliran/anggapan yang berbeda yaitu :
- 1) Teori elemen.
Teori elemen ini budaya nasional itu adalah kumpulan/himpunan dari unsur budaya daerah lokal.
 - 2) Teori gestalt
Menurut teori ini budaya nasional itu adalah sesuatu yang merupakan wujud keseluruhan dari budaya lokal/daerah itu. Kedua teori tersebut sesungguhnya memiliki kelemahan tersendiri yaitu:
Teori elemen, semua unsur budaya lokal meskipun turut menjalin ikatan massal ke dalam budaya nasional.
 - 3) Teori gestalt, menjadi baru dari sesuatu keselamatan dapat menghasilkan sesuatu yang asing atau sesuatu yang turut memiliki jiwa/semangat nasional.

Barangkali teori yang lebih sesuai untuk apa yang disebut budaya nasional itu adalah teori dinamisme elemen yaitu budaya nasional adalah keseluruhan dari unsur budaya daerah yang dinamis.

Contoh: Istilah atau hal dari bahasa daerah yang dinamis (populer, tepat, efisien, dan sebagainya), akan diasimilasi menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.

14. Budaya Nasional sebagai dasar pendidikan itu harus mencerminkan semua komponen sistem pendidikan termasuk pada proses dan hasil pendidikan.

5. Fungsi dan Nilai-Nilai Budaya Nasional sebagai Dasar Pendidikan

Fungsi budaya dalam pendidikan diantaranya :

- 1) Pengembangan: pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi berperilaku baik, ini bagi peserta didik yang telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan budaya dan karakter bangsa;
- 2) Perbaikan: memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermartabat; dan
- 3) Penyaring: untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat.

Nilai-nilai budaya nasional yang patut diimplementasikan kedalam proses pendidikan di Indonesia, yakni :

- 1) Religius
Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
- 2) Jujur
Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
- 3) Toleransi
Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
- 4) Disiplin
Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.

- 5) Kerja Keras
Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
- 6) Kreatif
Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
- 7) Mandiri
Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
- 8) Demokratis
Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
- 9) Rasa Ingin Tahu
Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.
- 10) Semangat Kebangsaan
Cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

Substansi pendidikan nasional begitu luas, beberapa hal substansial yang perlu dipertimbangkan dalam pendidikan yang kesemuanya haruslah berdiri di atas tendensi budaya nasional adalah:

- 1) Tujuan akhir yang telah dicapai dalam pendidikan nasional.
- 2) Isi pendidikan nasional hendaknya disesuaikan dengan peserta didik.
- 3) Proses interaksi dalam pelaksanaan pendidikan.
- 4) Eksistensi pendidikan dan peserta didik.

6. Implementasi Budaya Nasional sebagai Dasar Pendidikan

1. Manusia ideal yang dicita-citakan masyarakat adalah gambaran manusia budaya seperti dalam budaya nasional dan perbaikan dalam tujuan akhir pendidikan nasional.
2. Tujuan akhir pendidikan seperti yang dikemukakan itu harus pula tercermin dari manusia dinamis.
3. Isi pendidikan dapat memberikan semua pengetahuan teknologi dan nilai yang tidak bertentangan dengan budaya inti bangsa Indonesia.
4. Budaya inti harus dapat menyelisir seluruh isi pendidikan.

5. Proses pendidikan harus mencerminkan perilaku manusia budaya Indonesia sehingga sikap dan arti adalah teaching itu mencerminkan hidup budaya nasional Indonesia.

7. Implikasi Masalah dan Solusi

Beberapa implikasi yang dapat timbul antara lain :

1. Menjadikan budaya lokal sumber yang dinamis/positif sebagai aset/isi pendidikan nasional.
2. Mengenai budaya luar yang ditemui dan dapat mempengaruhi pendidikan nasional.
3. Mencegah pengaruh budaya lokal tertentu yang memerlukan budaya nasional.

Beberapa solusi yang perlu dipertimbangkan antara lain :

1. Bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa kebersamaan dan bahasa pengantar dalam sistem persekolahan.
2. Budaya daerah/lokal seperti bahasa daerah, kesenian daerah, adat istiadat dan sebagainya adalah bagian dari isi pendidikan nasional dalam bentuk muatan lokal.
3. Adapun pendidikan yang datang dari luar (budaya asing) harus melalui proses seleksi dan adaptasi.

D. Latihan

1. Apa yang dimaksud dengan pendidikan sebagai *cultural heritage*?
2. Jelaskan perbedaan konsep budaya secara umum dan konsep budaya dari sudut pendidikan!
3. Jelaskan beberapa nilai-nilai budaya yang ada dalam pendidikan nasional!
4. Jelaskan keterkaitan antara budaya nasional dan pendidikan!
5. Bagaimana implementasi budaya nasional kedalam pendidikan nasional?
6. Jelaskan pengaruh budaya asing terhadap pendidikan nasional!

BAB IV

WAJIB BELAJAR DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari uraian materi pada bab ini, maka mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan asumsi dan tendensi wajib belajar di Indonesia.
2. Menjelaskan dasar undang-undang tentang wajib belajar.
3. Menyebutkan tujuan diadakannya program wajib belajar.
4. Mendeskripsikan hambatan wajib belajar.

B. Pendahuluan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan agar setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Dengan demikian tidak ada diskriminasi perlakuan termasuk anak penyandang keturunan (tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan tunalaras), anak kesulitan belajar, seperti kesulitan belajar, kesulitan membaca, menulis, dan menghitung. Surat keputusan Mendikbud Nomor 002/U/1986 pasal 1 ayat 1 dan Nomor 002/O/1987 mendukung pendidikan terpadu bagi anak kesulitan belajar dan menyandang ketunaan di sekolah umum dengan pelayanan terpadu. Pusat penelitian kebijaksanaan (Puslijak) Balitbang Depdiknas melakukan perintisan pendidikan terpadu di sekolah dasar. Model yang dilaksanakan tidak sepenuhnya memberikan seluruh komponen yang diperlukan, tetapi hanya pelatihan saja karena dana pendukung terbatas.

Sementara dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 menyatakan bahwa negara bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, maka setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran (pasal 31 ayat 1 UUD 1989) secara operasional, dukungan tersebut dinyatakan dalam UU Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab III ayat 5, bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kebijakan tersebut didasarkan atas pertimbangan manusia hakikatnya adalah makhluk berbhineka yang mengemban misi utama sebagai khalifah Tuhan di muka bumi untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan serta menciptakan kedamaian bersama. Terdeteksi maupun tidak setiap manusia memiliki

potensi yang berbeda-beda dan dapat dikembangkan secara optimal jika tercipta sebuah lingkungan yang kondusif.

C. Uraian Materi

1. Asumsi Dan Tendensi Wajib Belajar

Beerbicara mengenai konsep pelaksanaan wajib belajar di Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1948 pasal menyatakan tentang hak warga negara untuk mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya tamat Pendidikan Dasar. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar menyatakan bahwa pendidikan dasar merupakan pendidikan 9 tahun, terdiri atas program pendidikan 6 tahun di SD dan program pendidikan 3 tahun di SLTP, yang sekarang ini sedang direalisasikan oleh pemerintah.

Di negara manapun wajib belajar (*compulsary education*) merupakan salah satu komponen sistem pendidikan nasionalnya. Wajib belajar dalam sistem pendidikan nasional dianggap penting dan mendasar karena wajib belajar itu dipandang sebagai wadah pendidikan yang paling demokratis. Pada pendidikan tingkat wajib belajar itulah terjadi pemerataan pendidikan yang benar-benar merata dimana semua warga negara berkesempatan menikmati pendidikan itu, tingkat dan lama wajib belajar itu tidaklah sama pada semua negara. Dalam sistem pendidikan nasional kita dewasa ini wajib belajar berlangsung 9 tahun. Namun kecenderungan dan realitasnya konsep wajib belajar itu belum dapat terlaksana seperti yang diharapkan. Kondisi yang dialami negara kita dewasa ini menentukan dan mewarnai pelaksanaan wajib belajar itu.

Untuk membahas wajib belajar itu perlu dipertimbangkan beberapa asumsi berikut ini:

1. Pendidikan adalah hak setiap warga negara Indonesia.
2. Oleh karena pendidikan adalah hak setiap warga negara maka kewajiban pemerintah dalam memberikan hak pendidikan rakyat itu dari konsep dan pelaksanaan.
3. Wajib belajar harus sesuai dengan kondisi hidup berbangsa dan bernegara.

Gerakan wajib belajar memperjuangkan agar setiap orang menikmati kesempatan belajar. Salah satu bentuk dari kegiatan belajar itu dengan mewajibkan belajar setiap orang terutama anak-anak usia sekolah. Dalam hal ini ada suatu kegiatan, mewajibkan belajar walaupun tidak harus ke sekolah.

Untuk memahami apa itu wajib belajar ada beberapa konsepsi yang harus kita ketahui, yaitu :

1. Wajib belajar adalah pendidikan yang harus diikuti oleh setiap warga negara yang telah dan sampai berumur tertentu itu wajib hukumnya untuk melanjutkan pendidikan. Bahkan anak-anak yang tidak melanjutkan wajib belajar itu sanksi hukumnya dapat dikenakan kepada orang tuanya.
2. Wajib belajar tersebut harus merupakan pendidikan minimal bagi masyarakat untuk dapat hidup sebagai warga negara.
3. Wajib belajar harus dibedakan dengan wajib bersekolah. Dengan wajib belajar tidak mutlak harus bersekolah tetapi wajib belajar itu dapat dilaksanakan diluar sekolah. Disini yang penting adalah belajarnya bukan bersekolahnya.
4. Terdapat dua pola level pendidikan wajib belajar yaitu wajib belajar pada tingkat SD dan wajib belajar pada tingkat sekolah menengah.pada negara berkembang umumnya wajib belajar itu benar-benar pada tingkat SD sementara di negara maju wajib belajar itu benar-benar pada tingkat sekolah menengah.
5. Secara konseptual wajib belajar di Indonesia sudah melebihi tingkat SD, tetapi belum sepenuhnya benar pada tingkat sekolah menengah dari sudut jenjang persekolahan wajib belajar di Indonesia pada tingkat SMP.
6. Meskipun wajib belajar (9 tahun) di Indonesia pada tingkat SMP namun secara substansial dipandang benar pada tingkat pendidikan dasar. Pengertian pendidikan dasar disini tentunya pembentukan dasar untuk menjadi warga negara Indonesia.
7. Pelaksanaan wajib belajar itu tidaklah selalu mudah karena ditentukan atau dipengaruhi oleh banyak faktor-faktor yang dapat menentukan dan mempengaruhi untuk itu perlu diidentifikasi agar wajib belajar itu dapat terlaksana seperti yang diharapkan.

2. Dasar Undang-Undang Wajib Belajar

Undang-undang sistem pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 pasal 34 ayat 32 menyebutkan tentang pendidikan dasar gratis 9 tahun bagi anak-anak di negeri ini dan pemerintah wajib menyediakan segala sarana dan prasarannya. Kewajiban belajar ini didasari oleh rendahnya sumber daya manusia Indonesia dan tantangan bangsa yang semakin kompetitif. Kondisi SDM bangsa ini memang memprihatinkan, di tingkat Asia Tenggara saja, kita masih berada dibawah Vietnam, Malaysia, Thailand, apalagi Singapura.

Guna mempercepat peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, Pemerintah merencanakan segera memulai gerakan wajib belajar 12 tahun secara bertahap. Langkah ini mau tidak mau harus dilakukan

secepatnya untuk mengejar mutu SDM Indonesia yang terpuruk hingga mendapat predikat terendah di Asia.

Pada prinsipnya, dengan adanya otonomi daerah pemerintah tak lagi memungkinkan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun dilakukan secara serentak dan seragam. Kalau dilakukan seragam, sama saja dengan saat masih sistem sentralistik. Yang dibutuhkan adalah adanya sebuah standar nasional. Intinya semua lulusan SLTA harus memiliki standar kompetensi tertentu (yang akan ditentukan kemudian). Cara mencapainya diserahkan kepada masing-masing sekolah. Pendidikan 12 tahun belum dilaksanakan disemua provinsi di Indonesia.

Wajib belajar memerlukan beberapa substansi utama adalah:

1. Tenaga pendidik seperti guru, tutor dan sebagainya yang akan melayani pelaksanaan wajib belajar itu.
2. Lamanya masa belajar dalam sistem wajib belajar yang akan terlaksanakan.
3. Peserta wajib belajar mengenal kondisi-kondisi tertentu.
4. Program wajib belajar melalui sekolah dan non sekolah.
5. Tahap-tahap pelaksanaan wajib belajar.
6. Sistem evaluasi belajar untuk wajib belajar.

3. Tujuan Diadakannya Program Wajib Belajar

Sebenarnya tujuan diadakannya program wajib belajar nasional diharapkan agar jumlah anak putus sekolah bisa diminimalisir dan juga sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia serta penuntasan wajib belajar yang tidak hanya merupakan upaya agar anak masuk sekolah, akan tetapi sekolah dengan sistem pembelajaran yang berkuallitas.

Setiap manusia yang hidup pasti membutuhkan pendidikan baik pendidikan formal ataupun informal. Pendidikan formal adalah proses belajar dan mencetak keahlian melalui lembaga formal dan dilakukan secara profesional. Sedangkan pendidikan informal, proses belajar tidak melulu harus melalui lembaga, melainkan dilakukan secara mandiri pun juga bisa.

Pendidikan tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan atau data saja. Pendidikan juga berfungsi untuk membangun karakter, moralitas, kemampuan, dan keahlian tertentu pada seseorang. Tanpa pendidikan, manusia tidak akan belajar, mengevaluasi proses hidupnya, dan memiliki kemampuan untuk bisa memenuhi hidup dan membangun sosialnya.

4. Hambatan Program Wajib Belajar

Penuntasan wajar 9 tahun 2009 terancam tak tercapai karena banyak kendala yang kurang diantisipasi oleh pemerintah, misalnya kondisi geografis wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat sulit terjangkau oleh layanan pendidikan. Disamping itu, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, seperti gedung sekolah dan ruang kelas baru tidak dapat menampung seluruh siswa usia 7 sampai 15 tahun sehingga masih banyak peserta didik yang belum merasakan manfaat program ini.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS), meskipun lebih maju, masih belum bisa menjamin terlaksananya pendidikan dasar secara gratis seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sisdiknas diatas, terlebih lagi para siswa yang berasal dari keluarga miskin. Tidak antisipatif dan tidak tegasnya pihak pemerintah dalam menerapkan program wajar pendidikan dasar secara gratis inilah yang justru mengancam tidak tercapainya target yang telah dicanamkan sebelumnya ajukan bangsa ini melalui pendidikan.

Penyebab terkendalanya wajar 9 Tahun ini, faktor yang paling banyak terjadi adalah akibat kendala ekonomis. Pendapatan rendah didalam keluarga di pedalaman juga membentuk budaya yang tidak baik, sehingga sebagian mereka masih menganggap sekolah itu tidak penting. Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar anak dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor tersebutlah yang mempengaruhi hasil belajar anak. Berikut akan diuraikan tentang kedua faktor penghambat belajar.

2) Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu dan dapat mempengaruhi hasil belajar individu. Faktor internal meliputi faktor fisiologis dan biologis serta faktor psikologis.

3) Faktor fisiologis dan biologis

Masa peka merupakan masa mulai berfungsinya faktor fisiologis pada tubuh manusia. Faktor fisiologis adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Faktor ini dibedakan menjadi 2, yaitu:

- Keadaan tonus jasmani

Keadaan tonus jasmani sangat mempengaruhi aktivitas belajar anak. Kondisi fisik yang sehat dan bugar akan memberikan pengaruh positif terhadap proses belajar. Sedangkan kondisi fisik yang lemah atau sakit akan menghambat tercapainya hasil belajar yang maksimal.

- Keadaan fungsi jasmani atau fisiologis
Selama proses belajar berlangsung, peran fungsi fisiologis pada anak sangat mempengaruhi hasil belajar, terutama panca indera. Panca indera yang berfungsi dengan baik akan mempermudah aktivitas belajar.

Anak yang memiliki kecacatan fisik (panca indera atau fisik) tidak akan dapat mencapai hasil belajar yang maksimal. Meskipun juga ada anak yang memiliki kecacatan fisik namun nilai akademiknya memuaskan. Kecacatan yang diderita anak akan mempengaruhi psikologisnya, diantaranya :

- Sulit bergaul karena memiliki perasaan malu dan minder akan kekurangannya.
- Ada perasaan takut diejek teman,
- Merasa tidak sempurna dibandingkan dengan teman-teman lain.

Perasaan yang menghantui anak dapat membuat prestasinya menurun. Namun ada juga anak yang menjadikan kekurangannya sebagai motivasi untuk maju. Cacat fisik membuat anak tidak dapat melakukan aktivitas belajar di sekolah dengan baik, sehingga perlu disediakan sekolah yang bisa menampungnya sesuai dengan cacat yang disandang. Misalnya bagi penyandang tuna netra bersekolah di SLBA, tuna rungu bersekolah di SLBB, dan sebagainya :

a. Faktor psikologis

Faktor psikologis adalah faktor yang berasal dari keadaan psikologis anak yang dapat mempengaruhi proses belajar. Beberapa faktor psikologis utama yang mempengaruhi proses belajar anak adalah kecerdasan siswa, motivasi, minat, sikap dan bakat.

1) Kecerdasan/ intelegensi siswa

Pada umumnya kecerdasan diartikan sebagai kemampuan psiko-fisik dalam mereaksikan rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui cara yang tepat. Dengan demikian, kecerdasan bukan hanya berkaitan dengan kualitas otak saja, tetapi juga organ tubuh lainnya. Namun bila dikaitkan dengan kecerdasan, tentunya otak merupakan organ yang penting dibandingkan dengan organ lain, karena fungsi otak itu sebagai organ pengendali tertinggi dari seluruh aktivitas manusia.

Kecerdasan merupakan faktor psikologis yang paling penting dalam proses belajar anak, karena menentukan kualitas belajar siswa. Semakin tinggi intelegensi seorang individu, semakin besar peluang individu untuk meraih sukses dalam belajar. Oleh karena itu, perlu bimbingan belajar dari orang lain seperti orang tua, guru, dan sebagainya. Sebagai faktor psikologis yang penting dalam mencapai kesuksesan belajar, maka pengetahuan dan pemahaman tentang kecerdasan perlu dimiliki oleh setiap calon guru profesional, sehingga mereka dapat memahami tingkat kecerdasannya.

Para ahli membagi tingkatan IQ menjadi bermacam-macam, salah satunya adalah penggolongan tingkat IQ berdasarkan tes Stanford-Biner yang telah direvisi oleh Terman dan Merill sebagai berikut (Fudyartanto 2002):

Tingkat Kecerdasan (IQ)	Klasifikasi
140-169	amat superior
120-139	Superior
110-119	rata-rata tingi
90-109	rata-rata
80-89	rata-rata rendah
70-79	batas lemah mental
20-69	lemah mental

Pemahaman tentang tingkat kecerdasan individu dapat diperoleh orang tua dan guru atau pihak-pihak yang berkepentingan melalui konsultasi dengan psikolog atau psikiater. Sehingga dapat diketahui anak didik berada pada tingkat kecerdasan yang mana. Informasi tentang taraf kecerdasan seseorang merupakan hal yang sangat berharga untuk memprediksi kemampuan belajar seseorang. Pemahaman terhadap tingkat kecerdasan peserta didik akan membantu mengarahkan dan merencanakan bantuan yang akan diberikan kepada siswa.

2) **Motivasi**

Motivasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keefektifan kegiatan belajar siswa. Motivasi yang mendorong siswa ingin melakukan

kegiatan belajar. Para ahli psikologi mendefinisikan motivasi sebagai proses didalam diri individu yang aktif, mendorong, memberikan arah, dan menjaga perilaku setiap saat (Slavin, 1994). Motivasi diartikan sebagai pengaruh kebutuhan-kebutuhan dan keinginan terhadap intensitas dan perilaku seseorang.

Keseluruhan daya penggerak psikis dalam diri anak yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan belajar dan memberi arah pada kegiatan belajar itu demi mencapai motivasi belajar. Dari sumbernya motivasi dibedakan menjadi: motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah semua faktor yang berasal dari dalam individu dan memberikan dorongan untuk melakukan sesuatu. Dalam proses belajar, motivasi intrinsik relatif lebih lama dan tidak tergantung pada motivasi dari luar (ekstrinsik).

Menurut Arden N. frandsen (Hayinah, 1992), yang termasuk dalam motivasi intrinsik untuk belajar antara lain :

1. Dorongan ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia yang lebih luas
2. Adanya sifat positif dan kreatif yang ada pada manusia dan kegiatan untuk maju.
3. Adanya keinginan untuk mancapai prestasi sehingga mendapat dukungan dari orang-orang penting. Misalnya: orang tua, saudara, guru, teman, dan sebagainya.
4. Adanya kebutuhan untuk menguasai ilmu atau pengetahuan yang berguna bagi diri sendiri dan orang lain.

Motivasi ekstrinsik adalah anak memulai dan meneruskan kegiatan belajar berdasarkan kebutuhan dan dorongan yang tidak secara mutlak berkaitan dengan kegiatan belajar itu sendiri. Yang tergolong bentuk motivasi belajar ekstrinsik antara lain :

1. Belajar demi memenuhi kewajiban.
2. Menghindari hukuman.
3. Memperoleh hadiah material yang telah dijanjikan oleh orang tua.
4. Meningkatkan gengsi dari orang lain.
5. Memperoleh pujian dari orang lain.
6. Tuntutan jabatan yang diinginkan.

Bentuk motivasi belajar intrinsik dapat ditingkatkan menjadi motivasi berprestasi, yaitu daya penggerak dalam diri siswa untuk mencapai taraf prestasi belajar yang setinggi mungkin, demi penghargaan kepada diri sendiri. Jadi hasrat berprestasi tinggi bukan menurut ukuran dan pandangan sendiri.

3) **Minat**

Secara sederhana minat merupakan kecenderungan kegairahan yang tinggi atau besar terhadap sesuatu. Menurut Reber (Syah, 2003) minat bukanlah istilah yang populer dalam psikologi karena disebabkan ketergantungannya terhadap berbagai faktor internal lainnya, seperti pemusatan perhatian, keinginan, motivasi, dan kebutuhan.

Namun lepas dari kepopulerannya, minat sama halnya dengan kecerdasan dan motivasi, karena memberi pengaruh terhadap aktivitas belajar, ia akan tidak bersemangat atau bahkan tidak mau belajar. Oleh karena itu, dalam konteks belajar di kelas, seorang guru atau pendidik perlu membangkitkan minat siswa agar tertarik terhadap materi pelajaran yang akan disampaikan dengan cara membuat menarik materi. Materi bisa dibuat menarik melalui bentuk buku materi, desain pembelajaran, melibatkan seluruh domain belajar siswa (kognitif, afektif, psikomotorik) sehingga siswa menjadi aktif, dan guru juga harus memperhatikan performansi saat mengajar. Pemilihan jurusan atau bidang sekolah sebaiknya diserahkan pada siswa, sesuai dengan minatnya

4) **Sikap**

Dalam proses belajar sikap dapat mempengaruhi keberhasilan proses belajar. Sikap adalah gejala internal yang mendimensi afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara yang relatif tetap terhadap objek, orang, peristiwa dan sebagainya, baik secara positif maupun negatif (Shay,2003).

Sikap siswa dalam belajar dipengaruhi oleh perasaan senang atau tidak senang pada performan guru, pelajaran, atau lingkungan sekitarnya. Dan untuk mengantisipasi munculnya sikap yang negatif dalam belajar, guru sebaiknya berusaha untuk menjadi guru yang profesional dan bertanggungjawab terhadap profesi yang dipilihnya. Dengan profesionalitas seorang guru akan berusaha memberikan yang terbaik bagi siswanya, berusaha mengembang kepribadian sebagai seorang guru yang empatik, sabar, dan tulus kepada muridnya, berusaha untuk menyajikan pelajaran yang diampunya dengan baik dan menarik sehingga membuat siswa dapat mengikuti pelajaran dengan senang dan tidak menjemukan, meyakinkan siswa bahwa bidang studi yang dipelajarinya bermanfaat bagi siswa.

5) **Bakat**

Faktor psikologis lain yang mempengaruhi proses belajar adalah bakat. Secara umum bakat didefinisikan sebagai kemampuan potensial yang

dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang (Syah, 2003). Berkaitan dengan belajar, Slavin (1994) mendefinisikan bakat sebagai kemampuan umum yang dimiliki seorang siswa untuk belajar. Dengan demikian bakat adalah kemampuan seseorang menjadi salah satu komponen yang diperlukan dalam proses belajar seseorang. Apabila bakat seseorang sesuai dengan bidang yang sedang dipelajarinya, maka bakat itu akan mendukung proses belajarnya sehingga kemungkinan besar ia akan berhasil.

Pada dasarnya setiap orang mempunyai bakat atau potensi untuk mencapai prestasi belajar sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Karena itu bakat juga diartikan sebagai kemampuan dasar individu untuk melakukan tugas tertentu tanpa tergantung upaya pendidikan dan latihan. Individu yang telah mempunyai bakat tertentu, akan lebih mudah menyerap informasi yang berhubungan dengan bakat yang dimilikinya. Misalnya siswa yang berbakat dibidang bahasa akan lebih mudah mempelajari bahasa-bahasa yang lain selain bahasanya sendiri.

Selain itu yang menjadi faktor psikologis lainnya adalah disiplin. Disiplin diri adalah kemampuan diri yang kuat untuk mempertahankan diri dari bermacam-macam gangguan dalam belajar. Misal, seorang anak akan tetap belajar walaupun ada acara televisi yang menarik.

b. Faktor Eksternal

Selain faktor internal, faktor eksternal juga dapat mempengaruhi proses belajar anak. Faktor eksternal yang mempengaruhi belajar dapat digolongkan menjadi faktor lingkungan sosial dan non-sosial (Syah, 2003):
Lingkungan sosial :

Lingkungan sosial anak dapat menimbulkan kesulitan dalam belajar. Lingkungan sosial dibagi menjadi tiga, yaitu:

1) Lingkungan sosial sekolah

Pendidikan di sekolah bukan sekedar bertujuan untuk melatih siswa supaya “siap pakai” untuk kerja atau mampu meneruskan ke jenjang pendidikan berikutnya atau mencapai angka rapor, melainkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia sejati. Proses pembentukan manusia sejati sudah mulai sejak anak hidup dalam keluarga, kemudian dilanjutkan di sekolah, di masyarakat, di dunia kerja dan di lingkungan sekitar.

Di sekolah, untuk membentuk manusia sejati ada salah satu harapan dari pendidik yaitu *Self Regulated Learner* (SRL). SRL adalah murid-murid yang memiliki kemampuan belajar tinggi dan disiplin sehingga mereka membuat belajar itu lebih mudah dan menyenangkan. Namun harapan itu

tidak akan terwujud jika lingkungan sekolah seperti guru, administrasi, dan teman-teman sekelas tidak mendukung. Faktor-faktor yang dapat menghambat anak belajar di sekolah adalah :

- Metode mengajar
Dalam mengajar guru memerlukan metode yang cocok. Metode ini dimaksudkan agar materi yang disampaikan oleh guru terasa menarik dan siswa mudah menyerapnya.
- Kurikulum
Kurikulum yang kurang tepat dapat menjadi salah satu faktor yang dapat menimbulkan kesukaran belajar. Kurikulum sangat penting dan selalu ada dalam sebuah instansi pendidikan. Kurikulum pendidikan harus disesuaikan dengan perkembangan psikologi anak.
- Penerapan disiplin
Disiplin dalam sebuah sekolah sangat diperlukan untuk mengontrol kegiatan siswa di sekolah. Namun kedisiplinan yang terlalu ketat akan membuat siswa merasa terkekang dan merasa ruang geraknya dibatasi.
- Hubungan siswa dengan guru maupun teman
Suasana sebuah kelas didukung oleh peran guru dan anggota kelas. Jika suasana kelas tidak mendukung, maka dapat menghambat proses belajar anak. Hubungan siswa dengan guru, siswa dengan teman juga perlu dibangun sedemikian rupa sehingga tercipta suasana yang baik dan nyaman bagi siswa, sehingga mereka betah menjadi bagian dari kelas.
- Tugas rumah yang terlalu banyak
Guru memberikan tugas untuk siswa merupakan hal yang wajar. Tetapi siswa akan merasa jenuh dengan tugas yang terlalu banyak. Bagi sebagian siswa tugas merupakan beban. Hal seperti inilah yang akan menghambat proses belajar anak.

2) Sarana dan prasarana

Keberhasilan belajar anak juga didukung oleh sarana dan prasarana yang ada. Sarana dan prasarana yang memadai juga membantu tercapainya hasil belajar yang maksimal.

3) Lingkungan sosial masyarakat

Kondisi lingkungan masyarakat tempat tinggal siswa juga mempengaruhi proses belajar anak. Lingkungan siswa yang kumuh, banyak pengangguran, dan banyak teman sebaya di lingkungan yang tidak sekolah

dapat menjadi faktor yang menimbulkan kesukaran belajar bagi siswa. Misalnya siswa tidak memiliki teman belajar dan diskusi maka akan merasa kesulitan saat akan meminjam buku atau alat belajar yang lain.

4) Lingkungan keluarga

Keluarga merupakan tempat pertama kali anak belajar. Oleh karena itu, lingkungan keluarga sangat mempengaruhi proses belajar anak. Faktor dari keluarga yang dapat menimbulkan permasalahan belajar anak adalah :

- Pola asuh orang tua
Setiap orang memiliki pola atau cara yang berbeda dalam mendidik anak. Pola asuh yang selalu mengekang anak akan membuat anak sulit dan bahkan tidak dapat mengembangkan kemampuan dan bakat yang dimiliki.
- Hubungan orang tua dan anak
Hubungan yang tidak harmonis antara orang tua dan anak akan membuat anak tidak betah di rumah. Dengan begitu anak tidak akan bisa melaksanakan aktivitas belajarnya dengan baik.
- Keadaan ekonomi keluarga
Meskipun tidak mutlak, perekonomian keluarga dapat menjadi salah satu penghambat anak. Ada kemungkinan anak menjadi minder dan malu bergaul dengan teman karena masalah ekonomi keluarganya. Dengan perasaan minder anak akan mudah tersinggung, kecil hati, dan sebagainya. Akhirnya hal tersebut akan mempengaruhi hasil belajar anak.
- Keharmonisan keluarga
Keluarga yang tidak harmonis akan memberi dampak negatif pada anak dalam belajar. Pertikaian atau cek-cok ayah dan ibu akan membuat anak merasa terbebani sehingga anak menjadi kurang semangat dalam belajar.
- Kondisi rumah
Kondisi rumah yang kurang memadai akan membuat anak kesukaran dalam belajar. Letak rumah juga berpengaruh pada proses belajar anak. Rumah yang terlalu dekat dengan jalan raya kurang efektif untuk belajar anak.

5) Teman sebaya

Teman sebaya dapat mempengaruhi proses belajar anak, baik teman sebaya dalam lingkup sekolah maupun tempat tinggal atau masyarakat. Pada usia anak-anak dan remaja, jiwa yang dimiliki masih labil, emosional, pemarah, dan juga rasa egois sangat besar. Biasanya terjadi kekerasan di sekolah yang dilakukan oleh teman sebaya atau kawan bermain. Hal

tersebut disebabkan oleh perbedaan atau bahkan persaingan yang menimbulkan sikap saling mengejek, mendorong, memukul bahkan kekerasan verbal.

Kekerasan sebagai gangguan emosi pada dasarnya tidak hanya menyerang orang lain, tetapi juga menyerang diri sendiri. Persoalan kekerasan dilihat dari lapangan psikologi pendidikan mencoba mengarahkan pada lingkungan sekolah tempat anak belajar berinteraksi dengan teman sebaya.

Interaksi sosial yang tidak sehat antar teman sebaya di sekolah dipengaruhi faktor lingkungan dari luar yang dibawa ke sekolah oleh peserta didik yang berujung pada tindakan kekerasan. Belajar yang tidak menyenangkan juga membuat anak merasa tertekan dan bertindak nakal. Sebenarnya kekerasan yang terjadi dikalangan siswa dibentuk dari pengalaman-pengalaman lama.

Teman sebaya yang seharusnya bisa untuk memperoleh informasi dan perbandingan tentang dunia sosial, prinsip keadilan melalui konflik yang terjadi dengan teman, bisa untuk belajar tentang konsep gender juga dapat berpengaruh negatif bagi anak. Misalnya kebiasaan-kebiasaan buruk yang dimiliki kawan sebayanya akan mudah mempengaruhi diri anak. Kebiasaan buruk yang mudah ditiru biasanya dari ucapan atau tindakan.

a) Lingkungan non-sosial

Faktor yang termasuk lingkungan non-sosial adalah lingkungan alamiah. Yang dimaksud dengan lingkungan alamiah adalah kondisi yang segar, tidak panas dan tidak dingin, sinar tidak terlalu silau, tidak terlalu gelap, dan tenang.

b) Instrumental

Instrumental dapat digolongkan dua macam :

- Hardware

Yang termasuk perangkat hardware adalah gedung sekolah, alat, fasilitas, sarana prasarana belajar, dan sebagainya.

- Software

Yang termasuk perangkat software dalam pendidikan adalah kurikulum sekolah, peraturan, buku panduan, silabus, dan sebagainya.

5. Cara Mengatasi Hambatan Belajar

Saat timbul hambatan dalam belajar, hambatan tersebut harus segera diatasi. Dengan diatasinya hambatan tersebut maka proses belajar dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai hasil belajar yang maksimal. Cara

mengatasi hambatan belajar dapat dimulai dari diri anak, keluarga, dan sekolah.

- a. Diri anak
 - 1) Menjaga kesehatan jasmani.
 - 2) Menumbuhkan rasa percaya diri.
 - 3) Membangun motivasi diri.
 - 4) Belajar berinteraksi dengan lingkungan.
 - 5) Belajar menjaga emosi.
 - 6) Menerima keadaan (ekonomi, jasmani, dll)

- b. Keluarga
 - 1) Memberi teladan dalam sikap dan tingkah laku kepada anak.
 - 2) Menjaga keharmonisan keluarga.
 - 3) Menyediakan waktu untuk mendampingi anak dalam belajar.
 - 4) Mengusahakan kesehatan anak, misalnya dengan makanan bergizi.
 - 5) Melatih anak dengan mengerjakan pekerjaan rumah (menyapu, mencuci piring, dll).
 - 6) Meminimalkan untuk membandingkan anak dengan anak yang lain.
 - 7) Mencukupi fasilitas dan sarana prasarana belajar.
 - 8) Membangun dan memberi motivasi anak.

- c. Sekolah
 - 1) Guru mengendalikan diri (emosi) saat mengajar.
 - 2) Guru menjaga kedekatan dengan siswa maupun orangtua siswa.
 - 3) Guru bersikap adil pada semua siswa.
 - 4) Guru memberikan motivasi siswa, misalnya dengan pujian, dan sebagainya.
 - 5) Guru memberikan teladan yang baik pada siswa.
 - 6) Guru mengajar dengan menggunakan metode yang menyenangkan.
 - 7) Guru melihat kelemahan masing-masing siswa, misalnya ada siswa yang cacat fisik letak posisi duduk didepan.
 - 8) Guru memberi tugas sesuai dengan kemampuan siswa.
 - 9) Lingkungan yang nyaman untuk belajar siswa.
 - 10) Memberikan kelonggaran tata tertib, namun tetap disiplin.

6. Implementasi Program Wajib Belajar di Indonesia

Pada dasarnya, implementasi wajib belajar di Indonesia, dilihat dari segi historis, umumnya masih belum terealisasi dengan sempurna, hal ini disebabkan karena beberapa faktor, yaitu :

- 1) Dana pendidikan yang relatif masih kecil.
 - 2) Sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai.
 - 3) Rendahnya mutu guru.
 - 4) Belum memadainya jumlah SMP dibandingkan dengan jumlah SD.
 - 5) Sekolah-sekolah dasar dibawah dua kekuasaan pengelolaan, yaitu Depdikbud dan Depdagri. Sebenarnya lulusan agar PP nomor 65 tahun 1951 yang menjadi dasar hukum munculnya dualisme pengelolaan SD dicabut. Akan tetapi ternyata sampai sekarang hal itu belum terjadi, bahkan ketika keluar PP No. 28 Tahun 1990 mengenai pendidikan dasar, Depdagri cepat-cepat mengeluarkan peraturan yang menegaskan kembali keberlakuan PP No. 65 tahun 1951, sebelumnya Menteri Dalam Negeri juga keluar instruksi Mendagri No. 25 Tahun 1989 tentang penyerahan urusan Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dari Pemda Tingkat I kepada Pemda Tingkat II dan pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II di kecamatan, seperti dinyatakan H.A.R Tilaar bahwa “peraturan-peraturan yang simpang siur tersebut tentunya sangat menyulitkan didalam pengelolaan sekolah dasar, termasuk pendidikan dasar dalam rangka melaksanakan wajib belajar 9 tahun”. Pelaksanaan pendidikan dasar dalam rangka melaksanakan wajib belajar, akan menuntut keterpaduan antara sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama. Akan tetapi, berdasarkan peraturan diatas, pengelolaan SLTP tetap berada pada pemerintah pusat, sedangkan pengelolaan SD, berada pada pemerintah daerah. Padahal pengelolaan seperti ini akan membuat kurangnya efektifitas dan efisiensi dalam rangka pendidikan dasar dan pada gilirannya juga akan menyebabkan kurangnya mutu hasil pendidikan. Walaupun berbagai hal muncul dalam wajib belajar, akan tetapi pelaksanaan wajib belajar dalam sistem pendidikan nasional seyogyanya tetap memperhatikan hal-hal dasar sebagai berikut :
1. Wajib belajar hendaknya dilaksanakan namun dalam arti tidak wajib bersekolah, jadi yang diwajibkan adalah belajar bukan bersekolah.
 2. Oleh karena wajib belajar itu boleh tanpa sekolah maupun melalui sekolah, maka program sistem persekolahan harus

berbeda dengan program tanpa bersekolah. Namun secara gradial dan substansial tetap sama.

3. Wajib belajar itu dikenakan pada anak yang berumur antara 7 tahun sampai dengan 17 tahun.

Beberapa implikasi utama pelaksanaan wajib belajar itu adalah:

1. Dana yang harus disediakan bagi pelaksanaan wajib belajar.
2. Tenaga pendidik yang dibutuhkan.
3. Anak dari keluarga miskin yang seakan-akan ikut membantu orang tua mereka mencari nafkah.
4. Anak daerah terpencil yang masyarakatnya terdiri dari beberapa orang yang dalam segala hal kemampuan mereka terbatas.

Beberapa solusi masalah pelaksanaan wajib belajar adalah perlu melalui:

- 1) Tahap pelaksanaan wajib belajar perlu melalui:
 - A. Uji coba
 - b) Diseminasi terbalik
 - c) Diseminasi menyeluruh
- 2) Selama guru memanfaatkan penuh tenaga sukarela minimal tamatan sekolah menengah.
- 3) Pelaksanaan wajib belajar terbagi atas 3 tahap 3 tahun + 3 tahun + 3 tahun sehingga akan terdapat tempat atau daerah yang baru dapat melaksanakan wajib belajar 3 tahun pertama atau 6 tahun pertama. Dan mampu melaksanakan penuh 9 tahun.
- 4) Anak-anak umur wajib belajar yang drop out dari sistem persekolahan dapat meneruskan pada non sistem non sekolah.
- 5) Bagi anak-anak yang memerlukan pelaksanaan wajib belajar, menggunakan sistem informasi dan memanfaatkan teknologi pendidikan khusus.

D. Latihan

1. Jelaskan tendensi wajib belajar dalam sistem pendidikan nasional Indonesia!
2. Kemukakan asumsi yang mendasari wajib belajar dalam sistem pendidikan nasional kita!
3. Jelaskan konsep dasar tentang wajib belajar!
4. Bagaimana perbandingan pelaksanaan wajib belajar antara negara maju dan negara berkembang?
5. Bagaimana implementasi wajib belajar di Indonesia?

6. Kemukakan problema wajib belajar 9 tahun di Indonesia!
7. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi di rubahnya kebijakan wajib belajar 9 tahun menjadi wajib belajar 12 tahun?

BAB V

PENDIDIKAN PRASEKOLAH

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari uraian materi pada bab ini, maka mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan konsep dasar pendidikan prasekolah.
2. Menjelaskan landasan UU tentang pendidikan pra sekolah
3. Mengidentifikasi kurikulum pendidikan prasekolah.

B. Pendahuluan

Pendidikan prasekolah pada tahun 1990-an tidak banyak berbeda dari pendidikan prasekolah pada tahun 1960-an bahkan sebelumnya, yaitu selalu menarik perhatian orang tua, masyarakat maupun pemerintah sebagai pengambil keputusan. Mereka menyadari bahwa kualitas masa awal anak (*early childhood*) termasuk masa prasekolah merupakan cermin kualitas bangsa dimasa yang akan datang. Khususnya para orang tua makin lama makin menyadari betapa pentingnya hubungan orang tua dan anak yang kelak akan mewarnai hubungan anak dengan lingkungannya, teman sebaya, guru maupun atasannya.

Anak yang mendapatkan perlakuan yang tidak tepat, semacam *child abused* dan anak yang hidup dalam kemiskinan merupakan isu yang selalu menjadi bahan perdebatan para pendidik. Untuk hal tersebut selalu akan dicarikan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Sementara itu usaha memberikan stimulasi pada anak usia awal selalu menjadi perhatian para pendidik.

Minat terhadap anak dapat dilihat dari situasi disekitar kehidupan kita. Berbagai masalah yang bertemakan pendidikan anak banyak sudah diterbitkan baik di Barata maupun di Indonesia sendiri. Dibeberapa kota di Indonesia telah dikenal majalah Bobo, Ayah Bunda, Anakku, Amanah, dan Keluarga yang semuanya berorientasi pada pendidikan khususnya anak pada usia awal.

Ceramah-ceramah atau kursus bagaimana mendidik anak dengan sukses sering ditawarkan melalui media massa. Sementara itu para orang tua yang masih muda memang telah memahami arti stimulasi sejak usia

awal perkembangan. Orang tua selalu menginginkan yang terbaik bagi anaknya, antara lain mau menghabiskan waktu, usaha dan uang demi kualitas anaknya.

C. Uraian Materi

1. Konsep Pendidikan Prasekolah

Seringkali apa yang dimaksudkan dengan pendidikan prasekolah sangat simpang siur. Masing-masing orang mempunyai pengertian yang tidak sama sehingga mengaburkan arah pembicaraan. Batasan yang dipergunakan *The National Association for The Education of Young Children (NAEYC)* dan para ahli umumnya sebagai berikut :

- a. Yang dimaksudkan dengan "*Early Childhood*" (anak masa awal) adalah anak yang sejak lahir sampai dengan usia delapan tahun. Hal tersebut merupakan pengertian yang baku dipergunakan oleh NAEYC. Batasan ini seringkali dipergunakan untuk merujuk anak yang belum mencapai usia sekolah dan masyarakat mempergunakannya bagi berbagai tipe prasekolah (*preschool*).
- b. *Early Childhood Setting* (tatanan anak masa awal) menunjukkan pelayanan untuk anak sejak lahir sampai dengan delapan tahun disuatu pusat penyelenggaraan, rumah atau instansi seperti Kindergarten, Sekolah Dasar dan program rekreasi yang menggunakan sebagian waktu atau penuh waktu.
- c. *Early Childhood Education* (pendidikan awal masa anak) terdiri dari pelayanan yang diberikan dalam tatanan awal masa anak.

Sementara pelaksanaan pendidikan prasekolah didasari oleh beberapa asumsi diantaranya:

- a. Pendidikan sudah harus dimulai sejak dalam buaian sampai ke akhir hayat bahwa pendidikan sudah harus dimulai sejak masih dalam kandungan.
- b. Semakin cepat pendidikan dimulai semakin mudah pula pelaksanaan pendidikan selanjutnya artinya bahwa semakin muda usia seseorang memulai pendidikan maka semakin cepat pemahamannya, tetapi semakin dewasa pendidikan dimulai maka semakin susah diajarkan.

Prasekolah (bahasa Inggris: *preschool*) merupakan pilihan pendidikan bagi kanak-kanak sebelum memasuki sekolah. Prasekolah merupakan sebahagian daripada sistem Pendidikan Indonesia. Kementerian Pelajaran Indonesia menyediakan pendidikan prasekolah bagi membolehkan kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun memasuki persekolahan lebih

awal, terutama kanak-kanak daripada golongan berpendapatan rendah. Pendidikan prasekolah adalah satu program yang menyediakan pengalaman pembelajaran kanak-kanak yang berumur 4-6 tahun dalam jangka masa satu tahun atau lebih sebelum masuk ke Tahun Satu di sekolah formal.

Adalah suatu kenyataan bahwa orang tua adalah guru pertama bagi anak-anaknya. Apabila anak telah masuk sekolah, orang tua adalah mitra kerja yang utama bagi guru anaknya. Bahkan sebagai orang tua, mereka mempunyai berbagai peran pilihan yaitu orang tua sebagai pelajar, orang tua sebagai relawan, orang tua sebagai pembuat keputusan, orang tua sebagai anggota tim kerjasama guru-orangtua. Dalam peran tersebut memungkinkan orang tua membantu meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan anak-anak mereka.

Berbagai informasi telah menunjukkan dari sejumlah studi yang telah dimulai 20 tahun yang lalu, keterlibatan orang tua dalam pendidikan prasekolah dapat ditemukan manfaatnya. Studi-studi tersebut berasal dari keterlibatan orang tua dalam program *Head Start* di Amerika Serikat.

Heinz (1979), menjelaskan bahwa ada 3 hal penting apabila orang tua dan pihak sekolah dapat menjalin kerjasama yaitu konsep diri orang tua dan anak-anak akan meningkat, motivasi belajar anak akan meningkat, dan prestasi yang dicapai anak akan meningkat pula.

Pendidikan prasekolah biasa diklasifikasikan antara lain :

- 1) Pendidikan sebelum lahir (pendidikan prenatalis)
- 2) Pendidikan setelah lahir (pendidikan post natalis)

Pendidikan sebelum lahir (pendidikan prenatalis) adalah pendidikan yang bukan dalam arti sesungguhnya tetapi dalam arti umum, jadi tidak perlu berdialog dengan anak yang ada dalam kandungan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana mempengaruhi pribadinya agar anak kelak menjadi anak yang sempurna.

Sebelumnya kita perlu tahu bahwa pendidikan dalam arti umum adalah bimbingan atau pengaruh terhadap perkembangan pribadi secara positif, misalnya mengajarkan anak secara langsung cara duduk yang sopan ketika melihat anak tersebut duduk dengan tidak sopan atau menegur dia secara halus ketika dia berbicara tidak sopan dengan seseorang. Sedangkan pendidikan dalam arti sesungguhnya (secara formal) adalah upaya sadar untuk menumbuhkan atau mengembangkan pribadi anak dalam mencapai tujuan tertentu, misalnya pendidikan di Sekolah Dasar dalam mata pelajaran tertentu.

Bagaimana isi pendidikan prenatalis tersebut yaitu ada tiga hal, sebagai berikut :

- a) Berkaitan dengan kesehatan, seperti rajin memeriksakan kandungan ke puskesmas atau dokter ahli anak, menjaga kondisi

agar tidak sakit, apalagi sampai sakit yang diikuti oleh teperatur tinggi (demam) sebab akan mempengaruhi otak anak dalam kandungan.

- b) Berkaitan dengan keamanan, seperti menjaga kandungan agar tidak terbentur, tidak jatuh, terpeleset, ditabrak, dalam artian berhati-hati jangan sampai kecelakaan, apalagi sampai jatuh tertelungkup sehingga merusak otak bayi dalam kandungan.
- c) Berkaitan dengan nutrisi, mengkonsumsi makanan bergizi yang cukup untuk anak, konsultasi dengan petugas posyandu, yang berkaitan dengan protein sehingga pertumbuhan otak dalam kandungan dapat maksimal.

Tidak jarang kita temui dan kita dengar seorang anak yang lahir tidak dalam keadaan normal seperti tidak ada batok kepalanya, ususnya keluar, anusnya tidak ada, anggota badannya tidak lengkap, dan sebagainya dan umumnya hal seperti ini banyak menimpa kalangan menengah kebawah, bisa saja penyebabnya adalah salah satu faktor diatas.

Hal yang tidak kalah pentingnya yang harus dijaga dan diperhatikan adalah kondisi kejiwaan ibu hamil, seorang suami harus bisa mengerti bagaimana perasaan istri, jangan sampai sering cekcok, apalagi sampai selingkuh pada saat istri hamil. Harus senantiasa menjaga, menciptakan situasi dan kondisi agar istri bahagia, sebab hal ini sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis anak tersebut. Malah ada yang mengatakan bahwa kondisi kejiwaan ibu pada saat hamil akan menjadi kondisi kejiwaan anak kelak jika dia telah lahir, misalnya ibu yang pemarah pada saat hamil maka anak yang dikandungnya akan mempunyai sifat dan pembawaan yang pemarah pula.

Sedangkan pendidikan setelah lahir (post natalis) terdiri:

1) Sekolah Titipan/Tempat Penitipan Anak (*Day Care*)

Day Care adalah sarana pengasuhan anak dalam kelompok, biasanya dilaksanakan pada saat jam kerja. *Day care* merupakan upaya yang terorganisasi untuk mengasuh anak-anak diluar rumah mereka selama beberapa jam dalam satu haru bilamana asuhan orang tua kurang dapat dilaksanakan secara lengkap. Dalam hal ini penegertian *Day Care* hanya sebagai pelengkap terhadap asuhan orang tua dan bukan sebagai pengganti asuhan orang tua (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1990).

Sarana penitipan anak ini biasanya dirancang secara khusus baik program, staf maupun pengadaan alat-alatnya. Tujuan sarana ini untuk membantu dalam hal pengasuhan anak-anak yang

ibunya bekerja. Semula sarana penitipan anak diperuntukkan bagi ibu dari kalangan keluarga yang kurang beruntung, sedangkan sekarang sarana ini lebih banyak diminati oleh keluarga tingkat menengah dan atas yang umumnya disebabkan kedua orang tuanya bekerja.

Di Negara maju, TPA dikenal dengan nama Sekolah Titipan (*Nurse School*) yang juga diperuntukkan anak-anak yang kedua orang tuanya ditarik ke lapangan kerja. Sekolah Titipan ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan petugasnya terdiri dari guru, perawat, dokter anak, psikolog, dan sebagainya. Selain itu Sekolah Titipan Anak ini juga banyak terdapat di mall dan swalayan dengan tujuan pada saat ibunya berbelanja maka anaknya dititip di sekolah tersebut. Biasanya anak yang dititip adalah anak usia antara 0 – 1 tahun.

2) Kelompok Bermain (*Play Group*)

Bermain merupakan salah satu fenomena yang sangat menarik perhatian para pendidik, psikolog, ahli filsafat dan banyak orang lagi sejak beberapa dekade yang lalu. Mereka tertantang untuk lebih memahami arti bermain dikaitkan dengan tingkah laku manusia. Bermain benar-benar merupakan pengertian yang sulit dipahami karena muncul dalam beraneka ragam bentuk. Bermain itu sendiri bukan hanya tampak pada tingkah laku anak tetapi pada usia dewasa bahkan bukan hanya pada manusia (Spodek, 1991).

Pada saat ini *play group* (kelompok bermain) semakin menjamur, para orang tua juga berlomba-lomba memasukkan anaknya ke kelompok bermain, tentu saja dengan berbagai alasan, seperti sekedar hanya untuk melepaskan diri sejenak dari rutinitas dan tanggung jawab dalam hal mengasuh anak, keinginan untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan teman seusianya dan tokoh pengasuh lain, agar anak mendapat stimulasi kognitif secara baik, atau agar anak mendapat pengasuhan pengganti sementara ibu bekerja, bahkan tidak bisa dipungkiri bahwa ada yang hanya sekedar mengikuti trend dunia masa kini, tanpa memahami apa manfaat yang diperoleh. Namun terlepas dari berbagai alasan diatas, dengan memasukkan anak ke kelompok bermain, anak akan memperoleh jauh lebih banyak manfaat utamanya dalam bersosialisasi daripada anak yang terkurung didalam rumah. Kelompok bermain itu sendiri biasanya dilaksanakan sebelum anak memasuki Taman Kanak-Kanak dengan kisaran usia antara 1-4 tahun.

Pada kehidupan sehari-hari kegiatan bermain begitu mudah diamati namun dalam beberapa situasi, bermain sulit dibedakan dengan kegiatan yang bukan bermain. Schwartzman (1978) mengemukakan suatu batasan bermain sebagai berikut : “Bermain bukan bekerja; bermain adalah pura-pura; bermain bukan sesuatu yang sungguh-sungguh; bermain bukan sesuatu yang produktif; dan sebagainya, bekerja pun dapat diartikan bermain; sementara kadang-kadang bermain dapat dialami sebagai bekerja; demikian pula anak yang sedang bermain dapat membentuk dunianya sehingga seringkali dianggap nyata, sungguh-sungguh, produktif, dan menyerupai kehidupan yang sebenarnya.” (SoemiartiP. 102;1995)

3) Taman Kanak-Kanak (*Kindergarten*)

Taman Kanak-Kanak (TK) didirikan sebagai salah satu usaha mengembangkan seluruh segi kepribadian anak didik dalam rangka menjembatani pendidikan dalam keluarga ke pendidikan sekolah. TK merupakan salah satu bentuk pendidikan prasekolah yang ada di jalur pendidikan sekolah.

Taman Kanak-Kanak memberi kemungkinan kepada anak didiknya untuk mengembangkan seluruh aspek perkembangannya; memupuk sifat dan kebiasaan yang baik, menurut falsafah bangsa Indonesia; memupuk kemampuan dasar yang diperlukan untuk belajar pada kelas selanjutnya.

Adapun tujuan TK adalah membentuk manusia Pancasila sejati, yang bertakwa kepada Tuhan YME, yang cakap, sehat dan terampil, serta bertanggung jawab kepada Tuhan, masyarakat dan negara. Sedangkan tujuan khususnya:

1. Memberi kesempatan kepada anak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik maupun psikologinya dan mengembangkan potensi-potensi yang ada padanya secara optimal sebagai individu yang unik.
2. Memberi bimbingan yang seksama agar anak memiliki sifat dan kebiasaan yang baik, sehingga mereka dapat diterima oleh masyarakatnya.
3. Mencapai kematangan mental dan fisik yang dibutuhkan agar dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Sejarah berdirinya TK telah dimulai pada tahun 1900-an, tokoh seperti Froebel adalah yang paling berpengaruh. Tentunya

sejarah TK tidak dapat dipisahkan dari usaha Belanda ketika menjajah Indonesia.

Usaha pendidikan anak-anak prasekolah di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1914 pada saat Pemerintah Hindia Belanda membuka kelas persiapan (*voorklas*) yang fungsinya menyiapkan anak-anak memasuki HJS. Pada tahun 1922 Ki Hajar Dewantara, mendirikan Taman Indria, yaitu sarana pendidikan untuk anak prasekolah. Bersamaan dengan berdirinya Taman Indria, berdiri pula Taman Kanak-Kanak dengan nama Bustanul Atfal yang disponsori oleh organisasi-organisasi Islam. Pada tahun 1941, sekolah-sekolah Froebel dilanjutkan dengan nama Taman Kanak-Kanak.

Ada dua tokoh yang sangat terkenal yang berkaitan dengan Taman Kanak-Kanak yaitu:

1. Friederich Wilhelm Froebel (1782 – 1852) mengatakan bahwa *self activitas* itu terdapat didalam bermain oleh sebab itu bagi Froebel mendidik itu sama dengan bermain, tapi tidak semua bermain adalah mendidik. Bermain yang mendidik adalah yang menggunakan alat-alat permainan, tetapi tidak semua alat permainan adalah alat pendidikan. Yang mana itu? Yaitu alat permainan yang mempunyai arti simbolis (perlambang) contohnya bola adalah simbol dari wanita karena bola tidak mempunyai sudut jadi disimbolkan sebagai wanita yang tidak dapat menagmbil keputusan atau tidak tegas.
2. Maria Montessori (1870 – 1952), mempunyai pandangan bahwa dalam bermain dapat mempergunakan alat permainan apa saja asalkan dapat menimbulkan kreatifitas anak, misalnya kursi menurut Maria bisa dijadikan alat permainan yaitu kuda-kudaan, sementara Froebel tidak bisa hanya sebagai tempat duduk saja.
3. Walaupun keduanya berbeda pandangan akan tetapi mereka mempunyai persamaan, yaitu keduanya mendasarkan pendidikan prasekolah itu atas prinsip *self activitas* (aktifitas diri) anak. Di Indonesia sebelumnya diadopsi sekolah Froebel, tidak ada istilah Taman Kanak-Kanak.

2. Landasan UU tentang Pendidikan prasekolah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 12 Ayat (2) menyebutkan “selain jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) , dapat diselenggarakan pendidikan prasekolah”, adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk mengembangkan pribadi, pengetahuan dan keterampilan, yang melandasi pendidikan dasar serta mengembangkan diri secara utuh sesuai dengan asas pendidikan sedini mungkin dan seumur hidup.

Di dalam PP RI No. 27 Tahun 1990 tentang pendidikan prasekolah, bab 1 pasal 1 ayat (2) menyebutkan “selain jenjang pendidikan sebagaimana yang dimaksud dengan Taman Kanak-Kanak (TK) adalah salah satu bentuk pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia empat tahun sampai memasuki Pendidikan Dasar. Lebih lanjut dijelaskan bahwa satuan pendidikan prasekolah meliputi Taman Kanak-Kanak terdapat di jalur pendidikan sekolah sedangkan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak terdapat di jalur pendidikan luar sekolah.

Pembinaan segi pendidikan anak pada Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain dan Penitipan Anak menjadi tanggung jawab Mendikbud, sedangkan usaha pembinaan kesejahteraan anak bagi Kelompok Bermain dan Penitipan Anak menjadi tanggung jawab menteri sosial.

Selanjutnya didalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0486/U/1992 Bab 1 Pasal 2 Ayat (1) telah dinyatakan bahwa “Pendidikan Taman Kanak-Kanak merupakan wadah untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik sesuai dengan sifat-sifat alami anak.” Tindak lanjut dalam Bab II Pasal 4 dijelaskan bahwa anak didik di TK adalah anak berusia 4-6 tahun.

Selain itu beberapa landasan teoritis pelaksanaan Pendidikan Prasekolah adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan prasekolah termasuk kedalam Pendidikan Dasar. Pendidikan Dasar adalah pendidikan yang bertujuan memberikan pembentukan dasar.
2. Jadi Pendidikan Dasar itu kedalamnya terhisap Taman Kanak-Kanak dan Sekolah dasar. Perlu diketahui bahwa pendidikan dasar itu bukan jenjang, sementara TK dan SD adalah jenjang pendidikan.
3. Dengan demikian pendidikan prasekolah adalah pendidikan yang diberikan kepada anak dibawah umur bersekolah (belum matang bersekolah), secara biologis enam tahun keatas sudah matang untuk bersekolah, berarti usia prasekolah dibawah enam tahun.

Sedangkan menurut *The National Association for The Education* istilah *Preschool* adalah anak antara usia "Toddler" (1-3 tahun) dan usia masuk kelas satu biasanya antara usia tiga sampai lima tahun. Sementara pengertian *toddler* adalah anak yang mulai berjalan sendiri sampai dengan usia tiga tahun. "*Konfergarten*" tujuannya untuk persiapan masuk kelas satu, secara perkembangan biasanya meliputi anak usia 4-6 tahun. Dengan perkataan lain, yang dimaksud dengan anak usia TK adalah 4-6 tahun sedangkan anak prasekolah adalah mereka yang berusia 3-6 tahun.

3. Kurikulum Pendidikan Prasekolah

Konsep yang digunakan ialah "Belajar Sambil Bermain" dengan menekankan "Pembelajaran Bertema". Kaedah pembelajaran ialah meliputi aktivitas kelas, aktivitas kumpulan dan aktivitas individu. Kurikulum Pendidikan prasekolah dirancang dengan teliti bagi memenuhi keperluan dan tahap perkembangan kanak-kanak berdasarkan Falsafah Pendidikan Nasional maupun potensi keberagaman karakteristik daerah masing-masing.

D. Latihan

1. Kemukakan asumsi yang mendasari pelaksanaan pendidikan prasekolah!
2. Jelaskan konsep dasar pendidikan prasekolah!
3. Jelaskan perbedaan antara pendapat F. Froebel dan M. Montessori sebagai tokoh pendidikan taman kanak-kanak tentang pendidikan prasekolah!
4. Bagaimana implementasi kurikulum pendidikan prasekolah di Indonesia?

BAB VI

SEKOLAH DASAR SEKOLAH RENDAH

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari uraian materi pada bab ini, maka mahasiswa diharapkan dapat:

1. Mendeskripsikan perkembangan penyelenggaraan sekolah dasar di Indonesia
2. Memaparkan konsep sekolah dasar.
3. Menjelaskan kurikulum sekolah dasar.
4. Menjelaskan pengelolaan sekolah dasar dan permasalahan pendidikan di sekolah dasar.

B. Pendahuluan

Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menyatakan bahwa mutu tamatan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama tahun 1950-an dan 1960-an, rata-rata lebih baik dari tamatan SD/SMP di beberapa negara tetangga Indonesia. “Artinya, yang dimaksud rata-rata tingkat kemampuan itu adalah dari segi pemahaman dan adaptasi kepada masyarakat. Padahal sekolah kita sekarang ini jauh lebih baik dari masa lalu. Gurunya, gedungnya, fasilitasnya, tidak ada masalah. Tetapi, kenapa secara keseluruhan, nilai pendidikan kita lebih rendah, sehingga banyak diantara kita yang suka berbicara di seminar-seminar, menyatakan bahwa berdasarkan indeks Bank Dunia dan UNDP itu angkanya hanya 120. Jelas, dengan angka itu, pemerintah dinilai salah. Lalu semua tepuk tangan, senang,” kata Kalla.

Namun, tambah Kalla, ketika pemerintah mengambil sikap dengan diantaranya menerapkan Ujian Nasional (UN), orang-orang seperti itu mempertanyakan kembali ke pemerintah. “Lho, kenapa pemerintah begitu. Jadi, kita ini jadi heran, kenapa begitu. Seharusnya, kita melakukan upaya peningkatan sumber daya manusia itu, diantaranya dengan UN itu,” lanjut Kalla.

“Mengapa anak-anak kita tingkat mutunya rata-rata rendah? Itu tentu karena anak-anak Indonesia kurang belajar, kan? Mengapa kurang belajar? Karena sekian tahun ini, mereka merasa tidak perlu belajar sungguh-

sungguh. Mengapa mereka merasa tidak perlu belajar? Karena, belajar ataupun tidak belajar, semuanya akan lulus,” tandas Kalla.

Menurut Kalla, selama ini, banyak sekolah yang meluluskan siswa didiknya. “Sebab, kalau tidak, bupatinya marah, kenapa tidak 100 persen yang lulus. Jika ada upacara di kabupaten, disampaikan-lah, ‘Bapak Bupati dan Muspida yang terhormat, sekolah kita lulus 100 persen dan semuanya tepuk tangan’. Kalau ada yang tidak lulus, itu artinya sekolah itu jelek. Itulah yang membuat siswa-siswa tidak perlu merasa belajar. Karena semuanya akan lulus,” jelas Kalla.

Diawal sambutannya, Kalla mempertanyakan kriteria guru favorit tersebut. “Ada kriteria guru favorit atau idola, yaitu guru yang dapat memberikan pelajaran yang baik dan dapat dimengerti oleh siswa didiknya. Ada guru yang juga mudah bergaul dan membimbing anak dalam menerapkan nilai-nilai pendidikan. Tetapi, ada juga guru favorit karena gampang memberikan nilai tinggi. Bahkan ada guru favorit karena gurunya cantik atau ganteng.

Sementara, ada juga guru yang keras dan pelit memberi nilai. Itu semua baik. Terkecuali satu kriteria yang tidak boleh, yaitu memberikan angka dengan mudah tadi. Jadi, guru idola harus memberikan nilai baik kepada yang baik, tetapi kalau jelek harus kasih angka jelek,” jelas Kalla.

Demikian disampaikan Wapres Kalla, Jum’at (14/7) malam, sebelum melepas 14 guru favorit pilihan siswa-siswi se-Sumatra Jawa, di auditorium Istana Wapres Jakarta, yang didampingi oleh Mendiknas Bambang Sudibjo. Para guru itu akan mengikuti studi banding ke sejumlah negara ASEAN, yaitu Singapura, Malaysia, dan Thailand, pada 14-22 Juli mendatang. Guru-guru favorit itu dipilih oleh para siswanya dan kemudian diusulkan ke Departemen Pendidikan Nasional. Mereka akan mengunjungi tempat-tempat pendidikan di negara-negara tersebut dan kantor-kantor redaksi surat kabar yang selama ini dinilai ikut mendorong perkembangan pendidikan disana.

C. Uraian Materi

1. Perkembangan Penyelenggaraan Sekolah Dasar di Indonesia

Pada masa penjajahan Belanda, tingkat sekolah dasar disebut sebagai *Europeesche Lagere School* (ELS). Kemudian pada masa penjajahan Jepang disebut dengan Sekolah Rakyat (SR). Setelah Indonesia merdeka, SR berubah menjadi Sekolah Dasar (SD) pada tanggal 13 Maret 1946.

Sekolah dasar (disingkat SD;Inggris:*Elementary School*) adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia. Sekolah dasar ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Saat ini murid kelas 6 diwajibkan mengikuti Ujian Nasional (dahulu Ebtanas) yang

mempengaruhi kelulusan siswa. Lulusan sekolah dasar dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah pertama (atau sederajat).

Pelajar sekolah dasar umumnya berusia 7-12 tahun. Di Indonesia, setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, yakni sekolah dasar (atau sederajat) 6 tahun dan sekolah menengah pertama (atau sederajat) 3 tahun.

Sekolah dasar diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, pengelolaan sekolah dasar negeri (SDN) di Indonesia yang sebelumnya berada dibawah Departemen Pendidikan Nasional, kini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota. Sedangkan Departemen Pendidikan Nasional hanya berperan sebagai regulator dalam bidang standar nasional pendidikan. Secara struktural, sekolah dasar negeri merupakan unit pelaksana teknis dinas pendidikan kabupaten/kota.

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Nomor 20 Tahun 2001) Pasal 17 mendefinisikan pendidikan dasar sebagai berikut: (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. (2) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

2. Asumsi Pelaksanaan Sekolah Dasar di Indonesia

Pembukaan UUD 1945 alinea 4 menyatakan bahwa Negara bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam upaya mewujudkan tujuan dimaksud, setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran (pasal 31 ayat 1 UUD 1945). Secara operasional, dukungan tersebut dinyatakan dalam UU Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab III ayat 5, bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Hal ini berarti bahwa semua orang berhak memperoleh pendidikan, termasuk warga negara yang memiliki kesulitan belajar seperti kesulitan membaca (disleksia), menulis (disgrafia) dan menghitung (diskalkulia) maupun penyandang ketunaan (tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan tunalaras). Dengan demikian, warga negara Indonesia yang memiliki kelainan dan atau kesulitan belajar dapat mengikuti pendidikan di sekolah reguler sesuai dengan tingkat ketunaan dan kesulitannya (pendidikan terpadu).

Kebijakan tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk bhineka yang mengemban misi utama sebagai khalifah Tuhan di muka bumi untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan serta menciptakan kedamaian bersama. Terdeteksi maupun

tidak, setiap manusia memiliki potensi yang berbeda-beda dan dapat dikembangkan secara optimal jika tercipta suatu lingkungan yang kondusif, karena tugas utama pendidikan adalah mengantarkan terciptanya lingkungan dimaksud. Di samping itu, landasan hukum yang melatar belakangi pendidikan terpadu antara lain: (a) Konferensi internasional di Jomtien-Thailand pada tahun 1990 yang merekomendasikan agar seluruh masyarakat dunia mengimplementasikan konsep pendidikan untuk semua (*education for all*), (b) Resolusi PBB nomor 48/96 tahun 1993 tentang *the standar rules on the equalization of opportunities for persons with disabilities*, (c) Deklarsi Salamanca, Spanyol tahun 1994 tentang tindak lanjut implementasi pendidikan untuk semua, serta (d) Hak-hak anak (*child rights*) yang menyatakan bahwa semua anak termasuk anak luar biasa (dengan kebutuhan pelayanan pendidikan khusus) memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk hidup dan berkembang secara penuh sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dengan demikian, pendidikan terpadu (integratif) sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan landasan hukum tersebut.

Ada beberapa asumsi pelaksanaan sekolah dasar, sekolah rendah di Indonesia :

1. Untuk dapat hidup layak sebagai warga negara perlu memiliki pendidikan minimal. Pendidikan minimal di Indonesia adalah Sekolah Dasar yang merupakan program wajib belajar sembilan tahun yang harus dijalani oleh setiap warga Negara.
2. Pendidikan minima yang harus dimiliki oleh setiap warga negara selain sepenuhnya pengetahuan, juga pembentukan watak moral dan kepribadian.
3. Memiliki pengetahuan fundamental memberi peluang yang luas bagi seseorang untuk melaksanakan berbagai hal. Dengan adanya pendidikan dasar yang diperoleh dari Sekolah Dasar maka akan memperkuat pendidikan selanjutnya baik dari pengetahuan, watak, moral dan kepribadian.
4. Saat ini kita memasuki dunia global, mereka yang tidak mempunyai pendidikan dasar akan ketinggalan dan mengalami keterbelakangan, bahkan akan terjerumus kehal-hal yang tidak diinginkan misalnya perbuatan yang sifatnya anarkis, karena tidak ada hal yang bisa dijadikan pegangan hidup.

3. Konsep Sekolah Dasar

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Mulyono (1997) berpendapat bahwa kecenderungan pendidikan di Indonesia sangat integratif, sesuai dengan falsafah Pancasila dan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Dengan

demikian, pendidikan dipandang sebagai upaya sadar untuk mengembangkan segenap potensi (kognitif, psikomotorik, dan afektif) kemanusiaan setiap peserta didik hingga derajat yang optimal. Kualitas potensi setiap peserta didik memang berbeda-beda, dan hal itu yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara individu yang satu dengan lainnya. Disadari atau tidak, pada diri peserta didik terdapat salah satu keunggulan dari aspek potensi tersebut. Hal itu tidak terlepas hanya pada anak normal, melainkan juga pada anak yang memiliki ketunaan (*the hidden potential excellence*). Sebagai bukti empirik, Amstrong dan Mulyono (1997) memberikan beberapa contoh orang yang menyandang tunarungu memiliki prestasi tingkat nasional maupun internasional seperti: Samuel Jhonson, Thomas Alva Edison, Granvill Redmond, Marlee Matlin, Ludwig Van Beethoven, dan Helen Keller.

Selanjutnya konsepsi pendidikan dasar dapat dijabarkan dalam poin-poin sebagai berikut:

1. Pada mulanya Sekolah Dasar diartikan sebagai Sekolah Rendah. Sekolah Rendah itu adalah suatu tingkat pendidikan yang berfungsi memberikan pengetahuan elementary, karena disebut *elementary school*.
2. Pengetahuan elementary yang dinyatakan itu ialah 3R (*Reading, Writing, Aricmatic*) pengetahuan itu merupakan pengetahuan elementary untuk dapat hidup bernegara dan berbangsa.
3. Peralihan konsep tradisional ke konsep progresif membuat Sekolah Rendah berubah menjadi Sekolah Dasar. Sekolah Dasar bukan Sekolah Rendah, tetapi Sekolah Dasar tempat pembentukan dasar untuk menjadi warga negara yang layak.
4. Oleh karena Sekolah Dasar pelaksanaannya menjadi bukan ditujukan hanya pada aspek pemberian pengetahuan, melainkan pada pembentukan dasar, maka kurikulumnya harus komprehensif artinya tuk terbaik lagi pada 3R saja.
5. Isi pendidikan Sekolah Dasar harus mendapatkan pendidikan persekolahan, pemberian moral dan pemberian kepribadian.

Adapun subtansi pendidikan yang diselenggarakan pada tingkat sekolah dasar diantara memuat:

1. Jangkauan isi pendidikan Sekolah Dasar yang mempersiapkan ke arah warga negara yang layak.
2. Lama bersekolah pada Sekolah Dasar yang secara kualitatif efisiensi tetap dipertanggungjawabkan.

3. Pelaksanaan pendidikan Sekolah Dasar termasuk untuk daerah terpencil atau pulau kecil.
4. Kualifikasi guru Sekolah Dasar sering kali yang dapat memancing orang untuk menjadi guru di Sekolah Dasar.
5. Sarana dan pelaksanaan Sekolah Dasar harus diperhatikan untuk memancing minat anak untuk bersekolah.

4. Pengelolaan Sekolah Dasar di Indonesia

Umur untuk memulai bersekolah menurut ketentuan ialah enam tahun, namun pada umumnya anak mulai masuk sekolah pada umur 7 tahun. Sekolah tersebut dibagi menurut tingkatan dan menggabungkan laki-laki dan perempuan dalam satu sekolah. Tujuan pokok dari berbagai usaha pengembangan pendidikan dasar adalah meningkatkan kesempatan belajar baik anak-anak kelompok umur 7 – 12 tahun, sekaligus memperbaiki kualitas pendidikan dan mempersiapkan murid-murid untuk pendidikan lebih lanjut.

Pendidikan dasar di Indonesia pada dasarnya dibedakan menjadi dua yaitu yang dikelola oleh pemerintah biasanya disebut Sekolah Dasar Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri sedang yang kedua dikelola oleh masyarakat biasanya disebut Sekolah Dasar Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta.

SD dibawah lingkup Kemendikbud sedang MI dibawah lingkup Kemenag. disamping itu ada pula sekolah dasar dibawah lingkup Kemendikbud berciri khas agama dengan sebutan Sekolah Dasar Islam atau Sekolah Dasar Kristen, dll.

Disebabkan letak geografis Indonesia, maka permasalahan terbesar adalah pemerataan guru di daerah daerah yang terpencil, parahnya lagi meskipun pemerintah menyebutkan bahwa banyak guru yang telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS) tapi masih banyak pula guru yang belum terangkat, juga guru honorer yang mendapatkan gaji +Rp. 100.000,per bulan.

APBN telah mengalokasikan 20% untuk pendidikan setiap tahun, namun pendidikan dasar masih didanai dengan APBD (dana BOS). Besar dana pendidikan dalam APBD amatlah terbatas; kecuali DKI Jakarta, semua APBD masih mengandalkan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Akibatnya, mayoritas peningkatan fasilitas pendidikan dasar terpusat di DKI Jakarta.

Adapun implementasi pendidikan sekolah dasar di Indonesia, meliputi :

1. Kurikulum atau isi pendidikan pada SD pelaksanaannya bukan bersifat akademik. Akan tetapi akan lebih akrab dengan kepentingan persiapan sebagai warga Negara.

2. SD lima tahun dengan menggunakan sistem pembelajaran dan teknologi pendidikan yang lebih baik bukan saja yang lebih ekonomis, namun kualitas lulusannya akan di bawah kualitas lulusan SD 6 tahun.
3. Kualifikasi guru yang standar untuk SD minimal sarjana, sehingga tujuan pembentukan dasar di SD dapat terwujud sepenuhnya seperti yang diharapkan.
4. Kode etik jabatan guru harus dirumuskan lebih jelas lagi, mengingat guru adalah seorang sarjana yang memiliki academic freedom.
5. Perlu adanya suatu sistem penggajian tunjangan guru SD serta mekanisme mutasi dan premis yang dapat menarik minat untuk menjadi guru SD.
6. Untuk daerah terpencil atau pulau kecil yang berdekatan terdapat kantong pendidikan dasar di mana anak-anak dapat memperoleh pendidikan.
7. Upaya pengembangan sarana dan alat-alat pengajaran perlu terus mendapatkan perhatian.

5. Implikasi Masalah Pendidikan Sekolah Dasar

- 1) Pengelolaan pendidikan atau *educational administration* yang lebih sesuai.
- 2) Pendidikan guru yang bertaut pendidikan tinggi (*collage*).
- 3) Pelatihan multi pelajaran yang tepat dan sesuai.
- 4) Kemampuan memanfaatkan teknologi pendidikan yang diharapkan.
- 5) Dana pendidikan yang harus tersedia.

6. Solusi Masalah Pendidikan Sekolah Dasar

Untuk menjawab permasalahan yang timbul dari penyelenggaraan sekolah dasar di Indonesia, maka beberapa alternative solusi yang dapat diterapkan diantaranya:

- 1) Pengelolaan yang bersifat sentralisasi sudah harus beralih ke pengelolaan deferensiasi.
- 2) Pengelolaan pendidikan SD harus dikelola satu atap dengan departemen pendidikan.
- 3) Setiap sarjana yang memiliki pendidikan guru dapat menjadi guru SD yang digaji minimal di ijazah yang dimiliki dan pengalaman mengajar.
- 4) Penyetaraan pendidikan guru SD yang mencapai S1 secara bertahap.

- 5) Muatan lokal dalam kurikulum SD harus mendukung sosialisasi anak di dalam menjalani hidup.
- 6) In service training bagi penggunaan berbagai teknologi pembelajaran.

D. Latihan

1. Jelaskan asumsi penyelenggaraan sekolah dasar di Indonesia!
2. Jelaskan perbedaan antara sekolah dasar dengan sekolah rendah!
3. Bagaimana perkembangan sekolah dasar di Indonesia?
4. Kemukakan implikasi problema pelaksanaan sekolah dasar di Indonesia!
5. Kemukakan solusi alternatif apa saja yang dapat digunakan sebagai upayapenyelesaian masalah sekolah dasar tersebut?

BAB VII

SEKOLAH MENENGAH KOMPREHENSIF

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari uraian materi pada bab ini, maka mahasiswa diharapkan dapat:

1. Memahami konsep dasar sekolah menengah komprehensif
2. Merumuskan karakteristik pembelajaran sekolah menengah komprehensif
3. Mengidentifikasi strategi pembelajaran komprehensif
4. Mengidentifikasi implikasi masalah sekolah menengah komprehensif

B. Pendahuluan

Pendidikan tradisional yaitu penyelenggaraan pendidikan di nusantara yang dipengaruhi oleh agama-agama besar di dunia, yaitu Hindu, Budha, Islam, dan Nasrani (Katolik dan Protestan). Hinduisme dan Budhaisme adalah agama yang berbeda yang tumbuh dan berkembang kurang lebih abad ke-5 tapi di Indonesia terdapat kecenderungan sinkretisme yaitu keyakinan untuk mempersatukan figur syiwa dengan budha sebagai satu sumber Yang Maha Tinggi. Motto Bhineka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu juga secara etimologis berasal dari keyakinan tersebut. Masih rendahnya motivasi masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan. Dan banyaknya masyarakat yang tidak mampu menyekolahkan anaknya karena faktor kemiskinan. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekolah menengah tradisional dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin modern, hal ini dapat dilihat pada sekolah yang ada sekarang ini, alat-alat pendidikan yang digunakan sudah berkembang dan maju misalnya dengan internet sehingga banyak siswa yang salah menggunakannya misalnya mengakses gambar-gambar porno.

Penerapan atau pelaksanaan sekolah menengah di Indonesia baik sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas sudah cukup maju seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah berkembang di Indonesia. Dan kurikulum sekolah yang terus

mengalami peningkatan sesuai dengan lingkungan sekolah tersebut dan juga penggunaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah-sekolah sekarang ini seperti misalnya penggunaan media pembelajaran atau penggunaan komputer yang sudah dilengkapi dengan internet serta guru yang profesional di bidangnya.

C. Uraian Materi

1. Tendensi dan Asumsi Penyelenggaraan Sekolah Menengah Komprehensif

Sebagai salah satu jenis pendidikan menengah, sekolah menengah kejuruan (SMK) seolah tidak pernah berhenti dipermasalahkan. Jika pada masa awal “kelas dua”. Lulusan SLTP yang masuk ke SMK pada umumnya bukan mereka yang tergolong tinggi kemampuan dasarnya. Jadi masuk ke SMK bukan karena pilihan, tetapi karena tidak berani atau tidak diterima di SMU. Tidak berani karena takut kalah bersaing dengan temannya yang lebih pandai atau karena tidak mampu membiayai sekolah. Jadi asumsi bahwa lulusan SLTP yang ingin segera bekerja akan masuk ke SMK dan yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi masuk ke SMU, tidak terwujud. Data menunjukkan sekitar 60% lulusan SMU tidak melanjutkan, dan yang mengejutkan mereka sengaja memilih SMU walaupun setelah lulus akan mencari pekerjaan (FMIPA IPB, 1998). Artinya lulusan SLTP “belum” menganggap bahwa persiapan memasuki dunia kerja, SMK lebih cocok dibanding SMU.

Akhir-akhir ini ada berita bahwa pada tahun pelajaran 1999 dan 2000 jumlah pendaftar ke SMK naik cukup signifikan. Namun setelah dilacak lebih jauh, ternyata secara proporsional kenaikan tersebut belum banyak berarti, karena pada saat yang bersamaan jumlah pendaftar ke SMU juga meningkat. Jadi peningkatan tersebut bukan disebabkan perubahan persepsi terhadap SMK, tetapi lebih disebabkan adanya peningkatan jumlah lulusan SLTP.

Persepsi bahwa SMK “lebih rendah” dibanding SMU tidak hanya dimiliki oleh masyarakat awam, tetapi juga kalangan pendidik, bahkan juga para pendidik yang sehari-hari membina SMK. Cobalah ditanyakan di mana anak-anak guru SMK, staf Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, staf P3G Kejuruan dan P3G Teknologi bersekolah. Dapat diduga sebagian besar dari mereka bersekolah di SMU. Kalau toh dari keluarga mereka ada yang masuk SMK, mungkin keponakan. Oleh karena itu muncul kelakar bahwa “SMU itu sekolahnya anak, sedangkan SMK itu sekolahnya keponakan.” Kalau kalangan pembina SMK saja tidak yakin akan sekolah yang dibina (SMK), tentu tidak masuk akal jika mengharapkan masyarakat punya persepsi bagus terhadap SMK.

Pertanyaan yang muncul: mengapa persepsi masyarakat (termasuk pembinaanya) terhadap SMK kurang baik. Padahal sejak dekade tahun 1980-an upaya peningkatan mutu SMK dilakukan dengan gencar. SMK-SMK Negeri pada umumnya memiliki sarana dan peralatan yang cukup baik. Guru-guru SMK telah banyak mengikuti pelatihan di P3G Kejuruan/Teknologi yang memiliki peralatan cukup lengkap. Dengan asumsi bahwa masyarakat (khususnya para pembina SMK) mengetahui kualitas SMK, perlu dipertanyakan apakah upaya tersebut belum memberikan hasil yang signifikan? Apakah ada faktor lain yang menyebabkan persepsi tersebut tidak berubah?

Pertanyaan mereka perlu dicari jawabnya. Selama persepsi tersebut belum berubah, sulit diharapkan lulusan SMK akan baik. Pengalaman menunjukkan kontribusi bibit (mutu masukan siswa) sangat kuat terhadap mutu lulusan (luaran). Jika mutu yang masuk ke SMK rendah, akibat SMK dipersepsi sebagai sekolah “kelas dua”, maka mutu lulusan juga akan rendah. Studi Samani (1991) menunjukkan kekalahan lulusan STM dibanding lulusan SMU dalam persaingan meniti karier/pekerjaan di Surabaya dan sekitarnya, bukan karena perbedaan asal sekolah, tetapi karena kemampuan dasar mereka.

Penulis tidak bermaksud untuk membahas eksistensi SMK, dengan mempertanyakan apakah kita sebaiknya menggunakan pola *single track* atau *double track*, karena secara yuridis keberadaan SMK didukung oleh UUSPN/1989 dan PP No. 29/1990. Tetapi dimaksudkan sebagai turunan pendapat dari pemerhati pendidikan kejuruan, bagaimana merevitalisasi SMK agar mampu memenuhi fungsinya menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja.

Terdapat kritikan pada SMU dan kecenderungan menggabung SMU dan SMK menjadi sekolah menengah terpadu, perlukah General Education itu digabung menjadi satu harus didasarkan atas asumsi tersebut.

Menurut Martoenoes Arifin bahwa ada beberapa asumsi yang perlu dipertimbangkan yaitu:

1. Pendidikan harus dapat mencerdaskan semua rakyat.
2. Tidak semua orang yang berbakat atau berminat untuk masuk SMK dan sebaliknya.
3. Demokratisasi pendidikan total memberi tempat pada *General Education* dan *Vocational Education*.

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa ada beberapa tendensi yang berkaitan dengan pelaksanaan sekolah menengah, yaitu :

- a. Sekolah Menengah Pertama
 - 1) SMP harus mengalami perubahan revolusioner pada jenis, sifat, dan lama pendidikannya supaya disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan Pendidikan Nasional.
 - 2) SMP yang juga boleh disebut sekolah pemuda hendaknya memuat 4 tahun pelajaran.
 - 3) Pelajarannya terutama bersifat pembentukan umum menurut prinsip-prinsip Pendidikan Nasional. Jadi dalam SMP belum ada spesialisasi. Spesialisasi baru dimulai sesudah SMP, namun agar SMP mempunyai keterampilan praktis, dan menghasilkan anak didik yang dapat berdiri sendiri, disamping mata-mata pelajaran umum, hendaknya SMP mempunyai diferensiasi. Diferensiasi terdiri atas pelajaran-pelajaran elementer keahlian, yang diberikan selama 4 tahun juga murid-murid boleh memilih sendiri menurut bakatnya, akan tetapi hanya boleh memilih salah satu jurusan keahlian saja dan mereka dibimbing oleh pembimbing dan penyuluh yang diusahakan sekolah.
 - 4) Sesuai dengan perkembangan itu, maka pendidikan di SMP sudah dapat mempunyai bagian-bagian misalnya: kelompok dasar, kelompok kesenian, kelompok perdagangan, kelompok administrasi, kelompok keterampilan/ketangkasan, dll.
 - 5) Pada akhir SMP si murid tidak hanya mempunyai ijazah, melainkan juga sudah memiliki kecakapan jurusan sederhana, misalnya teknik, pertanian dsb. Kecakapan ini disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Jadi jika murid tidak meneruskan sekolah, dia sudah dapat bekerja.

- b. Sekolah Menengah Atas
 - 1) Sekolah menengah sebagai General Education berbeda dan terpisah dari sekolah menengah sebagai Vocational Education.
 - 2) Sekolah menengah (General Education) mulai dari tingkat SMP sampai tingkat SMU yang masa belajarnya 3 tahun tambah 3 tahun seperti biasanya atau 4 tahun ditambah 2 tahun (perlu diteliti dari sudut psikologi remaja).
 - 3) Kurikulum sekolah menengah tersebut selain memberikan hal-hal yang praktis sebagai bekal kemasyarakatan juga terdapat program terminal baik merupakan suatu paket

keterampilan yang dapat dipilih siswa yang tak berminat ke perguruan tinggi.

- 4) Kurikulum yang bersifat akademik selain basis bagi pendidikan tinggi juga merupakan program yang memperluas sistem intelektual siswa.

2. Konsep Sekolah Menengah Komprehensif

Secara historis pendidikan kejuruan (lebih luas dari SMK) telah berkembang seiring kehidupan manusia. Bahkan sangat mungkin pendidikan kejuruan merupakan pendidikan tertua, lebih tua dibanding dengan jenis pendidikan lainnya. Ketika orangtua mendidik anaknya bagaimana berburu binatang untuk dimakan atau orangtua mengajari anaknya cara mencari tumbuh-tumbuhan yang dapat dimakan, sebenarnya mereka telah melakukan pendidikan kejuruan. Secara definisi pendidikan kejuruan diartikan sebagai pendidikan yang dikaitkan untuk pekerjaan tertentu, baik ketika yang bersangkutan belum dapat mengerjakan atau meningkatkan mutu pekerjaan yang selama itu sudah dikerjakan. Dalam bahasa yang lebih komprehensif dikatakan pendidikan kejuruan bertujuan untuk mempersiapkan siswa dalam memasuki bidang pekerjaan tertentu (Evan, 1974). Definisi yang kurang lebih sama juga disebutkan pada PP No. 29 Tahun 1990 dan dokumen “baku” Dit. Dikmenjur dengan judul Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui SMK (1998). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian seperti itu diikuti di Indonesia.

Jika secara yuridis eksistensi pendidikan kejuruan memiliki landasan cukup kuat, secara sosiologis pun juga cukup baik. Pendidikan kejuruan diharapkan mampu menumbuhkan hubungan yang harmonis bahkan sinergis dengan sistem-sistem kemasyarakatan yang lain (ekonomi, politik, ketenagakerjaan, budaya, dsb). Mandat itu sangat besar peluang ketercapaiannya, mengingat fungsi pendidikan kejuruan pada dasarnya “melayani” dunia ekonomi ketenagakerjaan, yang tentu saja juga terkait erat dengan sistem sosial lainnya. Artinya sejak awal memang pendidikan kejuruan dirancang terkait dengan bidang-bidang kehidupan lainnya.

Dari aspek ekonomi pendidikan kejuruan juga memiliki landasan yang cukup baik, walaupun secara teknis sering dipertanyakan. Sebagai lembaga persiapan memasuki lapangan kerja, sebenarnya pendidikan kejuruan merupakan penerapan teori human capital. Melalui investasi pada pendidikan kejuruan diharapkan dihasilkan balikan yang cukup baik, baik secara individual maupun sosial. Tentu saja untuk aspek ini efektivitas dan efisiensi program pendidikan kejuruan harus benar-benar dibuktikan.

Namun dalam aspek ekonomi inilah justru SMK (sebagai salah satu bentuk pendidikan kejuruan) banyak mendapat sorotan. Banyak studi yang

menunjukkan bahwa investasi pendidikan pada SMK memiliki *rate of return* lebih rendah dibanding SMU (Clark, 1983; Psachharopoulos et. al., 1983). Dan itu yang kemudian memunculkan polemik apakah SMK perlu dipertahankan atau dihapus saja, karena beberapa bukti menunjukkan bahwa SMK tidak efisien.

Kedepan pendidikan apapun jenisnya, termasuk SMK ditantang untuk mampu bersaing dengan lembaga lainnya. Pendidikan tidak lagi dipahami sebagai kegiatan sosial (*public service*) semata, tetapi dipahami sebagai bentuk layanan jasa, sebagaimana restoran, telekomunikasi, jasa konsultan, dan sebagainya. Sallis (1993) menjelaskan secara baik bagaimana pendidikan dipahami sebagai bentuk fungsi produksi sebagaimana yang digunakan selama ini.

Selain itu kedepan pendidikan juga akan menjadi salah satu bentuk "industri". Maraknya iklan sekolah, perguruan tinggi, kursus/pelatihan merupakan indikator pergeseran pemahaman terhadap pendidikan. Bukankah iklan-iklan tersebut sebenarnya upaya lembaga pendidikan untuk menarik calon siswa/mahasiswa? Bahkan kini sudah muncul keinginan untuk secara terbuka menyatakan bahwa pendidikan merupakan bentuk industri mulia, sehingga selayaknya dikelola oleh sebuah perseroan dan bukan oleh yayasan (Oentoro, 2000).

Pada saat era keterbukaan nanti, lembaga pendidikan asing akan masuk ke Indonesia dalam berbagai bentuk. Dengan penduduk 210 juta Indonesia dianggap merupakan pasar yang sangat potensial untuk berbagai produk, termasuk pendidikan. Pada saat inipun gejalanya sudah muncul. Pameran-pameran pendidikan yang banyak berlangsung di kota-kota besar, sebenarnya merupakan iklan sebagaimana pameran produksi-produksi yang lain. Kini juga mulai muncul berbagai bentuk waralaba pendidikan luar negeri sangat baik. Jumlah orang Indonesia yang bersekolah keluar negeri, termasuk level SLTA terus meningkat. Bahkan di Kalimantan Barat dan wilayah Sumatera bagian Utara (Aceh, Sumut, Riau, dan Sumber) kini sedang terjadi arus anak bersekolah ke Malaysia dengan sangat deras. Iklan-iklan sederhana dari Malaysia, lengkap dengan informasi perbandingan biaya, membanjir ke wilayah tersebut.

Selanjutnya menurut Martoenoes Arifin, beberapa konsepsi pelaksanaan sekolah menengah di Indonesia, diantaranya:

1. Sekolah menengah khususnya (SMU, SMP) harus dipandang sebagai pertumbuhan dari bawah dan pertumbuhan dari atas artinya sebagai lanjutan dari SD dan persiapan ke perguruan tinggi.
2. SMK sebagai pertumbuhan dari atas harus mampu mempersiapkan peserta didik ke masyarakat (lapangan kerja)

dan sebagai pertumbuhan dari atas SMU harus dapat mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.

3. Sesuai dengan konsep pertumbuhan dari bawah dan dari atas maka kurikulum harus berisikan hal-hal yang praktis dan hal-hal yang bersifat akademik.
4. Pembagian sekolah menengah 3 tahun (SMP) ditambah 3 tahun (SMU) perlu dikelola lebih lanjut, sehingga diperoleh suatu pembelajaran sekolah menengah yang kuat.
5. Realisasi sekolah menengah yang progresif di berbagai negara tertentu selalu sama sesuai dengan berbagai kepentingan.

Selanjutnya dapat disimpulkan, sekolah menengah komprehensif sebagai sekolah menengah yang menawarkan kurikulum sekolah umum, sekolah teknik dan sekolah umum, sekolah teknik dan sekolah modern atau disebut juga sekolah yang memberikan kombinasi diantara kurikulum tersebut. Di sekolah ini murid ditempatkan pada aliran yang berbeda sesuai dengan bakat dan kemampuan mereka. Sekolah komprehensif mirip dengan sekolah di Amerika yang menggunakan sistem pengelompokan atau disebut dengan sistem pelacakan (*tracking*).

Tujuan dari sekolah komprehensif adalah demokratisasi pendidikan dan melayani minat dan kebutuhan siswa, selain itu sekolah ini juga bertujuan untuk memberikan kesempatan pendidikan bagi semua anak, bukan untuk membagi mereka menjadi kelompok yang berbeda.

3. Pelaksanaan Sekolah Menengah Komprehensif di Indonesia

Sekolah menengah umum dan sekolah menengah kejuruan adalah termasuk jenis sekolah menengah yang seolah-olah tidak pernah berhenti dipermasalahkan. Jika pada masa awal kemerdekaan SMK merupakan sekolah favorit, kini praktis SMK menjadi sekolah "kelas dua". Lulusan SLTP yang masuk ke SMK pada umumnya bukan mereka yang tergolong tinggi kemampuan dasarnya. Jadi masuk ke SMK bukan karena pilihan, tetapi karena tidak berani atau tidak diterima di SMU. Jadi asumsi bahwa lulusan SLTP yang ingin segera bekerja akan masuk ke SMK dan yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi masuk ke SMU, tidak terwujud. Data menunjukkan sekitar 60 % lulusan SMU tidak melanjutkan dan yang mengejutkan mereka sengaja memilih SMU walaupun setelah lulus akan mencari pekerjaan. Artinya lulusan SLTP belum menganggap bahwa untuk persiapan memasuki dunia kerja, SMK lebih cocok dibanding SMU.

Selain itu implementasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas di Indonesia, yaitu:

- a. SLTP, dilihat dari materi pelajarannya, pendidikan disini dapat dikategorikan kedalam tahap persiapan kejuruan. Dengan demikian, pendidikan tersebut hanya sekedar merupakan dasar untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (SLTA) atau untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pekerja terampil, kalau itu sudah ada di Indonesia. Anggapan yang kurang tepat sudah terlanjur menyebar di masyarakat yang mengelompokkan lulusan sekolah tersebut kedalam pekerja semiterampil. Selain itu mereka sebenarnya baru tergolong pada remaja stadium awal yang masih dalam masa transisi dari dunia anak-anak ke dunia remaja. Maka dari itu, sesuai dengan bakat dan minat masing-masing, mereka sebaiknya disalurkan ke jenjang yang lebih tinggi atau mengikuti pendidikan kejuruan tingkat pertama yang berorientasi pada praktik untuk kemudian menjadi pekerja terampil.
- b. SLTA memiliki siswa sekitar 4 juta, 1,3 juta diantaranya berada di jalur kejuruan. Dengan kata lain, hanya 60% siswa SLTP yang melanjutkan pendidikan ke tingkat SLTA. Di seluruh Indonesia tercatat sekitar 430.000 siswa STM. Lulusan STM dianggap baik oleh masyarakat maupun oleh dunia usaha, sebagai pekerja terampil. Anggapan ini pun kurang tepat sebab kurikulum STM terlalu berorientasi pada teori dan sangat sedikit praktek. Lulusan STM belum memiliki keterampilan yang memadai sehingga mereka masih harus melanjutkan pendidikan dan pelatihan yang lebih menitik beratkan pada praktek.

4. Pendidikan Komprehensif dengan Inovasi Pembelajaran

Pendidikan Komprehensif adalah pembelajaran yang berkelanjutan mulai dari PAUD/SD-SMP-SMA-PT. Pembelajaran yang meliputi banyak hal yaitu Ilmu Pengetahuan, Budi Pekerti, Akhlak, Karakter, Kreativitas, Inovatif. Istilah komprehensif yang digunakan dalam pendidikan karakter mencakup berbagai aspek.

Aspek yang pertama isinya harus komprehensif, meliputi suatu permasalahan yang berkaitan dengan pilihan nilai-nilai yang bersifat pribadi sampai kepada pertanyaan-pertanyaan mengenai etika secara umum. Kedua metodenya harus komprehensif yang meliputi penanaman nilai, pemberian teladan kepada peserta didik.

Ketiga Pendidikan karakter hendaknya terjadi dalam keseluruhan proses pendidikan di kelas, dalam kegiatan ekstrakurikuler, dalam proses bimbingan dan penyuluhan.

Yang terakhir, keempat, pendidikan karakter hendaknya terjadi melalui kehidupan dalam masyarakat, karena peran serta masyarakat atau lingkungan dapat mempengaruhi karakter peserta didik (generasi muda). Didalam pembelajaran di sekolah harus membuat standarisasi bahwa kelompok bermain adalah saat anak memang bermain, PAUD saat anak bermain, Sekolah Dasar saat anak mulai dibangun karakternya supaya fundamen dalam diri anak tersebut benar-benar kuat, karakter SMP dan SMA lebih condong kepada pertengahan antara Pendidikan.

Akademik dan pendidikan Karakter, tingkatan akhir pada pembelajaran di Perguruan Tinggi lebih diajarkan mengenai pendidikan akademik dan mengesampingkan Pendidikan Karakter, karena pada usia mahasiswa sudah mengerti mengenai hakekat yang benar dan salah. Standarisasi ini berfungsi untuk paling tidak menseragamkan output dari yang dihasilkan.

Memadukan antara Pendidikan Karakter dan Pendidikan Akademik sangat diperlukan dalam pembelajaran yang berkelanjutan. Keduanya dibutuhkan peserta didik dalam proses pembelajaran supaya diperoleh kesempurnaan dalam pembelajarannya. Kunci utama yang harus dipegang guru adalah bahwa setiap proses atau produk inovatif yang dilakukan dan dihasilkannya harus mengacu pada kepentingan siswa. Inovasi pembelajaran di PAUD/SD harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik yang masih dalam tahap bermain dan penanaman fundamen, mengenai kebutuhan mereka dalam pendidikan karakter, penanaman budi pekerti, akhlak, serta sopan santun.

Pada usia sekolah dasar, peserta didik belum bisa membedakan antara benar dan salah, maka dari itu perlu ada bimbingan dari guru untuk menanamkan nilai fundamen dasar kepada peserta didik supaya lebih terarahkan kepada nilai moral yang baik pendidikan karakter pemberian teladan merupakan metode yang bisa digunakan. Pendidik harus berperan sebagai model atau pemberi teladan yang baik bagi peserta didik dan harus bisa menjadi contoh atau panutan. Misalkan cara guru menyelesaikan masalah secara adil, menghargai pendapat anak, dan mengkritik orang lain secara santun merupakan perilaku alami yang dapat dijadikan teladan oleh peserta didik. Demikian juga apabila guru berperilaku sebaliknya, anak-anak secara tidak sadar juga akan menirunya. Oleh karena itu para pendidik atau guru harus berhati-hati dalam bertutur kata dan bertindak, supaya tidak tertanamkan nilai-nilai negatif dalam sanubari peserta didik.

Jika pendidikan akademik diutamakan pada pembelajaran di PAUD/SD kurang sesuai, karena pada usia sekolah dasar peserta didik akan lebih membutuhkan pendidikan karakter yang diajarkan gurunya.

Pada Pembelajaran Tingkat SMP dan SMU siswa lebih kepada semboyan ki Hajar Dewantara tut wuri handayani (dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan). Pendidik hanya mengarahkan peserta didik dalam inovasi pembelajarannya menggabungkan antara ilmu pengetahuan dengan budi pekerti atau Akhlak dan karakter peserta didik. Terjadi keseimbangan dalam pembelajaran tingkat SMP dan SMA. Peserta didik membutuhkan pembelajaran Pendidikan Akademik tetapi tidak meninggalkan pada Pendidikan Karakter itu sendiri. Dalam hal ini guru dapat mengajarkan kepada siswa pembelajaran Komprehensif yaitu mengenai pengembangan Keterampilan hidup.

Ada beberapa keterampilan yang diperlukan supaya peserta didik dapat mengamalkan nilai-nilai yang dianut sehingga berperilaku konstruktif dan bermoral dalam masyarakat, keterampilan tersebut antara lain berpikir kritis, berkomunikasi secara jelas, menyimak, bertindak asertif, dan menemukan resolusi konflik dapat disebutkan secara ringkas sebagai keterampilan akademik dan keterampilan sosial.

Pembelajaran terintegrasi dapat memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik, karena mereka memahami konsep-konsep keterampilan dan nilai-nilai yang mereka pelajari dengan menghubungkannya dengan konsep dan keterampilan lain yang sudah mereka pahami. Konsep dan keterampilan tersebut dapat berasal dari satu bidang studi (intra bidang studi), dapat pula dari beberapa bidang studi (antarbidang studi).

Pengalaman ini sangat diperlukan dalam kehidupan, mengingat masalah yang dihadapi hanya mungkin dapat diatasi secara tuntas dengan memanfaatkan berbagai bidang ilmu secara interdisipliner atau multidisipliner.

Pada pembelajaran yang dilakukan sejak PAUD/SD-SMP-SMA-PT inovasi pembelajaran akan mengalami integrasi peningkatan sesuai dengan perkembangan usia peserta didik. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh maka peserta didik akan mengalami pembiasaan terhadap gaya lingkungan belajarnya. Serta apa yang harus dikuasai dalam pembelajarannya.

Semakin tinggi jenjang pendidikan semakin banyak pengalaman mengenai karakter yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Pada jenjang Perguruan Tinggi mahasiswa sudah bisa mengenali jati diri mereka sendiri. Tidak ada materi yang diajarkan pendidik (dosen) mengenai pendidikan karakter. Inovasi Pembelajaran lebih diutamakan kepada penguasaan materi melalui pendidikan Akademik yang diterima pada perkuliahan.

Guna menciptakan kultur yang bermoral perlu diciptakan lingkungan sosial yang dapat mendorong mahasiswa memiliki moralitas yang baik atau karakter yang terpuji. Sebagai contoh, apabila suatu Perguruan Tinggi

memiliki iklim demokratis, maka mahasiswa akan terdorong untuk bertindak secara demokratis.

Sebaliknya apabila suatu perguruan tinggi terbiasa menggunakan tindakan-tindakan otoriter maka sulit untuk mendidik mahasiswa untuk menjadi pribadi yang demokratis. Demikian juga apabila perguruan tinggi dapat menciptakan lingkungan sosial yang menjunjung tinggi kejujuran dan rasa tanggung jawab maka lebih mudah bagi para mahasiswa untuk berkembang menjadi pribadi-pribadi yang jujur dan bertanggung jawab. Strategi yang dapat digunakan untuk mengembangkan karakter mahasiswa melewati kultur perguruan tinggi ialah dengan melibatkan para mahasiswa dalam membangun kehidupan di kampus. Misalnya dalam membangun kehidupan yang demokratis yang menghargai pluralistik, dan yang mematuhi peraturan. Didalam hal ini mahasiswa juga dilibatkan dalam pembuatan peraturan, evaluasi peraturan, penegakan peraturan dan juga dalam hal penggantian peraturan.

5. Implikasi Masalah Pendidikan Sekolah Menengah Komprehensif

- a. Masalah penempatan guru, khususnya penempatan guru bidang studi sering mengalami kepincangan tidak disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Solusinya adalah kurikulum harus melakukan tindakan antisipasi terhadap pemberian bekal bagi calon luaran sesuai dengan ketentuan zaman.
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana belajar di sekolah seperti buku pelajaran, alat laboratorium/alat praktek. Solusinya yaitu perlu terus diupayakan pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai sebagaimana diisyaratkan dalam standar pelayanan minimal (SDM) Kep Men Diknas No. 053/U/2001.
- c. Kualitas pembelajaran masih rendah, karena guru masih mendominasi proses pembelajaran, sedang siswa masih pasif. Solusinya adalah diharapkan guru mau melaksanakan fungsinya sebagai agen perubahan bagi perkembangan siswanya sekaligus sebagai pembimbingnya.
- d. Kegiatan pembelajaran yang masih berpusat pada guru, pengembangan materi pelajaran tidak kontekstual dan kinerja siswa rendah baik pada proses maupun produk belajarnya. Keadaan tersebut potensial menimbulkan kejenuhan, kebosanan serta menurunkan minat dan motivasi belajar siswa. Hal ini menyebabkan siswa tidak memiliki pengalaman belajar dan proses pembelajaran menjadi tidak bermakna. Jadi diharapkan guru mampu memainkan peran sebagai inovator pembelajaran.

6. Solusi Permasalahan Pendidikan Sekolah Menengah Komprehensif

Mengingat persepsi masyarakat terhadap SMK negatif, sementara itu serbuan iklan dari sekolah-sekolah asing semakin gencar, maka sudah saatnya dilakukan revitalisasi terhadap SMK. Persepsi tersebut harus dapat diubah, sehingga masyarakat meyakini, bahwa SMK merupakan pilihan yang tepat jika lulusan SLTP mengharapkan akan memasuki lapangan kerja setelah tamat SLTA. Untuk itu SMK harus mampu membuktikannya di lapangan dan bukan sekedar merupakan slogan.

Dalam revitalisasi, tampaknya aspek efektivitas dan efisiensi menjadi titik kritikal. Efektif artinya, program-program di SMK benar-benar sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Efisien artinya program-program tersebut dilaksanakan dengan waktu, sumberdaya dan dana yang seminimal mungkin. Efektivitas SMK akan diukur seberapa jauh program di SMK relevan dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga lulusannya memiliki kompetensi yang diperlukan oleh lapangan kerja. Untuk ini mau tidak mau SMK harus melihat kecenderungan ketenagakerjaan pada tingkat menengah.

Sudah banyak ahli yang menjelaskan bahwa kedepan keterampilan manual akan digeser oleh keterampilan intelektual (Samani, 1998). Produk-produk barang kini mengarah kebentuk-bentuk miniatur, memiliki kemampuan tinggi, dirangkai dalam bentuk modul-modul dan dirancang sebagai produk yang *single use*. Kepraktisan, kenyamanan pemakaian dan kemudahan pemeliharaan/repairasi tampaknya menjadi alasan utama. Jika peralatan seperti itu rusak, maka yang diperlukan adalah mencari bagian (modul) yang rusak dan kemudian melepas dan menggantinya dengan yang baru. Dengan demikian yang diperlukan adalah teknisi yang mampu bernalar untuk menganalisis rangkaian peralatan tersebut, sementara keterampilan manual yang diperlukan hanyalah merupakan dasar saja, yaitu sekedar melepas dan memasang kembali.

Dalam bidang pengoperasian alat/mesin, operator-operator peralatan manual akan segera digeser oleh panel kontrol, sehingga yang diperlukan bukan keterampilan manual tetapi kemampuan bernalar untuk mengendalikan berbagai peralatan melalui panel kontrol tersebut. Boiler yang pada masa lalu harus dilayani dengan berbagai peralatan manual, kini dapat dikendalikan dari panel kontrol. Operator cukup mengawasi indikator pada panel kontrol dan menganalisisnya untuk memastikan apa yang harus dilakukan. Operator seperti itu lebih banyak memerlukan bekal bernalar dan hanya sedikit memerlukan latihan yang bersifat manual. Simpulan seperti itu semakin kuat, jika diingat bahwa sebagai dampak kemajuan teknologi, perubahan peralatan menjadi sangat cepat. Teknisi akan dituntut untuk mampu mempelajari sendiri jika terjadi perubahan/perkembangan teknologi

dari peralatan kerja yang digunakan. Dengan kata lain, kedepan kemampuan adaptasi dan *self training* sangat diperlukan dan untuk itu bekal kemampuan yang *transferable skill* sangat diperlukan.

Fenomena lain yang menarik dan terkait dengan pembahasan ini adalah fakta bahwa dunia kerja tidak lagi membedakan antara SMU dengan SMK. Iklan diberbagai surat kabar seringkali hanya mensyaratkan lulusan SLTA dengan memiliki keterampilan tertentu dan atau memiliki pengalaman kerja tertentu. Seakan-akan asal sekolah (SMU atau SMK) tidak lagi menjadi pertimbangan penting. Yang lebih diutamakan adalah memiliki keterampilan atau memiliki pengalaman kerja. Fenomena ini yang mungkin menyebabkan lulusan SLTP tidak merasa harus masuk ke SMK walaupun setelah lulus SLTA ingin bekerja. Toh dunia kerja tidak membedakan SMU atau SMK, sementara keterampilan dapat diperoleh dengan berbagai kursus keterampilan yang singkat. Jika tamat dari SMU dapat melamar pekerjaan ke bidang mana saja, sementara jika tamat dari SMK (STM) tentu merasa aneh melamar untuk menjadi tenaga administrasi dan sebaliknya tamatan SMU akan merasa aneh jika melamar untuk menjadi operator mesin di suatu pabrik.

Fenomena lain yang kini juga terjadi adalah adanya kecenderungan peningkatan kualifikasi pendidikan yang dituntut oleh lapangan kerja. dari iklan-iklan di berbagai surat kabar tampak bahwa posisi suatu pekerjaan yang dimasa lalu mempersyaratkan lulusan SMK/SLTA kini cenderung meminta kualifikasi diploma (DI, D2, bahkan D3). Memang belum ada pengkajian terhadap fenomena ini. Apakah memang peralatan kini memerlukan operator atau teknisi dengan bekal pendidikan lebih tinggi, atau karena terjadinya kelebihan tenaga kerja, sehingga dunia kerja menuntut persyaratan yang lebih tinggi.

Untuk aspek efisiensi tampaknya prinsip memberikan bekal yang “pas” sesuai dengan keperluan dunia kerja dan tidak perlu “berlebihan” perlu diterapkan. Rendahnya efisiensi SMK saat ini sangat mungkin disebabkan program di SMK yang cenderung memberikan bekal “terlalu” berlebihan, sementara dunia kerja hanya memerlukan kompetensi tertentu saja. Jika dunia kerja hanya memerlukan kemampuan servis mobil, tentunya tidak perlu seseorang berlatih menghitung tenaga mobil. Disamping itu semangat SMK untuk memberikan sendiri semua bekal juga perlu direnungkan ulang.

Bertolak dari analisis tersebut diatas , tampaknya pola pendidikan di SMK perlu ditinjau ulang. Pola pendidikan di SMK seyogyanya dikemas dalam bentuk paket-paket berlapis dan siswa dapat masuk secara luwes dengan prinsip *multi entry-multi exit*. Dengan pola ini, prinsip efisiensi akan dapat dicapai jika seseorang hanya memerlukan satu paket keterampilan, sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya tentu tidak perlu mengambil seluruh

paket. Pola paket seperti itu akan lebih murah dan tidak memerlukan waktu yang terlalu lama. Bekal pengetahuan yang bersifat umum dapat diambil dari sekolah lain, misalnya dari SMU. Misalnya untuk program keterampilan tertentu dipersyaratkan minimal sudah pernah duduk di SMU kelas dua dan atau bahkan telah lulus SMU. Pola berlapis artinya dapat dirancang bahwa suatu paket yang menjadi dasarnya (prasyaratnya). Tentu saja harus diterapkan prinsip pengakuan terhadap pengalaman kerja, sehingga pengalaman kerja dapat diekuivalensikan dengan paket tertentu yang memang relevan.

Pola seperti itu memang mengandung risiko, seakan SMK “keluar” dari jalur persekolahan dan mulai masuk ke jalur kursus. Bahkan dapat saja ada pihak yang mengatakan SMK telah “mengambil” porsi pihak lain, yaitu kursus keterampilan yang selama ini berada di jalur pendidikan luar sekolah. Namun kedepan pola seperti itu yang akan dapat memenuhi tuntutan dunia kerja.

Jika pola seperti itu akan ditempuh, maka diperlukan perubahan pemikiran bahwa SMK tidak harus terkurung dengan pola 3 tahunan, seperti yang tertuang dalam UUSPN dan PP Nomor 29/1990. Dengan kata lain UUSPN dan PP 29/1990 perlu ditinjau kembali. Disamping itu juga perlu dibuka “tembok” pemisah antara jalur sekolah dan jalur luar sekolah, seperti pengertian yang selama ini ada. Artinya SMK dan berbagai bentuk kursus keterampilan dibawah Diknas bahkan Depnaker dapat diintegrasikan.

Paket-paket keterampilan sebagaimana disebutkan diatas tampaknya tidak hanya terbatas setingkat SLTA, tetapi juga dapat menjangkau pasca SLTA. Program pendek berbasis SLTA, seperti kursus selama 6 bulan atau bahkan DI seringkali mampu menghasilkan lulusan dengan kompetensi jauh lebih baik dibanding pola SMK selama ini. Dunia kerja juga memilih pola itu dibanding SMK, sementara dari aspek pembiayaan, ternyata SMU plus DI lebih murah dibanding SMK 3 tahun. Sekolah Ahli Kejuruan Teknik Industri (SAKTI) di Surabaya telah membuktikan hal itu.

Untuk mengarah ke pola tersebut diatas, tampaknya ada rintangan cukup berat, yaitu perubahan pola pikir. Selama ini kita sudah dipola bahwa SLTA, termasuk SMK harus 3 tahun. Sekolah lain dengan kursus dan oleh karenanya harus dibina oleh dua instansi yang berbeda. Sekolah tidak boleh menangani pendidikan pasca SLTA, karena itu wewenang perguruan tinggi, dan seterusnya. Namun pola pikir seperti itu sangat diperlukan agar kita dapat keluar dari belenggu yang menyebabkan SMK dipersepsi sebagai sekolah “kelas dua” karena dianggap gagal mengembangkan program yang relevan dan efisien.

Menurut Martoenoes Arifin ada beberapa solusi permasalahan pendidikan sekolah menengah, diantaranya:

1. Keterampilan terminal II dapat merupakan lanjutan keterampilan terminal I meskipun tanpa mengikuti atau lolos program akademis dan program praktis.
2. Seorang siswa dapat mengambil lebih dari satu jenis program terminal pada waktu yang bersamaan dan waktu yang berbeda.
3. Siswa sekolah menengah dapat terdiri dari SMU penuh dan siswa program terminal.
4. Sekolah menengah terbuka dengan menggunakan jasa teknologi pendidikan.
5. Pembahasan RT dan SPP atau kerenggangan beban SPP sekolah menengah dengan keluarga.
6. dan sebagainya.

D. Latihan

1. Jelaskan tendensi sekolah menengah (SM) di Indonesia!
2. Kemukakan asumsi dasar pelaksanaan sekolah menengah di Indonesia!
3. Jelaskan konsep dasar pelaksanaan sekolah menengah di Indonesia!
4. Kemukakan perbedaan konsep antara sekolah menengah umum dan sekolah menengah kejuruan!
5. Bagaimana implementasi sekolah menengah di Indonesia?
6. Jelaskan implikasi problema pelaksanaan sekolah menengah di Indonesia!
7. Solusi alternatif apa saja yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah sekolah menengah di Indonesia!

BAB VIII

PENDIDIKAN GURU

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari uraian materi pada bab ini, maka mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan asumsi dilaksanakannya pendidikan guru.
2. Menjelaskan konsep sistem pendidikan guru.
3. Mengidentifikasi komponen-komponen sistem pendidikan guru.
4. Mendeskripsikan syarat-syarat menjadi guru profesional.
5. Menjelaskan berbagai lembaga penyelenggara pendidikan keguruan.
6. Menjelaskan implikasi masalah dalam pendidikan guru.
7. Menjelaskan kemungkinan solusi untuk permasalahan pendidikan guru.

B. Pendahuluan

Pada awalnya, orang-orang yang diangkat menjadi guru belum berpendidikan khusus keguruan dan secara berlahan-lahan tenaga guru ditambah dengan mengangkat dari lulusan Sekolah Guru (*Kweekschool*) yang pertama kali didirikan di Solo pada tahun 1852. Karena kebutuhan penambahan guru yang semakin mendesak, maka Pemerintah Hindia Belanda mengangkat lima macam guru, yaitu:

1. Guru lulusan Sekolah Guru yang dianggap sebagai guru yang berwenang penuh.
2. Guru yang bukan lulusan Sekolah Guru, tetap lulus ujian yang diadakan untuk menjadi seorang guru.
3. Guru Bantu yang lulus ujian guru bantu.
4. Guru yang dimagangkan sebagai guru senior, yang merupakan calon guru.
5. Guru yang diangkat karena keadaan yang sangat mendesak yang berasal dari warga yang pernah mengecap pendidikan. Jenis guru yang terakhir ini tentu saja beragam dari satu daerah dengan daerah yang lainnya.

Meskipun sekolah guru telah diadakan, namun kurikulumnya masih lebih mementingkan pengetahuannya yang akan diajarkan di sekolah, sedangkan materi ilmu mendidik dan psikologi belum dicantumkan secara khusus di dalamnya. Sejalan dengan pendirian sekolah-sekolah yang lebih tinggi tingkatannya dari sekolah umum seperti *Hollands Burgeschool Kweekschool* (HIS), *Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs* (MULO), *Hogere Burgeschool* (HBS) dan *Algemene Middlebare School* (AMS), secara berangsur-angsur didirikan pula lembaga pendidikan guru atau kursus-kursus penyiapan guru seperti *Hogere Kweekschool* (HKS) untuk guru HIS dan kursus *Hoofdacte* (HA) untuk calon kepala sekolah. Keadaan ini berlanjut sampai zaman pendudukan jepang dan awal kemerdekaan. Secara berlahan namun pasti, pendidikan guru lebih meningkatkan kualifikasi dan mutunya. Saat ini lembaga tunggal untuk pendidikan guru, yakni Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).

Dalam sejarah pendidikan guru di Indonesia, guru pernah mempunyai status yang sangat tinggi dalam masyarakat, mempunyai wibawa yang sangat disegani, dan dianggap sebagai orang yang serba mengetahui. Peranan guru ketika itu tidak hanya mendidik anak di sekolah, tetapi juga mendidik masyarakat. Guru menjadi tempat bertanya, baik masalah pribadi maupun masalah sosial yang lebih luas.

Namun demikian status dan kewibawaan guru yang sangat tinggi tersebut mulai memudar sejalan dengan kemajuan zaman, perkembangan ilmu dan teknologi, kepedulian guru, serta besarnya imbalan atau jaza (Sanusi, dkk;1991). Pada zaman sekarang ini, guru bukan lagi satu-satunya tempat bertanya bagi warga masyarakat sebab tingkat pendidikan masyarakat sebagian besar sudah lebih tinggi daripada pendidikan guru, dan jabatan guru dianggap kalah gengsi dari jabatan yang lain yang mempunyai penghasilan tinggi. Hal-hal tersebut antara lain menjadi penyebab kewibawaan dan status guru mulai memudar dan berkurang.

C. Uraian Materi

1. Asumsi Pendidikan Guru

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pelaksanaan Nasional dinyatakan dengan jelas bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan layanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan (pasal 39 ayat 1). Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik di perguruan tinggi (pasal 39 ayat 2).

Berdasarkan pada rumusan tersebut, secara implisit dinyatakan bahwa guru (pendidik) adalah tenaga profesional yang memiliki kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, menilai dan membimbing pembelajaran. Guru yang profesional diharapkan memiliki kemampuan minimal yang dipersyaratkan atau memiliki kompetensi tersebut dalam melaksanakan tugas-tugas profesionalnya.

Banyak rumusan yang menggambarkan kompetensi yang harus dimiliki guru dalam melaksanakan tugasnya. Cooper (Sudjana, 2004) mengemukakan empat kompetensi guru, yaitu (a) mempunyai pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia, (b) mempunyai pengetahuan dan penguasaan tentang bidang studi yang diajarkan, (c) mempunyai sikap yang tepat tentang diri sendiri, sekolah, teman sejawat, dan bidang studi yang diajarkannya, dan (d) mempunyai keterampilan teknik dalam mengajar. Sedangkan Glasser (Sudjana, 2004) juga mengemukakan empat yang menunjukkan kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang guru yaitu: (a) menguasai bahan ajar, (b) kemampuan mendiagnosis tingkah laku siswa, (c) kemampuan melaksanakan proses pembelajaran, dan (d) kemampuan mengukur hasil belajar siswa.

Secara mental/kepribadian, guru harus: berkepribadian/berjiwa Pancasila, mampu menghayati GBHN, mencintai bangsa dan sesama manusia dan rasa kasih sayang terhadap peserta didik, berbudi pekerti luhur, berjiwa kreatif, mampu menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, mampu mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, mampu mengembangkan kecerdasan yang tinggi, bersikap terbuka, peka dan inovatif, berdisiplin, dan memiliki rasa humor.

Persyaratan keilmuan atau pengetahuan yang harus dimiliki oleh guru adalah memahami ilmu yang dapat melandasi pembentukan pribadi, memahami ilmu yang dapat melandasi pembentukan pribadi, memahami ilmu pendidikan dan keguruan serta mampu menerapkannya dalam tugas sebagai pendidik, memahami, menguasai dan mencintai ilmu pengetahuan atau bidang studi yang diajarkannya, memiliki kemampuan yang cukup tentang bidang-bidang lain, senang membaca buku-buku ilmiah, mampu memecahkan persoalan secara sistematis, terutama yang berhubungan dengan bidang studi, dan memahami prinsip-prinsip kegiatan pembelajaran.

Jenis keterampilan yang menjadi syarat kompetensi guru adalah: mampu berperan sebagai organisator, proses pembelajaran, mampu menyusun bahan pelajaran, atas dasar pendekatan struktural, interdisipliner, fungsional, perilaku, dan teknologi, mampu memecahkan dan melaksanakan teknik-teknik mengajar dengan baik dan mencapai tujuan pendidikan, mampu merencanakan dan melaksanakan evaluasi pendidikan, dan

memahami serta mampu melaksanakan kegiatan dan pendidikan luar sekolah.

Menelaah kompetensi yang harus dimiliki oleh guru tersebut di atas, maka kompetensi-kompetensi tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: kompetensi profesional yang berkaitan dengan kemampuan akademik, kompetensi personal yang berkaitan dengan aspek-aspek kepribadian, dan kompetensi sosial berkaitan dengan kemampuan guru dalam melakukan sosial adjustment dalam masyarakat yang dapat memperlancar tugas dan membangun citra profesi. Ketiga kompetensi tersebut harus terintegrasi dan terinternalisasi dalam perilaku dalam kinerja guru. Untuk mencapai kompetensi-kompetensi tersebut di atas tentu saja melalui suatu proses yang tidak mudah, yaitu melalui suatu jenjang pendidikan, pelatihan-pelatihan (training), dan pengalaman yang memakan waktu cukup panjang.

2. Konsep Sistem Pendidikan Guru

Sistem adalah suatu totalitas yang meliputi berbagai komponen yang saling berinterelasi dan terinteraksi secara keseluruhan, baik secara struktural maupun secara fungsional. Dalam rangka mengkonsep sistem pendidikan guru, digunakan pendekatan sistem (*system approach*).

Robert B Howsam (1973) dalam tulisannya tentang *Management of PBTE Programs* mendefinisikan istilah *System* sebagai berikut.

A system is conceived as a complex of elements, each of which is necessary to accomplish the purposes of the larger system. Each of the elements as a subsystem which also has all the basic characteristic of a system.

Dalam hubungan dengan definisi tersebut, selanjutnya dikemukakan pula sejumlah prinsip yang mendasari teori sistem sebagai berikut :

- a. *Change is one part or subsystem (because the system are interactive).*
- b. *For the system to be affective, the elements or subsystem should be compatible with each other with the large system.*
- c. *When fundamental changes are sought in the system or when such changes are introduced in a major system, it will be necessary to conform the subsystem (bring them into agreement or make them compatible).*
- d. *The more basic the change (such as redirection of purposes or adoption of different assumptions) the more critical the need for conforming the system.*
- e. *Any system is a subsystem of one more higher order system which will be affected by changes in its subsystem. These changes may be accepted or rejected.*

Selain dari itu, dalam sistem PBTE terkandung sejumlah unsur atau subsistem yang penting, yang terdiri dari :

- 1) Sistem pengandaan tujuan dan penentuan prioritas,
- 2) Sistem penentuan kompetensi-kompetensi,
- 3) Sistem penyampaian instruksional,
- 4) Sistem penilaian,
- 5) Sistem teknologi instruksional,
- 6) Sistem evaluasi, umpan balik, dan bimbingan,
- 7) Sistem pencatat,
- 8) Sistem pengatur, dan
- 9) Sistem majemen.

Guru adalah suatu jabatan profesional, yang memiliki jabatan dan kompetensi profesional. Pendidikan guru adalah pendidikan profesional, yang terdiri dari kategori : pendidikan *pre-service*, pendidikan *in-service*, pendidikan berlanjut, pendidikan lanjutan, dan pengembangan staf.

Pendidikan guru dipadukan dalam suatu sistem proses pengadaan, pengembangan, dan pengelolaan. Setiap lembaga pendidikan guru harus berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Tujuannya adalah:

Membentuk manusia yang ber-Pancasila dan membentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang termasuk dalam UUD 1945.

Berdasarkan pada kebijakan nasional dalam bidang pendidikan, yakni pemerataan kesempatan belajar, peningkatan relevansi pendidikan sesuai dengan tuntutan pembangunan, peningkatan mutu pendidikan, serta efisiensi efektivitas pendidikan. Dalam hubungan inilah, guru secara profesional menempati titik sentral.

3. Komponen-Komponen Sistem Pendidikan Guru

a. Lulusan

Para lulusan adalah produksi sistem pendidikan guru. Kuantitas dan kualitasnya sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, dan harapan masyarakat, yaitu guru yang baik, baik ditinjau dari proyeksi nasional (Pancasila dan UUD 1945), proyeksi pembangunan nasional sebagai manusia pembangunan, dan dari segi kriteria profesional.

b. Calon siswa/mahasiswa

Calon siswa/mahasiswa adalah masukan dalam bentuk material mentah ke dalam proses pendidikan guru. Karena ledakan para calon besar, menyebabkan besarnya arus siswa pada berbagai jenjang pendidikan. Semua hal tersebut menjadi tanggung jawab sistem pendidikan guru untuk memprosesnya.

c. Proses pendidikan guru

Proses ini berlangsung dalam kelas, dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan pada kehidupan luar kelas. Lawrence Downey mengatakan bahwa proses pendidikan mengandung 3 dimensi.

- a. Dimensi substantif mengenai bahan apa yang diajarkan.
- b. Dimensi tingkah laku guru tentang bagaimana guru mengajar. Jadi, bertalian dengan kemampuan guru dan metode mengajar.
- c. Dimensi lingkungan fisik, sarana, dan prasarana pendidikan.

d. Manusia

Komponen ini terdiri dari unsur guru dan unsur staf personel. Guru memegang peranan sangat penting dalam proses pendidikan guru. Karena itu harus memiliki kualifikasi profesional sehingga mampu mengemban tugas dan peranannya. Dinyatakan oleh William Taylor bahwa pada masa yang akan datang peranan guru semakin bertambah luas. Guru merupakan agen kognitif, guru sebagai agen moral dan politik, guru selaku inovator, guru berperan sebagai kooperatif, dan guru sebagai agen persamaan sosial dan pendidikan. Selain itu, para staf personel bertugas menunjang proses pendidikan dengan memberikan pelayanan teknis dan administratif.

e. Metode

Komponen ini mengandung unsur substantif atau program kurikuler, metode penyajian bahan, dan media pendidikan. Tiap jenjang pendidikan guru memiliki programnya sendiri, sesuai dengan tujuan institusionalnya, yang membutuhkan metode penyampaian dan media pendidikan yang tepat guna, demi tercapainya mutu pendidikan yang baik.

f. Materi

Komponen ini mengandung unsur fasilitas, sarana, dan prasarana pendidikan. Bila komponen ini telah tersedia secara memadai, maka akan memperlancar proses pendidikan dan akan memberikan mutu lulusan yang baik.

g. Evaluasi

Komponen ini berfungsi menilai sejauh mana keberhasilan proses pendidikan guru, memeriksa mutu lulusan, dan menyediakan informasi yang berguna untuk perbaikan sistem pendidikan guru pada masa mendatang.

h. Umpan balik

Bila dari subsistem evaluasi terdapat berbagai kelemahan dalam sistem pendidikan guru, maka perlu ditinjau kembali dan direorganisasi agar lebih mantap. Karena itu, komponen umpan balik sangat diperlukan dan perlu dikembangkan pengelolaan sistem informasi.

i. Masyarakat

Komponen ini merupakan input eksternal sosial budaya. Karena pendidikan adalah bagian integral dari kebudayaan, maka sistem pendidikan guru yang menjadi bagian dari kebudayaan itu berfungsi sebagai pengawet dan sekaligus pencipta dari kebudayaan.

Masyarakat dan sistem pendidikan guru saling mempengaruhi satu sama lain. Karena itu diperlukan tanggung jawab dan kerja sama secara efektif antara kedua pihak tersebut bersama pemerintah.

Komponen-komponen tersebut saling berhubungan, saling ketergantungan, dan saling menerobos, baik antar komponennya maupun antar komponen-komponen dengan keseluruhan sistem pendidikan guru untuk mencapai tujuan pendidikan guru. Perubahan pada suatu komponen akan mempengaruhi komponen lainnya dan sistem secara keseluruhan.

Konteks masyarakat dan sosial budaya memiliki makna yang sangat strategis dalam suatu sistem pendidikan guru. Komponen ini merupakan sumber nilai dan sumber kebutuhan sehingga mewarnai sistem. Sistem pendidikan guru merupakan cermin karena dapat menimbulkan perubahan pada masyarakat dan budaya. Pendidikan guru seharusnya menjadi agen perubahan yang melakukan transformasi terhadap masyarakat. Komponen ini pula yang menjadi faktor dominan penyebab perbedaan pada sistem pendidikan guru pada berbagai negara dan bangsa.

4. Syarat-Syarat Menjadi Guru

Guru adalah salah satu faktor penentu untuk tercapainya tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu persyaratan untuk menjadi guru di Indonesia selalu tercantum dalam undang-undang mengenai pendidikan. Di dalam Undang-Undang Pokok Pendidikan No 4 tahun 1950 pasal 15 ditetapkan bahwa syarat-syarat utama untuk menjadi guru ada 4 yaitu:

- a. Syarat profesional (ijazah),

- b. Syarat biologis (kesehatan jasmani),
- c. Syarat psikologis (kesehatan mental) dan
- d. Syarat pedagogisdidaktis (pendidikan dan pengajaran)

Pada UUSPN No 2 Tahun 1989 pasal 28 ayat 2 disebutkan: untuk dapat diangkat sebagai tenaga pengajar, tenaga kependidikan yang bersangkutan harus beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berwawasan Pancasila dan UUD 1945 serta memiliki kualifikasi sebagai pengajar.

Menurut Undang-undang No 14 tahun 2005, yang dimaksud dengan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi sebagai agen pembelajaran, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kualifikasi akademik seorang guru tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Suryosubroto,2010). Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pendidik pada pendidikan anak usia dini memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D IV) atau sarjana (S1) dengan latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru PAUD. Pendidik pada pendidikan SD/MI atau bentuk lain yang sederajat memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D IV) atau sarjana (S1) dengan latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru SD/MI .

Pendidik pada pendidikan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D IV) atau sarjana (S1) dengan latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan dan sertifikat profesi guru SMP/MTs. Pendidik pada SMA/MA atau bentuk lain yang sederajat memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D IV) atau sarjana (S1) dengan latar belakang pendidikan tinggi di bidang yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, dan sertifikat profesi guru SMA/MA.

Pendidik pada SDLB/SMPLB/SMALB atau bentuk lain yang sederajat memiliki kualifikasi pendidikan minimum D IV atau S1 latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan khusus atau sarjana yang

sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan dan sertifikat profesi guru untuk SDLB/SMPLB/SMALB.

Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar, menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:

- a. kompetensi pedagogik,
- b. kompetensi kepribadian,
- c. kompetensi profesional
- d. kompetensi sosial.

Sebagai perbandingannya, di beberapa distrik di Amerika, kandidat guru diwajibkan memiliki pengetahuan dan keterampilan umum sebagai berikut:

1. Menganalisa dan menginterpretasi kemampuan, latar belakang budaya, pencapaian dan kebutuhan siswa:
 - Menggunakan catatan-catatan sekolah, termasuk tes skor terstandar dan data berisi anekdot untuk mengidentifikasi kebutuhan pembelajar
 - Mengenal dan menghargai kondisi siswa, baik yang kurang atau yang bertalenta lebih
 - Mengidentifikasi latar belakang budaya dan menginterpretasi pengaruhnya pada pembelajaran
2. Mendesain pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan pembelajar, meliputi bahan-bahan ajar, isi, aktivitas, format dan tujuannya
 - Membuat rencana pembelajaran tahunan, semester, bab, hari dan per tatap muka
 - Mengembangkan rencana pembelajaran dengan tujuan atau kemampuan siswa yang diharapkan sesudah pembelajaran, urutan pembelajaran, aktivitasnya dan evaluasinya
 - Menentukan materi pelajaran yang akan diajarkan, termasuk mengurutkan, membolak balik, langkah, penekanan, aktivitas dan evaluasi
 - Memilih bahan cetak, audio visual dan komputer mengacu pada kriteria dan kebutuhan siswa
3. Memimpin pembelajaran sebagai fasilitator pembelajaran yang terbaik
 - Menyajikan materi pelajaran dan mengatur aktivitas untuk memaksimalkan pembelajaran
 - Menggunakan berbagai strategi pembelajaran termasuk pembelajaran individual, kelompok besar dan kecil,

- pembelajaran kawan sebaya, tugas mandiri, proyek-proyek lapangan pembelajaran dengan alat bantu komputer, ceramah dan lain-lain
- Menggunakan teknologi pembelajaran yang sesuai termasuk komputer
4. Mengatur kelas untuk menjadikan pembelajaran yang produktif
 - Mengatur waktu agar pebelajar fokus pada aktivitas pembelajaran
 - Mengatur interaksi antar siswa dan siswa dengan guru
 - Mengatur tata letak fisik kelas agar menjadi lingkungan yang efektif bagi aktivitas pembelajaran
 5. Mengatur tingkah laku siswa untuk menciptakan iklim yang positif untuk pembelajaran siswa
 - Membuat aturan, menjelaskan dan memonitor tingkah laku siswa
 - Menyelingi pembelajaran dengan tugas yang menantang bagi siswa agar jalannya pembelajaran lebih baik
 - Menjaga agar pembelajaran berlangsung produktif dengan mengoreksi perilaku menyimpang, mengajar dengan berbagai strategi dan memberi penghargaan pada tingkah laku yang baik
 6. Menciptakan komunikasi personal untuk membina hubungan
 - Menggunakan bahasa Inggris standar saat menulis dan berbicara
 - Menggunakan simbol dan proses matematik dengan benar
 - Menggunakan bahasa tubuh dan komunikasi non verbalnya untuk mengekspresikan emosi seperti setuju, tidak setuju, ijin dan lain-lain.
 7. Mengevaluasi pembelajaran untuk menentukan tingkat pencapaian siswa
 - Menghubungkan jenis evaluasi dengan tujuan instruksional dan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang tepat
 - Memberi dukungan yang terbaik bagi siswa untuk menyiapkan dan mengikuti ujian
 - Menciptakan lingkungan yang sesuai untuk melakukan tes dan membentuk perilaku etika orang berpendidikan
 - Membantu siswa untuk mampu menunjukkan kemampuan dan memberi tekanan pada materi tertentu
 - Memberikan laporan penilaian kinerja siswa dengan jujur dan akurat

- Menganalisa hasil tes dan menginterpretasi pencapaian siswa lalu menginformasikannya kepada siswa dengan baik
8. Menghubungi dan mengadakan pertemuan pada saat:
- Siswa memiliki masalah dengan pembelajarannya
 - Menyusun pertemuan dengan para orang tua dan personel sekolah yang lain seperti tenaga medis, psikiater, pekerja sosial, pustakawan dan penasehat di sekolah

Dari uraian tersebut dapat kita ketahui bahwa pengetahuan dan kerampilan yang perlu untuk dimiliki oleh seorang guru yang profesional yaitu :

- 1) Pengetahuan tentang diri sendiri dan siswa
- 2) Pengetahuan tentang materi pelajaran
- 3) Pengetahuan tentang teori-teori dan penelitian pendidikan
- 4) Keterampilan dan teknik mengajar
- 5) Kecakapan interpersonal
- 6) Refleksi dan pemecahan masalah

5. Lembaga Pendidikan Keguruan

Mengacu pada persyaratan untuk menjadi seorang guru, pendidikan seperti apakah yang diperlukan seseorang untuk memiliki kemampuan menjadi guru yang professional? Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja.

Pembekalan dasar berupa pembentukan sikap, pengetahuan dan ketrampilan kerja calon lulusan (Tirtarahardja & La Sulo, 2005). Pendidikan guru di Indonesia telah mengalami sejarah yang panjang. Tuntutan kualifikasi terus meningkat sehingga berdampak pada lamanya seseorang menempuh pendidikan persiapan menjadi guru. Pada awalnya pendidikan bagi orang Indonesia dijamin penjajahan Belanda diawali dari guru yang tidak jelas ijazahnya.

Kemudian kursus dan kemudian ada aturan pendidikan minimal seorang guru untuk mengajar di level pendidikan tertentu. Setelah kemerdekaan, pemerintah mendirikan Sekolah guru bawah (SGB), Sekolah guru atas (SGA) dan Sekolah guru tinggi (SGT). SGB diperuntukkan untuk mencetak guru yang mempunyai kompetensi untuk mengajar di sekolah dasar.

Lulusan SGA mempunyai kompetensi untuk mengajar di sekolah menengah. Lama pendidikan SGA adalah 4 tahun. Sekolah guru tinggi (SGT) adalah sekolah tinggi yang pendidikannya ditempuh selama 6 tahun

(Sukardjo dan Komarudin, 2009). Pada pertengahan tahun 1960 SGB dilikuidasi dan SGA berubah menjadi Sekolah.

Pendidikan Guru (SPG) yang mendidik guru SD bagi yang belum memenuhi persyaratan diwajibkan mengikuti pendidikan yang sederajat yakni Kursus Pendidikan Guru (KPG). Tahun 1989 persyaratan untuk menjadi guru SD diringkatkan lagi menjadi minimal program Diploma II, sedangkan SPG dilikuidasi dan perangkat sumber dayanya dilimpahkan ke Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK (IKIP, FKIP dan STKIP). Setelah alih fungsi dari SPG dan SGO ke LPTK dapat dikatakan bahwa lembaga yang hampir lengkap menyelenggarakan pendidikan tenaga kependidikan dari SD sampai SLTA. Untuk menghasilkan tenaga kependidikan yang bermutu, IKIP dan FKIP ada pula yang telah mampu menyelenggarakan program pasca sarjana yang menyelenggarakan program S2 dan S3 ilmu kependidikan (Soetjipto dan Kosasi, 1999).

Beberapa tahun yang lalu lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) juga menyelenggarakan program akta mengajar. Program akta mengajar membekali lulusan perguruan tinggi non kependidikan dengan ilmu-ilmu pedagogik. Hal ini ada bertolak dari kebutuhan guru pada bidang-bidang tertentu (terutama kejuruan seperti pertanian, kesehatan dll) yang pendidikannya diselenggarakan oleh lembaga lain.

LPTK sebagai lembaga pendidikan bagi guru selalu menyesuaikan dengan kompetensi yang diperlukan dan disyaratkan bagi guru. Karena untuk saat ini, syarat pendidikan bagi guru adalah S1 atau D4, maka LPTK hanya menyelenggarakan pendidikan keguruan yang setara sarjana dan pasca sarjana.

Mata kuliah yang diberikan di LPTK ditujukan untuk memberikan pengalaman kepada calon tenaga kependidikan agar mereka mempunyai kompetensi seperti yang telah ditentukan. Mata kuliah dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu:

1. Kelompok mata kuliah dasar umum (MKDU),
2. Kelompok mata kuliah dasar kependidikan (MKDK),
3. Kelompok mata kuliah bidang studi (MKBS)
4. Kelompok mata kuliah proses belajar mengajar (MKPBM).

MKDU memberikan kemampuan yang secara umum harus dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi di Indonesia. MKDK bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa calon guru untuk mempelajari ilmu dan praktek keguruan dan ilmu-ilmu yang menunjang profesi keguruan. MKBS mengarahkan pengalaman belajar pada isi, metodologi dan filosofi bidang

ilmu tertentu yang akan diajarkan calon tenaga kependidikan pada siswanya kelak.

MKPBM diarahkan untuk membentuk kemampuan keguruan, baik yang bersifat umum dalam bentuk prinsip dan pendekatan yang berlaku untuk keperluan pengajaran maupun yang bersifat khusus, yaitu teknik serta prosedur yang erat kaitannya dengan hakikat isi bahan ajaran tertentu (Soetjipto dan Kosasi, 1999).

Sebagai gambaran tentang kurikulum di LPTK, di bawah ini adalah dua kurikulum untuk mahasiswa Universitas Negeri Malang dari jurusan fisika dan ekonomi. Kurikulum program studi pendidikan fisika terdiri dari mata kuliah keahlian I sebanyak 95 sks (termasuk KKN dan skripsi), mata kuliah keahlian II sebanyak 26 sks, mata kuliah dasar keahlian 10 sks, mata kuliah umum sebanyak 14 sks dan mata kuliah pilihan minimum 4 sks.

Mata kuliah umum terdiri dari mata kuliah pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewiraan, bahasa Inggris, ilmu sosial dasar, dasar-dasar sains dan bahasa Indonesia profesi. Mata kuliah dasar keahlian terdiri dari pengantar pendidikan, perkembangan peserta didik dan belajar dan pembelajaran. Mata kuliah keahlian I merupakan mata kuliah sesuai dengan bidang studi yaitu fisika. Mata kuliah keahlian II terdiri dari: kemampuan dasar mengajar fisika, strategi belajar mengajar fisika, evaluasi proses dan hasil pembelajaran fisika, telaah kurikulum fisika sekolah menengah, pengembangan program pengajaran fisika, metode penelitian pendidikan fisika dan program pengalaman lapangan.

Mata kuliah yang bisa diambil sebagai mata kuliah pilihan terdiri dari media komputer dalam pembelajaran fisika, media pengajaran fisika, pengembangan model pembelajaran fisika, optika, fisika bumi dan antariksa dan sejarah fisika (UM, 2001).

Kurikulum program studi pendidikan ekonomi terdiri dari 149 sks yang terbagi dalam mata kuliah pengembangan kepribadian sebanyak 10 sks, mata kuliah keilmuan dan ketrampilan sebanyak 87 sks, mata kuliah keilmuan dan keterampilan pilihan sebanyak 12 sks, mata kuliah keahlian berkarya sebanyak 22 sks, mata kuliah perilaku berkarya 14 sks dan mata kuliah berkehidupan bermasyarakat (KKN) sebanyak 4 sks. Kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian terdiri dari pendidikan agama, Bahasa Indonesia keilmuan, Bahasa Inggris profesi dan pendidikan Pancasila. Kelompok mata kuliah keilmuan dan ketrampilan adalah mata kuliah inti fakultas dan program studi.

Mata kuliah berkarya meliputi kemampuan dasar mengajar, pengembangan bahan ajar, perencanaan pembelajaran, penelitian pendidikan, strategi pembelajaran, evaluasi proses dan hasil belajar serta mata kuliah pengembangan media dan pembelajaran berbasis TIK. Mata

kuliah perilaku berkarya terdiri dari PPL keguruan, KKL dan Pendadaran dan skripsi (catalog UM 2010).

Setelah menyelesaikan studinya maka seorang mahasiswa berhak menyanggah gelar sarjana pendidikan. Dengan menyelesaikan studinya di LPTK seorang sarjana pendidikan telah memenuhi kualifikasi akademik untuk mengajar. Banyak guru baru menyatakan bahwa pengalaman mereka selagi kuliah sungguh mengesankan, menganggap saat itu merupakan fase berharga dalam program Pendidikan guru.

Meskipun ada yang menganggap bersifat teoritis sehingga kurang mempunyai nilai praktis. Dasar dari sikap yang terakhir ini adalah karena mata kuliah teori terlalu bersifat akademik dan mahasiswa belum menyadari sepenuhnya bahwa mata kuliah tersebut dapat membantunya kelak dalam mengajar (Mahmud, 1989). Pengajaran yang baik harus diamati dan dipraktikkan tetapi ada prinsip-prinsip pengajaran yang baik yang perlu diketahui guru, yang kemudian dapat diterapkan di ruang kelas (Slavin, 2008).

Menjadi guru profesional adalah menjadi pebelajar sepanjang hayat terutama tentang proses belajar mengajar dan tentang materi yang diajarkan. Guru profesional menjadikan dirinya guru sekaligus pebelajar, tidak akan berhenti belajar meskipun sudah mendapatkan gelar sarjana dan sertifikat mengajar (Parkay dan Stanford, 1992).

6. Implikasi Masalah Pendidikan Guru

Beberapa masalah yang dihadapi dalam pendidikan guru diantaranya:

- a. Kekurangan jumlah guru dalam tiap jenjang persekolahan dan per bidang studi. Jumlah guru yang dibutuhkan tidak seimbang dengan persediaan jumlah guru dibandingkan dengan proyeksi tambahan murid.
- b. Masalah mutu, bahwa kualifikasi guru yang diminta oleh SLTP/SLTA tidak cocok dengan kualifikasi yang telah tersedia dilihat dari kebutuhan bidang studi.
- c. Penyebaran guru tidak seimbang dengan permintaan daerah-daerah yang tersebar luas dengan sebagian besar guru yang ingin bekerja di kota-kota saja.
- d. Faktor waktu, bahwa terdapat *time lag* antara jangka waktu pendidikan *pre-service* dengan saat di mana para lulusan diperlukan.
- e. Karena kurangnya guru, maka pada umumnya guru mengajar melebihi beban resmi, hal mana akan berpengaruh pada hasil pendidikan.

- f. Kenyataan yang terlihat selama ini dan masih juga tergambarinya ialah lembaga-lembaga penataran masih bermacam ragam, belum dipusatkan pada suatu lembaga tertentu.

7. Solusi Permasalahan Pendidikan Guru

a. Orientasi, Sasaran, dan Fokus Pendidikan

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) harus betul-betul berorientasi kepada tenaga kependidikan, yakni mendidik calon guru dan tenaga kependidikan lainnya. Hal ini perlu mendapat penekanan, agar jangan sampai lulusannya bekerja di bidang lain dari luar profesi guru. Sasaran utama adalah mempersiapkan calon guru untuk SLTP dan SLTA, seperti: guru untuk SMU, sekolah kejuruan dan teknologi, SMP, dan SKT menengah, pendidikannya difokuskan pada prinsip penyatuan teori praktek.

b. Strategi Pendidikan

Menggunakan sistem multistrata, yang terdiri dari AI, AII, AIII SO1, SO2, S1. Program akan mengajar terdiri dari:

1. Akta I Guru Muda SLTP 40 Kredit (1 tahun sesudah SLTA)
2. Akta II Guru Muda SLTA 120 kredit (1 tahun sesudah memiliki 100 kredit semester), dan
3. Pelajaran nonkeguruan (1 tahun).

Program pendidikan guru terdiri dari:

1. SO1 (Sertifikasi Guru SLTP) – 80 kredit (2 tahun)
2. SO2 (Diploma Guru SLTA) – 100 kredit (3 tahun), dan
3. S1 (sarjana) dalam rangka program pendidikan tenaga kependidikan nonguru dalam pengertian dapat menjadi guru – 140 kredit selama 4 tahun, untuk Guru SLTA.

c. Proses pendidikan dalam lembaga pendidikan guru

Bila proses pendidikan seperti telah diterangkan di muka telah terpenuhi, para mahasiswa perlu menempuh proses kegiatan pendidikan sebagai berikut:

- 1) Proses pendidikan dalam kelas mengikuti kegiatan akademis sebagaimana mestinya, seperti mengikuti kuliah, membuat tugas-tugas karangan atau laboratorium, menempuh ujian tengah semester dan ujian akhir semester, diskusi, dan lain-lain.
- 2) Proses pendidikan ekstrakurikuler. Lembaga perlu memprogram kegiatan-kegiatan ekstra, seperti keolahragaan, kependidikan, kesenian, keterampilan, dan sebagainya.

- 3) Proses pendidikan praktek keguruan. Praktek di *micro teaching* dan selanjutnya di program *internship* di sekolah yang ditentukan.
- 4) Proses pendidikan luar sekolah. Mengikuti kegiatan KKN, Bimas Pendidikan Pemberantasan Buta Huruf, dan sebagainya.
- 5) Proses akhir pendidikan. Menempuh ujian akhir program dan proses penempatan. Direncanakan calon guru sudah akan ditetapkan 6 bulan sebelum yang bersangkutan menempuh ujian akhir dengan rekomendasi dari Dekan atau Rektor (Tisna Amijaya).

d. Evaluasi

Pengembangan program evaluasi perlu dilaksanakan seefektif mungkin, baik evaluasi terhadap kemajuan belajar calon guru maupun evaluasi terhadap program lembaga, agar dapat dijadikan umpan balik untuk perbaikan dan penyempurnaan.

e. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan

Dengan memperhatikan konsep di catatan dan penerapannya dalam lembaga pendidikan guru sekolah lanjutan, maka selanjutnya dilakukan studi tentang pengembangan kurikulum lembaga pendidikan guru sekolah lanjutan melalui tahap sebagai berikut.

1) Perencanaan kurikulum

a) Tujuan Kurikulum

Karena LPTK akan mengemban tugas dalam rangka pelaksanaan multistrata, maka seharusnya tujuan LPTK perlu ditata kembali. LPTK harus benar-benar berorientasi pada pendidikan tenaga kependidikan. LPTK merupakan suatu lembaga pendidikan sebagai lanjutan dari SLTA yang bertugas mempersiapkan calon guru yang mampu mengajar pada SLTA. Dasar dan tujuan umum pendidikan di Indonesia. Tujuan institusional disusun kembali sehingga terarah pada pengembangan pengetahuan, ketampilan, nilai dan sikap. Selanjutnya dirumuskan kembali tujuan program dan tujuan kurikuler tiap bidang studi/ mata kuliah. Perencanaan kurikulum bertitik tolak pula dari segi kompetensi apa yang akan dikembangkan. UPI Bandung pernah melakukan suatu studi, antara lain bersumber dari PBTE dan CBTE, yang berkesimpulan bahwa terdapat 109 kompetensi tingkah laku yang perlu dimiliki oleh guru.

Dalam perencanaan kurikulum model multistata seharusnya memperhatikan prinsip yang telah dikembangkan dalam pengembangan kurikulum, yakni berorientasi pada tahun, relevansi dengan kurikulum

SLTP/SLTA, bersifat luwes serta memperhatikan segi mutu, efisiensi, dan efektifitas program, merupakan kelanjutan dari kurikulum SLTA (prinsip kontinuitas) dan memperhatikan pula prinsip pendidikan seumur hidup.

b) Struktur Kurikulum

Setelah memperhatikan jenis-jenis program yang telah dikemukakan di atas, maka secara mikro program pendidikan profesional, program pendidikan kekhususan, dan program pendidikan luar kelas. Masing-masing disusun dengan pengimbangan kredit semester yang layak berdasarkan deskripsi jabatan serta persyaratan yang dituntutnya.

Bila LPTK diberi tugas untuk melaksanakan penataran bagi para guru SLTP dan SLTA, maka sudah tentu perlu direncanakan program penataran, baik penataran langsung maupun penataran tertulis.

c) Pemilihan mata pelajaran, disamping mempertimbangkan unsur disiplin keilmuan, tetapi juga relevansinya dengan kurikulum SLTP dan SLTA serta tuntutan profesi keguruan, sambil memperhatikan pula kemungkinan perluasan, peningkatan, pendalaman, dan penguasaan keahlian kognitif dan psikomotorik.

d) Pendekatan Aspek Metode Penyampaian

Perlu pula dikembangkan berbagai pendekatan metode penyampaian sesuai dengan bidang studi/kelompok mata kuliah.

- Untuk ilmu keguruan, perlu dikembangkan metode ilmu keguruan yang tepat untuk itu.
- Untuk ilmu-ilmu sosial, perlu dikembangkan pendekatan *inquiry* dan *affective technique*.
- Untuk IPA perlu dikembangkan metode eksperimentasi dan pendekatan *problem solving*.
- Untuk bidang bahasa perlu dikembangkan metode SAS, metode langsung dan tak langsung.
- Untuk keterampilan tahnik perlu dikembangkan metode kerja (kerja Lapangan dan praktek)
- Secara umum dapat dikembangkan penggunaan metode PPSI dan sistem pengajaran terintegrasi (*unit teaching*).
- Untuk praktek keguruan, perlu dikembangkan secara luas metode *macro teaching* dan latihan *internship*.

2) Aspek administrasi

- a. Harus ada ketepatan kebijaksanaan berikut perencanaan program-programnya diantara pengadaan guru, rekrutmen, pengangkatan,

penggajian, penempatan dan penugasan, serta pengembangan karirnya yang dilakukan inter-internasional.

- b. Pada waktunya, tugas dan tanggung jawab pendidikan *pre-service* dan *in-service* dipusatkan pada satu jenis lembaga yang produktif dan efisien.
- c. LPTK sebagai lembaga pendidikan guru tingkat tinggi seharusnya mengambil peranan aktif dan bekerja sama sebaik-baiknya dengan Kanwil Dikbud provinsi dan memberikan perangsangan yang sungguh-sungguh terhadap pendidikan guru. Kerja sama dalam hal penerimaan calon mahasiswa baru, pengangkatan dan penempatan para lulusan dan penyebarannya ke seluruh daerah yang membutuhkan, penyeleksian dan pemberian rekomendasi bagi para guru yang ingin melanjutkan kembali studinya ke LPTK harus juga diperhatikan.

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dilakukan di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa suatu profesi hakikatnya adalah suatu janji yang memiliki nilai-nilai etis yang mengandung unsur pengabdian pada masyarakat, melalui suatu pekerjaan tertentu yang menuntut keahlian tertentu pula. Kendatipun masalah profesionalisasi sampai sekarang masih sering dipertanyakan orang, namun sudah terdapat karakteristik yang jelas serta unsur-unsur yang terperinci yang bersifat mendukung pengertian profesionalisasi itu.

Demikian pula hanya jabatan guru juga telah ditegaskan sebagai suatu Profesi kependidikan karena sudah sewajarnya profesi ini mendapat tempat yang sepatutnya di tengah profesi lainnya. Profesi kependidikan menuntut kompetensi profesional terhadap para guru, hal mana menimbulkan persyaratan sertifikasi dan pengalaman yang luas antara lain diperoleh dari institusi pendidikan guru dan program pendidikan guru yang bermutu, relevan dengan kebutuhan lapangan, dan berlangsung secara berkesinambungan.

Pendidikan guru adalah suatu sistem yang terpadu dalam rangka sistem pendidikan nasional. Sebagai suatu sistem pendidikan guru meliputi sejumlah komponen yang saling berinteraksi dan berinterelasi satu sama lain, yang terdiri dari tujuan pendidikan guru, siswa, program, pendidikan guru, fasilitas dan perlengkapan, evaluasi, umpan balik, dan konteks sosial.

D. Latihan

1. Jelaskan asumsi dilaksanakannya pendidikan guru!
2. Jelaskan konsep sistem pendidikan guru!
3. Sebutkan komponen-komponen dalam sistem pendidikan guru!
4. Jelaskan syarat-syarat menjadi seorang guru profesional!
5. Jelaskan berbagai lembaga penyelenggara pendidikan keguruan!
6. Apa saja implikasi masalah dalam pendidikan guru?
7. Jelaskan solusi untuk permasalahan pendidikan guru yang ada di Indonesia!

BAB IX

PENDIDIKAN INTERNASIONAL

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari uraian materi pada bab ini, maka mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan tendensi dan latar belakang diselenggarakannya pendidikan internasional.
2. Menjelaskan asumsi pendidikan internasional.
3. Menjelaskan konteks pendidikan internasional dalam *inter cultural education*.
4. Menjelaskan hubungan antara pendidikan internasional dan pertukaran siswa/mahasiswa
5. Mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan internasional di Indonesia
6. Mengidentifikasi implikasi masalah dalam pendidikan internasional
7. Memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan pendidikan internasional

B. Pendahuluan

Pendidikan sebagai salah satu lembaga sosial yang tertua selalu mengalami dampak perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Bila kita perhatikan perkembangan pendidikan di dunia, maka akan tampak bahwa terutama pada tahun 1960-an dan 1970-an pendidikan tidak hanya merefleksikan segala dinamika, tetapi juga segala kontradiksi sebagai ciri keadaan seluruh dunia pada kurun waktu itu.

Di dalam dasawarsa itu pula penampilan Negara-negara berkembang dalam berbagai forum internasional bertambah menonjol dengan bobot peran lebih meningkat. Terbentuknya kelompok-kelompok Negara dalam berbagai bentuk kerja sama, serta munculnya kekuatan baru yakni *Multinational Corporation*, menimbulkan persaingan-persaingan yang hebat dalam bidang apapun juga termasuk pendidikan dengan skala dunia.

Semua gejala tersebut mempunyai segala tuntutan terhadap pendidikan di seluruh dunia, yang sering karena kompleksnya permasalahan dan sering pula membawa fase-fase baru sama sekali, jawaban pendidikan

terhadap tantangan-tantangan itu kurang memuaskan hingga terjadi berbagai bentuk kesenjangan, di antara tawaran dan permintaan itu. Untuk memelihara fungsinya di dalam masyarakat dengan programnya yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang cepat berkembang dan mungkin berubah dalam corak, pendidikan harus selalu menyesuaikan diri (*ajust*), dengan segala pembaharuan (*innovations*) yang dipelukan.

Hampir tidak ada satupun lembaga Pendidikan kita di Kalimantan Selatan yang bertaraf Internasional. Dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, semua masih bertaraf nasional. Hampir seluruh sekolah kita di daerah ini belum dapat disebut modern, bahkan cenderung masih bersifat tradisional.

Pada memasuki era global dan pasar bebas, seharusnya sudah ada lembaga pendidikan kita di daerah ini yang mampu bersaing secara internasional dan global, sekurang-kurangnya ada satu TK sampai SMA atau sederajat. Kendalanya yang klasik adalah keterbatasan dana, fasilitas, sumber daya manusia dan sarana lainnya belum siap untuk mendirikan sekolah bertaraf internasional.

C. Uraian Materi

8. Tendensi dan Latar Belakang Pendidikan Internasional

Belakangan ini muncul tren di beberapa sekolah yang mengklaim dirinya menerapkan pendidikan internasional. Dengan mengadopsi kurikulum asing dan mendatangkan para mengajar dari negara asal kurikulum, sekolah-sekolah ini berani menyebutkan bahwa kurikulum mereka berkualitas pendidikan internasional.

Sebenarnya standar pendidikan internasional bukan sekedar pendidikan yang menggunakan bahasa internasional, bukan hanya pada kulitnya. Yang hanya mempromosikan penggunaan bahasa asing. Pendidikan internasional harus dimaknai dengan pendidikan yang menjadikan anak didiknya berpikir secara terbuka dan internasional, (*Open dan international minded*). *International minded* di mana di dalamnya para anak didiknya kelak akan menjadi manusia yang 'berwarga negara internasional' atau istilahnya sebagai *global citizen*. Jadi, pendidikan internasional bukan sekedar kulit belaka, namun lebih parah esensinya dalam pembelajaran.

Dikaitkan dengan perang dunia kedua terjadi kehancuran kebudayaan, peradaban, dan lain-lain, bagaimana upaya upaya perdamaian dunia yang abadi? Banyak jalan yang dilakukan, salah satu diantaranya terjadi pertukaran budaya antar bangsa-bangsa (*Inter Cultural*) dalam wujud umumnya, adalah pendidikan yang berarti *Inter Cultural Education*, dengan kata lain *International Education*. Dalam pelaksanaannya biasanya mencoba

memahami dan membanding-bandingkan di antara budaya-budaya yang ada di setiap bangsa, sehingga disebut *pula Comparatif Intenational Education*.

Dalam pendidikan internasional, kurikulum yang diterapkan boleh-boleh saja kurikulum nasional, tetapi di dalamnya disisipkan pendidikan untuk berinternasional. Artinya, anak didik dijejali dengan pendidikan akan hidup dalam suasana damai di dunia, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, diberikan makna perdamaian internasional, dan arah pendidikan yang lebih baik. Bentuk pendidikan semacam ini bukan dalam tingkat pendidikan teori, namun harus diterapkan secara nyata.

9. Asumsi Pendidikan Internasional

Ada perbedaan yang signifikan antara wawasan orang yang maju (*modern*) dengan orang yang tertinggal (*tradisional*), termasuk pemimpin, pengusaha dan tokoh masyarakat terhadap beberapa hal. Mereka yang maju mempunyai wawasan sangat luas dan maju ke depan. Mereka dapat melihat kepentingan masyarakat, bangsa dan negara yang lebih luas untuk puluhan tahun ke depan. Sebaliknya, mereka yang tertinggal mempunyai wawasan sempit dan terbatas. Mereka hanya mampu melihat kepentingan pribadi dan kelompok dalam lingkup yang sempit untuk jangka pendek.

Perbedaan masyarakat atau bangsa yang maju (*modern*) selain melaksanakan pembangunan fisik mereka membangun mental generasi muda. Untuk itu, mereka tidak ragu mengeluarkan anggaran yang lebih besar untuk pendidikan. Sebaliknya, masyarakat atau bangsa yang tertinggal (*tradisional*) hanya mengutamakan pembangunan fisik.

Memang pembangunan fisik seperti gedung, jembatan, jalan dan infrastruktur lainnya dalam beberapa bulan, begitu selesai segera dapat dirasakan. Sementara nonfisik, seperti pembangunan moral dan pendidikan tidak dapat dilihat dan tidak dapat dirasakan dalam jangka waktu satu atau dua tahun. Karena itu, kebanyakan mereka lebih mengutamakan dan lebih tertarik menginvestasikan dana untuk pembangunan fisik daripada untuk pembangunan pendidikan.

Mari kita amati masyarakat di sekitar kita, orang tua yang maju (*modern*) lebih senang anaknya pergi ke sekolah kendati setiap hari harus mengeluarkan uang untuk belanja dan taksi. Sementara itu, anaknya yang tidak membawa pulang uang dan tidak menghasilkan apa-apa, kecuali mendapat ilmu yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Tetapi sebaliknya, orang tua yang tertinggal (*tradisional*) lebih senang melihat anaknya pergi menjual koran, menjadi buruh, mengemis atau mengamen, sebab anaknya membawa uang setiap kali pulang.

Perbedaan seperti itulah barangkali yang menyebabkan pejabat, pengusaha dan tokoh masyarakat kita di daerah ini tidak berminat

membangun sekolah bertaraf internasional . sekolah jenis ini memerlukan biaya yang sangat besar, di sisi lain hasilnya tidak dapat dilihat dalam waktu tingkat.

Selain itu beberapa asumsi yang mendasari pelaksanaan pendidikan Internasional adalah sebagai berikut:

- a. Hidup berdampingan secara dinamis jauh akan lebih menguntungkan dari pada bermusuhan antara bangsa dengan bangsa lain.
- b. Memahami budaya orang lain akan memperkaya budaya sendiri.

10. Pendidikan Internasional dalam *Inter Cultural Education*

Konsep pendidikan *Intercultural* di negara-negara yang menganut konsep demokratis seperti Amerika Serikat dan Kanada, bukan hal yang baru lagi. Mereka telah melaksanakannya khususnya dalam upaya melenyapkan diskriminasi rasial antara orang kulit putih dan kulit hitam, yang bertujuan memajukan dan memelihara integritas nasional.

Di Amerika sebagai contohnya muncul serangkaian konsep tentang pluraitas yang berbeda-beda, mulai dari *melting pot* sampai *Intercultural*. Sejak Columbus menemukan benua Amerika, berbagai macam bangsa telah menempati benua itu. Penduduk yang sudah berada di sana sebelum bangsa-bangsa Eropa membentuk koloni-koloni mereka di Amerika Utara, terdiri dari berbagai macam suku yang berbeda-beda bahasa dan budayanya. Tetapi di mata bangsa Anglo-Sakson yang menyebarkan koloni di abad ke-17, tanah di Negara baru itu ada kawasan tak bertuan dan bangsa-bangsa yang ditemui di benua baru itu tidak lebih dari mahluk primitif yang merupakan bagian dari alam yang mesti ditaklukkan. Dari perspektif kaum Puritan yang menjadi acuan utama sebagian besar pendatang dari Inggris tersebut, berbagai suku bangsa yang dilabel secara generik dengan nama "Indian" adalah bangsa kafir pemuja dewa yang membahayakan kehidupan komunitas berbasis agama tersebut. Di sini terlihat bagaimana pandangan berperspektif tunggal yang datang dari budaya tertentu membuat mata terhadap kenyataan keragaman yang ada.

Amerika Serikat ketika ingin membentuk masyarakat baru-pasca kemerdekaannya (4 juli 1776) baru disadari bahwa masyarakatnya terdiri dari berbagai ras dan asal negara yang berbeda. oleh karena itu, dalam hal ini Amerika mencoba mencari terbosan baru yaitu dengan menempuh strategi menjadikan sekolah sebagai pusat sosialisasi dan pembudayaan nilai-nilai baru yang dicita-citakan. Melalui pendekatan inilah, dari SD sampai perguruan tinggi, Amerika Serikat berhasil membentuk bangsanya yang dalam perkembangannya melampaui masyarakat induknya yaitu Eropa. Kaitannya dengan nilai-nilai kebudayaan yang perlu diwariskan dan

dikembangkan melalui sistem pendidikan pada suatu masyarakat maka Amerika Serikat memakai sistem demokrasi dalam pendidikan yang dipelopori oleh John Dewey. Intinya adalah toleransi tidak hanya diperuntukkan untuk kepentingan bersama tetapi juga menghargai kepercayaan dan interaksi dengan anggota masyarakat.

Intercultural secara etimologi marak digunakan pada tahun 1950-an di Kanada. Menurut *Longer Oxford Dictionary* istilah “*multiculturalism*” merupakan deviasi dari kata “*multicultural*”. Kamus ini mengikuti kalimat dari surat kabar Kanada, *Montreal Times* yang menggambarkan masyarakat Montreal sebagai masyarakat “*multicultural* dan *multi-lingual*”.

Sedangkan wacana tentang pendidikan *Intercultural*, secara sederhana pendidikan *Intercultural* dapat didefinisikan sebagai “pendidikan untuk/tentang keragaman kebudayaan dalam meresponi perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Paulo Freire, pendidikan bukan merupakan “menara gading” yang berusaha menjauhi realitas sosial dan budaya. Pendidikan menurutnya, harus mampu menciptakan tatanan masyarakat yang terdidik dan berpendidikan, bukan sebuah masyarakat yang hanya mengagungkan prestise sosial sebagai akibat kekayaan dan kemakmuran yang dialaminya.

Pendidikan Intrakultural (*multicultural education*) merupakan respon terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah, bagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok. Dalam dimensi lain, pendidikan Interkultural merupakan pengembangan kurikulum dan aktivitas pendidikan untuk memasuki berbagai pandangan, sejarah, presentasi dan perhatian terhadap orang-orang non Eropa (Hilliard, 1991-1992). Sedangkan secara luas pendidikan *Intercultural* itu mencakup seluruh siswa tanpa membedakan kelompok-kelompoknya seperti gender, etnik, ras, budaya, strata sosial dan agama.

Selanjutnya James Banks (1994) menjelaskan bahwa pendidikan *Intercultural* memiliki 5 dimensi yang saling berkaitan:

1. *Content integration* yaitu mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep dasar, generalisasi dan teori dalam mata pelajaran/disiplin ilmu.
2. *The knowledge Construction Process* yaitu membawa siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran (disiplin).
3. *An Equity Paedagogy* yaitu menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi

akademik siswa yang beragam baik dari segi ras, budaya ataupun sosial.

4. *Prejudice reduction* yaitu mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajaran mereka.
5. Melatih kelompok untuk partisipasi dalam kegiatan olahraga, berinteraksi dengan seluruh staff dan siswa yang berbeda etnis dan ras dalam upaya menciptakan budaya akademik.

Dalam aktifitas pendidikan manapun, peserta didik merupakan sasaran (onjek) dan sekaligus sebagai subjek pendidikan. Oleh karena itu dalam memahami hakikat peserta didik, para peserta pendidik perl dilengkapi pemahaman tentang ciri-ciri umum peserta didik. Setidaknya secara umum peserta didik memiliki empat ciri yaitu;

1. Peserta didik dalam keadaan sedang berdaya, maksudnya ia dalam keadaan berdaya untuk menggunakan kemampuan, kemauan dan sebagainya.
2. Mempunyai keinginan untuk berkembang ke arah dewasa.
3. Peserta didik mempunyai latar belakang yang berbeda.
4. Peserta didik melakukan penjelajahan terhadap alam sekitarnya dengan potensi-potensi dasar yang dimiliki secara individu.

Menurut Tilaar, pendidikan Intercultural berawal dari berkembangnya gagasan dan kesadaran tentang “intrekulturalisme” seusai perang dunia II. Kemunculan gagasan dan kesadaran “interkulturalisme” ini selian terkait dengan perkembangan politik internasional menyangkut HAM, kemerdekaan dari kolonialisme, dan diskriminasi rasial dan lain-lain, juga karena meningkatnya pluralisme di negara-negara Barat sendiri sebagai akibat dari peningkatan migrasi dari negara-negara baru merdeka ke Amerika dan Eropa.

Mengenai fokus pendidikan intercultural, Tilaar mengungkapkan bahwa dalam program pendidikan Intercultural, fokus tidak lagi diarahkan semata-mata kepada kelompok rasial, agama dan kultural domain atau mainstream. Fokus seperti ini pernah menjadi tekanan pada pendidikan interkultural yang menekankan peningkatan pemahaman dan toleransi individu-individu yang berasal dari kelompok minoritas terhadap budaya mainstream yang dominan, yang pada akhirnya menyebabkan orang-orang dari kelompok minoritas terintegrasi ke dalam masyarakat mainstream. Pendidikan Intercultural sebenarnya merupakan sikap “peduli” dan mau mengerti (*difference*), atau “*politics of recognition*” politik pengakuan terhadap orang-orang dari kelompok minoritas.

Dalam konteks itu pendidikan Intercultural melihat masyarakat secara lebih luas. Berdasarkan pandangan dasar bahwa sikap “*indiference*” dan

“*Nonrecognition*” tidak hanya berakar pada ketimpangan struktur rasial, tetapi paradigma pendidikan Intercultural mencakup subjek-subjek mengenai ketidakadilan, kemiskinan, penindasan dan keterbelakangan kelompok-kelompok minoritas dalam berbagai bidang: sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. paradigma seperti ini akan mendorong tumbuhnya kajian-kajian tentang ‘ethnic studies’ untuk kemudian menemukan tempatnya dalam kurikulum pendidikan sejak dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Tujuan inti dari pembahasan tentang subjek ini adalah mencapai pemberdayaan (*empowerment*) bagi kelompok-kelompok minoritas dan disadventaged.

Istilah “pendidikan Intercultural” dapat digunakan baik pada tingkat deskriptif dan normatif, yang menggambarkan isu-isu dan masalah-masalah pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat intercultural. Lebih jauh ia juga mencakup pengertian tentang pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi pendidikan dalam masyarakat intercultural. Dalam konteks deskriptif ini, maka kurikulum pendidikan intercultural mestinya mencakup subjek-subjek seperti: toleransi, tema-tema tentang perbedaan ethno-kultural dan agama; bahaya diskriminasi; penyelesaian konflik dan mediasi; HAM; demokratis dan pluralistas; kemanusiaan universal dan subjek-subjek lain yang relevan.

Dalam konteks teoritis, belajar dari model-model pendidikan intercultural yang pernah ada dan sedang dikembangkan oleh negara-negara maju dikenal lima pendekatan, yaitu: pertama, pendidikan mengenai perbedaan-perbedaan kebudayaan atau intercultural. Kedua, pendidikan mengenai perbedaan-perbedaan kebudayaan atau pemahaman kebudayaan. Ketiga, pendidikan bagi pluralisme kebudayaan. Keempat, pendidikan dwi-budaya. Kelima, pendidikan Intercultural sebagai pengalaman moral manusia.

Di Indonesia pendidikan Intercultural relatif baru dikenal sebagai suatu pendekatan yang dianggap lebih sesuai bagi masyarakat Indonesia yang heterogen, terlebih pada masa otonomi dan desentralisasi yang baru dilakukan. Pendidikan Intercultural yang dikembangkan di Indonesia sejalan pengembangan demokrasi yang dijalankan sebagai counter terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Apabila hal itu dilaksanakan dengan tidak berhati-hati justru akan menjerumuskan kita ke dalam perpecahan nasional.

Menurut Azyumardi Azra, pada level nasional, berakhirnya sentralisme kekuasaan yang ada pada masa orde baru memaksakan “monokulturalisme” yang nyaris seragam, memunculkan reaksi balik, yang bukan tidak mengandung implikasi-implikasi negatif bagi rekonstruksi kebudayaan Indonesia yang Intercultural. Berbarengan dengan proses

otonomisasi dan desentralisasi kekuasaan pemerintahan, terjadi peningkatan gejala “provinsialisme” yang hampir tumpang tindih dengan “etnisitas”. Kecenderungan ini, jika tidak terkendali akan dapat menimbulkan tidak hanya disintegritas sosio-kultural yang amat parah, tetapi juga disintegrasi politik.

Model pendidikan di Indonesia maupun di negara-negara lain menunjukkan keragaman tujuan yang menerapkan strategi dan sarana yang dipakai untuk mencapainya. Sejumlah kritikus melihat bahwa revisi kurikulum sekolah yang dilakukan pada program pendidikan Intercultural di Inggris dan beberapa tempat di Australia dan Kanada, terbatas pada keragaman budaya yang ada, jadi terbatas pada dimensi kognitif.

Penambahan informasi tentang keragaman budaya merupakan model pendidikan intercultural yang mencakup revisi dan materi pembelajaran, termasuk revisi buku-buku teks. Terlepas dari kritik atas penerapannya di beberapa tempat, revisi pembelajaran seperti di Amerika Serikat merupakan strategi yang dianggap paling penting dalam reformasi pendidikan dan kurikulum. Penulisan kembali sejarah Amerika dari perspektif yang lebih beragam merupakan suatu agenda pendidikan yang diperjuangkan intelektual, aktivis dan praktisi pendidikan. Di Jepang aktivis kemanusiaan melakukan advokasi serius untuk merevisi buku sejarah, terutama yang menyangkut peran Jepang pada perang dunia II di Asia. Walaupun belum diterima, usaha ini sudah mulai membuka mata sebagian masyarakat karna pentingnya perspektif baru tentang perang, agar tragedi kemanusiaan tidak terulang kembali. Sedangkan di Indonesia masih diperlukan usaha yang panjang dalam merevisi buku-buku teks agar mengakomodasi kontribusi dan partisipasi yang inklusif bagi warga dan berbagai latarbelakang dalam pembentukan Indonesia. Indonesia juga memerlukan pula materi pembelajaran yang bisa mengatasi “dendam sejarah” di berbagai wilayah.

Model lainnya adalah pendidikan Intercultural tidak sekedar merevisi materi pembelajaran tetapi melakukan reformasi dalam sistem pembelajaran itu sendiri. Affirmative action dalam seleksi siswa sampai rekrumen pengajar di Amerika adalah salah satu strategi untuk membuat perbaikan ketimpangan struktural terhadap kelompok minoritas. Contoh yang lain adalah model “sekolah pembauran” Iskandar Muda di Medan yang memfasilitasi interaksi siswa dari berbagai latar belakang budaya dan menyusun program anak asuh lintas kelompok. Di Amerika Serikat bersamaan dengan masuknya wacana Intrecultural, dilakukan berbagai lokakarya di sekolah-sekolah maupun di masyarakat luas untuk meningkatkan kepekaan sosial, toleransi dan mengurangi prasangka antar kelompok.

Untuk mewujudkan model-model tersebut, pendidikan Intercultural di Indonesia perlu memakai kombinasi yang ada, agar seperti yang diajukan Gorski, pendidikan Intercultural dapat mencakup tiga hal jenis transformasi,

yakni: (1) transformasi diri; (2) transformasi sekolah dan proses belajar mengajar dan (3) transformasi masyarakat.

Menyusun pendidikan Intercultural dalam tatanan masyarakat yang penuh permasalahan antar kelompok mengandung tantangan yang ringan. Pendidikan intercultural tidak sebatas “merayakan keagamaan” belaka. Apalagi jika tatanan masyarakat yang masih penuh diskriminasi dan bersifat rasis. Dapat pula dipertanyakan apakah mungkin meminta siswa yang dalam kehidupan sehari-hari mengalami diskriminasi atau penindasan karena warna kulitnya atau perbedaannya dari budaya yang dominan tersebut? Dalam kondisi demikian pendidikan intercultural lebih tepat diarahkan sebagai advokasi untuk menciptakan masyarakat yang toleran dan bebas toleransi.

Ada beberapa pendekatan dalam proses pendidikan Intercultural, yaitu:

Pertama, tidak lagi terbatas pada menyamakan pandangan pendidikan (*edukation*) dengan persekolahan (*schooling*) atau pendidikan Intercultural dengan program-program sekolah formal. Pandangan yang lebih luas mengenai pendidikan sebagai transisi kebudayaan membebaskan pendidikan dari asumsi bahwa tanggung jawab primer mengembangkan kompetensi kebudayaan di kalangan anak didik semata-mata berada di tangan mereka dan justru semakin banyak pihak yang bertanggung jawab karena program-program sekolah.

Kedua, menghindari pandangan yang menyamakan kebudayaan-kebudayaan dengan kelompok etnik adalah sama. Artinya tidak perlu lagi mengasosiasikan kebudayaan semata-mata dengan kelompok-kelompok etnik sebagaimana yang terjadi selama ini. Secara tradisional, para pendidik mengasosiasikan kebudayaan hanya dengan kelompok-kelompok sosial yang relatif *sufficient*, ketimbang dengan sejumlah orang yang secara terus menerus dan berulang-ulang terlibat satu sama lain dalam satu atau lebih kegiatan. Dalam konteks pendidikan intercultural, pendekatan ini diharapkan dapat mengilhami para penyusun program-program pendidikan Intercultural untuk melenyapkan kecenderungan memandang anak didik secara *stereotip* menurut identitas etnik mereka dan akan meningkatkan eksplorasi pemahaman yang lebih besar mengenai kesamaan dan akan meningkatkan eksplorasi pemahaman yang lebih besar mengenai kesamaan dan perkembangan di kalangan anak didik dari berbagai kelompok etnik.

Ketiga, karena pengembangan kompetensi dalam suatu “kebudayaan baru” biasanya membutuhkan interaksi inisiatif dengan orang-orang yang sudah memiliki kompetensi, bahkan dapat dilihat

jelas bahwa upaya-paya untuk mendukung sekolah-sekolah yang terpisah secara etnik adalah antitesis terhadap tujuan pendidikan intercultural. Mempertahankan dan memperluas solidaritas kelompok adalah menghambat sosialisasi ke dalam kebudayaan baru. Pendidikan bagi pluralisme budaya dan pendidikan Intercultural tidak disamakan secara logis.

Keempat, pendidikan Intercultural meningkatkan kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Kebudayaan mana yang akan diadopsi ditentukan oleh situasi.

Kelima, kemungkinan bahwa pendidikan (baik dalam maupun luar sekolah) meningkatkan kesadaran tentang kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Kesadaran seperti ini kemudian akan menjauhkan kita dari konsep dwi budaya atau dikotomi antara pribumi dan non-pribumi. Dikotomi semacam ini bersifat membatasi individu untuk sepenuhnya mengekspresikan diversitas kebudayaan. Pendekatan ini meningkatkan kesadaran akan intercultural sebagai pengalaman normal manusia. Kesadaran ini mengandung makna bahwa pendidikan intercultural berpotensi untuk menghindari dikotomi dan mengembangkan apresiasi yang baik melalui kompetensi kebudayaan yang ada pada diri anak didik.

Pendekatan konteks keindonesiaan dan kebhinekaan, kelima pendekatan tersebut haruslah diselaraskan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Masyarakat adalah kumpulan manusia atau individu-individu yang terlewatkan dalam kelompok sosial dengan suatu tantangan budaya atau tradisi tertentu. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Zakiah Drajat yang menyatakan bahwa masyarakat secara sederhana diartikan sebagai kumpulan individu dan kelompok yang terikat oleh kesatuan negara, kebudayaan dan agama.

Jadi dapat dipahami inti masyarakat adalah kumpulan besar individu yang hidup dan bekerja sama dalam masa relatif lama, sehingga individu-individu dapat memenuhi kebutuhan mereka dan menyerap watak sosial. Kondisi itu selanjutnya membuat sebagian mereka menjadi komunitas terorganisir yang berpikir tentang dirinya dan membedakan ekstensinya dari ekstensi komunitas. Dari sisi lain, apabila kehidupan di masyarakat berarti interaksi antara individu dan lingkungan sosialnya. Maka yang menjadikan pembentukan individu tersebut adalah pendidikan atau dengan istilah lain masyarakat pendidik.

11. Pendidikan Internasional dan Pertukaran Siswa/Mahasiswa

Program pertukaran mahasiswa (*studentexchange*) merupakan salah satu program dari pemerintahan Jepang dalam mengembangkan promosi perguruan tingginya kepada masyarakat dunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang dijadikan tujuan promosi tersebut.

Pemerintahan Jepang banyak menawarkan program *student exchange* kepada perguruan-perguruan tinggi yang ada di Indonesia diantaranya adalah ITB, IPB, UGM, dan lain-lain. Untuk perguruan tinggi ITB, pada khususnya banyak program yang ditawarkan yang menyangkut program pertukaran mahasiswa ini diantaranya adalah, *Japanese Universities Study of Science and Technology (JUSST)*, yang ditawarkan oleh *The University of Electro Communications (UEC)*, yang setiap tahunnya sekitar 4 orang mahasiswa yang diikutsertakan dalam program ini, *Young Scientist Exchange Program (YSEP)* dan TATO yang ditawarkan *Tokyo Institute of Technology* dengan jumlah 2 orang untuk YSEP dan satu orang untuk program TATO, serta program pertukaran mahasiswa yang khusus perdepartemen seperti Teknik Geodesi, Teknik Kimia, Teknik Elektro dan yang lainnya, yang hampir setiap tahun mengirimkan salah satu mahasiswanya untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa tersebut. Khusus untuk Teknik Kimia ada seorang dosen yang langsung menjalin kerjasama dengan salah satu perguruan tinggi di Jepang, yang salah satu bimbingannya akan dikirim selama setahun ke Jepang.

Mengenai beasiswa yang diperoleh hampir seluruh peserta program pertukaran mahasiswa ini memperoleh beasiswa dari AIEJ (*Association of International Education Japan*) sebesar 80.000 yen, dengan uang akomodasi pada awal kedatangan 25.000 yen.

Adapun cara untuk mengetahui kegiatan ini bermacam-macam, untuk program JUSST di seleksi pesertanya diselenggarakan oleh UEC sendiri, jadi para calon peserta hanya mengirim dokumen yang diperlukan kepada *International Student Office (ISO)* di ITB, dan ISO yang akan mengirim ke ISO-UEC. Dokumen yang paling ditekankan dan paling berpengaruh dalam penilaiannya adalah indeks Prestasi.

Sedangkan untuk program YSEP dan TATO penyeleksiannya terdiri dari dua tahap seleksi di ITB dan seleksi dokumen di *titech (Tokyo Institute of Technology)* itu sendiri, dan point yang paling ditekankan adalah di samping indeks prestasi juga ada tidaknya professor yang membimbing si calon peserta tersebut. Untuk teknik geodesi yang dikirim adalah mahasiswa terbaiknya saja, karena ini menyangkut kerjasama antar departemen. Untuk teknik kimia tergantung ada dosen yang mempunyai hubungan dengan perguruan tinggi yang ada di Jepang itu sendiri,

sedangkan untuk tehnik elektro yang ke Nagoya University masih belum paham.

Waktu untuk mengajukan diri menjadi salah satu calon program pertukaran mahasiswa ini yaitu antara bulan April dan Mei, sedangkan pengumumannya sekitar bulan Juli. Sedangkan kegiatan yang dilakukan oleh setiap program berbeda-beda, untuk program JUSST, programnya terbagi menjadi dua bagian. Pertama untuk program penelitian dan yang kedua adalah program perkuliahan, bahasa pengantar perkuliahan adalah bahasa inggris. Sedangkan untuk program YSEP dan SATO adalah program hanya penelitian saja, begitu juga dengan program antar departement programnya hanya bekerjasama penelitian saja. Khusus untuk program JUSST meskipun pada awal keberangkatannya tidak mempunyai laboratorium, tapi kalau yang master atau *undergraduate 4 years* bisa mencari professor ketika program berlangsung.

Untuk peserta program pertukaran mahasiswa, karena beasiswanya yang relatif sedikit, dan ini merupakan program pertukaran mahasiswa yang notabene bukan hanya untuk belajar bidangnya saja, tapi juga meliputi pembelajaran mengenai budaya dan yang lainnya, maka disarankan membuat proposal pribadi sebagai pemenuhan kebutuhan anggaran pribadi selama hidup di Jepang, terlebih terhadap orang yang hidup di daerah Tokyo, dengan beasiswa tersebut diperhitungkan tidak akan cukup untuk hidup di Tokyo, terkecuali kalau tinggal di Internasional House.

12. Pelaksanaan Pendidikan Intenasional di Indonesia

Belum hilang dari ingatan kita tentang peledakan bom di depan kedubes Australia 10 september lalu, kembali kita didera oleh peledakan bom yang meski bukan terjadi di negara kita, namun meledaknya persis di depan Kedubes RI di Paris. Kembali nama Indonesia dikaitkan dengan "bom". Mungkin juga ada yang mengkaitkannya dengan isu terorisme di Indonesia.

Lantas apa hubungannya dengan judul tulisan ini? Jelas ada kaitannya, karena siapapun pelaku pemboman itu pastilah orang yang terdidik. Entah dengan sistem pendidikan yang bagaimana, dan dengan tujuan pendidikan yang seperti apa.

Apabila menjelang pembentukan kabinet di hari-hari terakhir ini, muncul beberapa nama dijagokan sebagai menteri, dalam hal ini Menteri Pendidikan. Siapapun beliau yang terpilih nantinya, yang pasti sudah lolos *fit and proper test* oleh presiden, tidaklah perlu diperdebatkan. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita meningkatkan mutu pendidikan di negara kita, sehingga kita mempunyai manusia yang berkualitas dan memiliki rasa kepedulian akan sesama yang tinggi. Sehingga nantinya takkan ada lagi

perilaku pemboman yang berasal dari warga negara Indonesia yang ironisnya mengakibatkan korban duka bagi bangsanya sendiri.

Dulu menteri pendidikan selalu diidentifikasi dengan perubahan kurikulum. Setiap ada pergantian kabinet dan perubahan jajaran menteri, pastilah akan diikuti oleh perubahan kurikulum. Namun, dengan dicangkannya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) diharapkan bahwa kurikulum pendidikan tidak akan selalu berubah dan berubah.

KBK sendiri masih agak dirisaukan oleh beberapa pendidik. Bukan karena KBK-nya, namun sosialisasinya yang masih dianggap kurang bergema. Tugas para pendidik sekarang adalah memahami arti KBK sesungguhnya dan sebesar-besarnya sehingga para pendidikan akan mampu mengimplementasikan sistem tersebut ke dalam pembelajaran dengan para anak didiknya.

Namun tugas pendidik bukan hanya ada dibeban para pendidik (guru) saja, namun lapisan masyarakat, lingkungan kecil (keluarga) dan pemerintah mengambil peranan dalam mendidik anak bangsa.

Dalam *four pillars of education in UNESCO*, ada 4 dasar pendidikan, yakni: *Learning to know* (Belajar untuk mengetahui); *Learning to Do* (Belajar untuk bertindak); *Learning to Be* (Belajar untuk menjadi (seseorang)); dan *Learning to Live Together* (Belajar untuk hidup bersama). Empat dasar ini adalah pegangan kita dalam menerapkan semua kurikulum pendidikan di negara kita.

Pertanyaan sekarang adalah apakah ada sistem pendidikan kita sudah mengacu ke sana? Apakah dengan dicanangkannya sistem baru, Kurikulum Berbasis Kompetensi, kelak akan muncul manusia Indonesia yang berbudi luhur dan berpikiran internasional? Semua ini pekerjaan rumah kita bersama.

Program dasar *Organisasi Internasional Baccalaureate/ IB-PYP (internasional Baccalureate-Primary Years Programme)* adalah *PYP-Primary Years Programme*, program yang berasal dari organisasi yang non profit dan bermarkas di Janewa. Ada lima belahan dunia internasional *Baccalaurate* menjadi anak cabang IBO (*Internasioanal baccalaureate organization*), dan Indonesia masuk belahan wilayah Asia pasifik yang bermarkas di Singapura. Program ini sudah diimplementasikan oleh lebih dari 1500 sekolah di lebih dari 115 negara. PYP didesain untuk anak didik usia 3-12 tahun, yakni setara dengan pra-sekolah/ TK dan Tingkat dasar/ SD. Selain PYP, IBO mempunyai program MYP (*Middle years Programme*) untuk para didik seusia SMP dan SMU (11-16 tahun); dan Diploma untuk usia 16-18 tahun.

Di Indonesia telah banyak sekolah yang menerapkan program ini. Khususnya yang berada di kota-kota besar, mulai dari Medan, Jakarta, Bogar, Bandung, Surabaya dan Bali, program ini bukan hanya

diimplementasikan di sekolah-sekolah dengan setting internasional saja tetapi bisa juga diterapkan di sekolah-sekolah berseting berbeda, bahkan di Australia, program ini juga ditetapkan di sekolah milik pemerintah. Kebanyakan sekolah di Indonesia yang menerapkan program PYP adalah yang dulunya mengidentifikasikan dirinya dengan label Sekolah National-Plus. Meskipun sampai kini masih banyak juga yang memperkenalkan diri sekolahnya dengan sebutan Sekolah nation-Plus. Program PYP benar-benar program berstandar internasional dalam arti yang sesungguhnya, karena dalam program ini selain menerapkan pelajaran Bahasa Inggris sebagai satu dari mata pelajarannya, Bahasa Ibu, dalam hal ini Bahasa Indonesia-bila ditempatkan di Indonesia, masih harus dipakai anak didik harus tetap diperkenalkan dengan budaya lokal dan harus tetap diajak berpikir tentang apa yang ada di sekitar lokalnya. Namun pada saat yang bersamaan, program ini membuat anak didik untuk berpikir secara internasional dengan cara mengajak mereka untuk peduli akan situasi yang ada di dunia luar – *Act locally, think globally*. Juga dengan cara mengajarkan kepada anak didik adanya perbedaan di antara sesama, dan dengan cara menerapkan profil-profil manusia yang mengarah ke dalam kehidupan yang baik.

Profil siswa PYP adalah yang berpengetahuan (*knowledgeable*); punya rasa ingin tahu (*inquirer*) yang berani mengambil resiko (*a risk-taker*); yang peduli (*caring*) namun tetap berprinsip (*principle*); pemikir sejati (*thinker*); yang berpikir terbuka (*open minded*); seimbang secara fisik – mental-rohani (*well-balanced*); mampu berkomunikasi (*communicator*); juga bisa berfleksibilitas (*reflective*).

Dalam PYP, pelajaran terintegrasi (dengan sebutan *interdisciplinary*) dengan halus. Antara pelajaran Bahasa (baik Bahasa Indonesia dan Inggris), Pendidikan Sosial dan Ilmiah, Seni dan Keterampilan dan Pendidikan jasmani terjalin korelasi yang baik karena para siswa di tingkat level yang berada dalam satu tahun ajaran, mulai dari membahas diri kita sebagai manusia sampai dengan pembahasan tentang kehidupan kita di bumi untuk berbagi dan menjaga sumber-sumber kekayaan alam yang terbatas ini dengan sesama. Enam unit tersebut adalah *Who WE Are/ Siapa Diri Kita, where we Are In Place and Time/ Di mana kita Pada Tempat dan waktu tertentu, How We Wxpress Ourselve/ bagaimana Kita Mengekspresikan Diri Kita, How The World Works/ Bagaimana dunia Bekerja, How We Organize Ourselves/ Bagaimana Kita Mengatur diri Kita dan How We Share The Planet/ Bagaimana Kita Berbagi Planet*.

Dalam pembelajarannya, PYP menggunakan semua yang ada di kelas (baik guru maupun teman) dan diluar kelas (keluarga dan lingkungan) sebagai sumber-sumber belajar. Jadi sumber belajar bukan terbatas pada buku saja. Seringkali lingkungan yang tidak kita duga sebagai sumber

belajar, dapat menjadi sumber belajar yang menakjubkan. Contoh nyata adalah ketika pembahasan unit *How We Express Ourselves*, tentang tata cara berkomunikasi baik dengan atau tanpa kata-kata, maka pada kesempatan tersebut para peserta didik diajak mengunjungi teman-teman yang kekurangan (yang tidak dapat mendengar dan berbicara / tuna rungu-tuna wicara dan juga yang tidak dapat melihat-tuna netra). Dalam interaksinya dengan para siswa yang kekurangan ini, selain belajar tentang bagaimana berkomunikasi dalam bentuk yang berbeda, para siswa PYP secara tidak langsung belajar bagaimana menerima perbedaan dan kekurangan sesama. Secara langsung dan nyata, semua siswa (baik yang kekurangan dan yang tidak) belajar berbagi dalam makna yang sesungguhnya. Mereka berbagi rasa, berbagi cerita dan tentu saja berbagi pengalaman.

'Pengalaman adalah guru yang terbaik'. Demikian kata pepatah. Namun benarlah juga, karena para siswa yang duduk di bangku sekolah dasar adalah mereka yang masih muda dan segar dalam menghadapi dan menjalani hidup. Dengan berpengalaman langsung, maka arti pembelajaran menjadi lebih signifikan dan bermakna.

PYP menggunakan sistem KBK. PYP menempatkan anak didik sebagai subjek pembelajaran. Bukan sebagai objek. Anak didik ditempatkan pada tingkat paling atas. *Students as the center of learning*. Anak didik juga harus berperan aktif. Anak didik diajak ke dalam setting pembelajaran yang terdesain untuk melihat kemampuan dan kompetensi siswa secara individu, karena setiap siswa adalah berbeda. *Every child is unique*.

PYP dan KBK sama-sama menerapkan *activity-based learning*/ pembelajaran berdasar kegiatan. Sehingga tugas para siswa lebih aktif 'bekerja' untuk mendapatkan pengetahuan, menemukan konsep dan mengasah keterampilan, tanpa melupakan nilai-nilai perilaku/ *attitudes*.

Sama PYP dan KBK juga sama-sama mempunyai tujuan mendidik peserta didik menjadi manusia yang sesungguhnya, yang mempunyai kemampuan individu yang tangguh dan mampu memecahkan masalah (problem solver) tanpa harus menunggu diberi, juga manusia tidak meninggalkan sisi-sisi nilai kemanusiaan (profil kemanusiaan) yang terbuka dan berpikiran secara internasional. Di dalam PYP adl istilah '*inquiry based learning*' yaitu pembelajaran berdasarkan *inquiry*. Kata *inquiry* bermakna 'suka memberi tahu'. Penerapannya dalam kegiatan belajar mengajar adalah para peserta didik diajak untuk mempunyai rasa penasaran akan hal-hal yang belum diketahui melalui pembelajaran yang aktif dan terseting dalam suasana penelitian/ riset sederhana. Anak didik akan diajak untuk berpikir, dan mengalami sendiri. Dengan melakukan sendiri, maka para peserta didik

akan lebih mampu memaknai arti pembelajaran yang sesungguhnya. *Inquiry* – suka mencari tahu dengan belajar – ini bisa dilaksanakan dalam KBK.

Untuk memiliki sifat suka belajar, para peserta didik harus ditempatkan ke dalam suasana yang aman, nyaman dan menyenangkan. Suasana yang *enjoy-full, fun but healthy* adalah suasana kelas seting PYP dan KBK. Siswa akan senang belajar. Belajarnya bukan karena terpaksa, karena harus menghafal isi halaman buku, dan bukan hanya karena akan ada ulangan pada keesokan harinya, tetapi mereka benar-benar senang belajar. Para siswa ini nantinya akan menjadi manusia

Yang senang belajar sepanjang hidupnya (*life-long learner*). Ini adalah harapan kita semua, bukan?

Dalam penerapannya dalam kurikulum, KBK bisa masuk ke dalam semua kegiatan pembelajaran. Kurikulum yang Berdasarkan kemampuan siswa wajib dilihat para pendidik sebagai dasar melangkah ke tingkat selanjutnya. Dalam arti, setiap individu tidak sama. Ada yang cepat dalam hal menangkap makna pembelajaran, namun ada pula yang lambat. Ada yang mempunyai gaya belajar yang unik, misalnya suka mendengarkan daripada menulis, maka para pendidik wajib mengenali gaya belajar ini. Ada juga siswa yang enggan melakukan kegiatan karena merasa kemampuannya sudah lebih daripada teman-temannya, maka sekali lagi tugas para pendidik untuk mengakomodasi setiap perbedaan dan keunikan para anak didiknya di kelas.

Cara atau strategi yang diterapkan dalam PYP dan KBK adalah sama. Yakni hubungan yang terjalin antara para pendidikan dan para anak haruslah hubungan yang erat dan sehat. Perlu digarisbawahi bahwa para pendidik bukanlah orang yang mengetahui segala tentang ilmu pengetahuan, bukan pula orang yang harus ditakuti (namun dihormati), tetapi peran para pendidik adalah sama dengan para anak didik, yakni mereka sama-sama pembelajar. Demikian sebaliknya, anak didik wajib terbuka dan berani bertanya kepada para pendidik tentang apa yang hendak diketahuinya.

Para pendidik wajib memberi kesempatan kepada anak didik untuk mengutarakan ide atau pemikirannya. Ada siswa yang sangat terbuka, karena memang sudah demikian personality-nya, namun ada pula siswa yang introversi. Maka para pendidik wajib sabar menunggu dan memandu.

Tugas pada pendidik dan anak didik di seting KBK adalah sebagai pembelajar yang sama-sama aktif, baik secara individu maupun secara kelompok. Adakalanya kegiatan individu berjalan dengan baik, karena sudah terseting dari awal dalam suasana yang mendukung, misalnya dalam suasana kelas yang harmonis dengan adanya peraturan yang ditaati oleh semua anggota kelas. Namun ada kalanya, rencana kegiatan belajar tidak

berjalan sesuai harapan. Semua ini wajar-wajar saja. Baik dalam PYP maupun KBK, semua proses pembelajaran wajib dimaknai. Bukan hanya melihat pada produk atau hasil akhirnya saja, namun proses *over product* pun penting untuk direfleksikan. Maka pendidikan yang membuat siswa yang memiliki pemikiran terbuka dan internasional, harus tetap tentu diterapkan makna ksesungguhnya pendidikan internasional.

Peranan dalam pendidik di kelas adalah sebagai pembimbing. Fasilitator/ pemandu, motivator dan juga sebagai penilai kemampuan siswa. di sisi lain, peranan pendidik adalah sebagai pendesain dan pelaksanaan kurikulum, dan tentu saja sebagai menejer kelas dan anak didik.

Dalam pendidikan internasional, para pendidik harus pandai menyelipkan nilai-nilai kemanusiaan ke dalam semua mata pelajaran dan dalam semua kegiatan secara berkelanjutan. Kegiatan yang dirancang haruslah sedemikian rupa sehingga anak didik tidak hanya belajar ilmu, maupun juga belajar nilai.

Tugas ini tentu saja bukan tugas ringan. Apalagi dengan adanya keterbatasan pengetahuan dan pemahaman kita sebagai manusia, namun alangkah baiknya bila kita saling berbagi. Berbagi dalam segala informasi dan pengetahuan, sehingga semua yang kita ajarkan kepada para peserta didik benar-benar yang bermakna.

Dengan belajar sendiri (membaca maupun berdiskusi) maupun mengunjungi sekolah-sekolah yang sudah menerapkan KBK, maka diharapkan semua pendidik memiliki pemahaman serupa tentang KBK. Sehingga 'pendidikan internasioanal' bukan sekedar di kulit belaka, namun bisa diterapkan ke dalam semua level sekolah yang ada di seluruh nusantara.

Dalam pelaksanaannya, di Indonesia Pendidikan internasional berupa :

- 1) Transfer of teknologi
- 2) Pertukaran pemuda dan petani ke Negara lain.
- 3) Penyetaraan pendidik dan peserta didik keluar negeri
- 4) Kerja sama Pendidikan dengan universitas di negara lain/ kerja sma kelembagaan.

13. Implikasi Masalah dalam Pendidikan Internasional

Hampir tidak ada satu pun lembaga pendidikan kita di Kalimantan Selatan yang bertaraf internasional. Dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, semua masih bertaraf nasional, bahkan lokal. Hampir seluruh sekolah kita di daerah ini belum dapat disebut modern, bahkan cenderung masih bersifat tradisional.

Padahal memasuki era Vglobal dan pasar bebas, seharusnya sudah ada lembaga pendidikan kita di daerah ini yang mampu bersaing secara internasional dan global, sekurang-kurangnya ada satu TK sampai SMA atau sederajat. kendalanya yang klasik adalah keterbatasan dana, fasilitas, sumberdaya manusia dan sarana lainnya belum siap untuk mendirikan sekolah bertaraf internasional.

Kendala yang sesungguhnya bukan itu. Melainkan rendahnya motivasi dan wawasan sebagian pejabat, tokoh masyarakat dan pengusaha kita di daerah ini yang peduli pentingnya pendidikan yang berkualitas tinggi. Sebagian besar mereka hanya memikirkan kepentingan pribadi, keluarga dan kelompok dalam lingkup sempit dan sangat terbatas.

Sekolah dan madrasah yang bertaraf internasional dengan ciri antara lain dalam kegiatan belajar menggunakan bahasa asing. Dalam interaksi pembelajaran, baik guru maupun siswa, misalnya di sekolah umum menggunakan Bahasa Inggris dan di madrasah menggunakan Bahasa arab atau kedua bahasa tersebut.

Sesuai hasil kegiatan *workshop School development And Investmen Plan* yang dilaksanakan Depdikns dan ADB di Bogor baru-baru ini (2-4/12-2004), untuk SMA yang bertaraf internasional kepala sekolahnya minimal s2, memiliki kemampuan *leadership* yang menyakinkan, menguasai Bahasa Inggris dan Komputer, berpengalaman mengajar minimal 10 tahun.

Sedangkan untuk guru, tingkat pendidikannya minimal S1, bidang pendidikan sesuai dengan mata pelajaran yang dipegang, menguasai Bahasa Inggris –minimal nilai TOEFL 550. Guru harus mampu membaca, menulis, mendengarkan dan berbicara dalam Bahasa Inggris dengan baik. Penggunaan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar minimal dalam empat mata pelajaran, Fisika, Kimia, Biologi dan pelajaran Bahasa Inggris sendiri.

Mengenai sarana/fasilitas, SMA level ini harus memiliki luas ruang kelas 63 meter persegi (*moving clasrom*), khususnya untuk mata pelajaran Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, dan Bahasa Inggris, tiap tingkat memiliki minimal 1 PC/laptop, Speaker, LCd, screen project dengan buku pegangan siswa dan referensi yang lengkap, setiap siswa memiliki komputer agar mereka dapat mengakses internet /website.

Harus diakui, sekolah bertaraf internasional memerlukan tidak sedikit SDM pendidikan yang profesional, dana besar dan fasilitas lengkap. Memang, kualitas pendidikan yang kompetitif membutuhkan biaya tinggi.

Kita kurang yakin, apabila di Kalsel tidak dapat didirikan sekolah bertaraf internasional. Mengapa?

Pertama, selama ini untuk keperluan studi banding, ziarah/umroh, pembangunan fisik dan sebagainya, pejabat daerah, tokoh

masyarakat dan pengusaha dapat saja mengeluarkan dana yang sangat besar. **Kedua**, sumberdaya alam, seperti tambang, intan dan batu bara, hutan dan perkebunan di daerah ini menghasilkan uang miliaran, bahkan triliunan rupiah.

Ketiga, manajemen dan operasional lembaga pendidikan yang ada di daerah ini sudah mempunyai *master plan* (rencana jangka panjang), visi, misi dan motivasi untuk menuju kualitas internasional.

Keempat, SDM daerah ini cukup potensial. tidak sedikit penduduk Kalsel lulusan Universitas di luar negeri, baik dari Amerika Serikat, Kanada, Eropa, maupun Mesir, Arab Saudi, Malaysia, dan sebagainya.

Kelima, generasi muda kita khususnya siswa dan mahasiswa di daerah tidak sedikit memiliki kecerdasan dan potensial yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Dengan melihat faktor yang sangat potensial tersebut, sungguh ironis apabila belum ada sekolah yang bertaraf internasional di daerah ini. Kelima faktor itu sebenarnya merupakan modal untuk dapat mengembangkan sekolah bertaraf internasional. Sayangnya potensi itu tidak diarahkan ke sana, atau mungkin sebagian mereka memang tidak atau belum memiliki kepedulian untuk meningkatkan mutu SDM secara signifikan dan relevan di era globalisasi sekarang.

Selain itu dengan adanya pendidikan Internasional seperti itu maka akan timbul hal-hal sebagai berikut:

- 1) Biaya yang dibutuhkan dalam melaksanakan *Transfer Of Technology*
- 2) Penguasaan bahasa negara setempat
- 3) Lamanya masa studi dan perbedaan program pendidikan
- 4) Tenaga akademik berkualitas seperti yang diharapkan
- 5) Sasaran dan kerja sama yang signifikan/ relevan

14. Solusi terhadap Permasalahan Pendidikan Internasional

Banyak alternatif untuk mengembangkan sekolah kita menjadi bertaraf internasional. **Satu**, melalui APBN/APBD, dengan meningkatkan anggaran 20 persen atau lebih tiap tahun dan dalam waktu dua atau tiga tahun, level sekolah dapat ditingkatkan. **Dua**, adanya kerjasama di antara pejabat, pengusaha dan tokoh masyarakat sebagai donatur untuk pembiayaannya. **Tiga**, menjalin kerjasama dengan yayasan atau pengelolaan di luar negeri yang peduli pendidikan tetapi tidak mengikat.

Mungkinkah di Kalsel dapat dikembangkan atau dibangun sekolah atau madrasah bertaraf internasional? Jawabannya sangat mungkin, minimal dapat dibangun satu buah. Bahkan mungkin beberapa buah, asal semua pihak memiliki kemauan untuk itu. Adanya bantuan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, pejabat, pengusaha, dan tokoh masyarakat sangat mungkin pembangunannya di ibukota provinsi atau di setiap kabupaten/kota.

Kenyataannya selama ini, lulusan SMA/MA sederajat dari daerah ini sangat kecil jumlahnya, malah mungkin hampir tidak ada yang dapat memasuki perguruan tinggi di luar negeri, seperti di negara AS, Kanada, Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, Mesir, dan Arab Saudi, Jepang, Korea Selatan dan sebagainya. Bahkan mereka yang berhasil memasuki perguruan tinggi negeri di Nusantara ini. Tidak banyak jumlahnya.

Merupakan kenyataan pula, pendudukan Kalsel baik putra daerah maupun pendatang masih sangat sedikit jumlahnya. Malah hampir tidak ada yang dapat menjadi diplomat atau duta besar, pejabat atau staf di luar negeri. Penduduk yang berasal dari Kalsel sejauh-jauh ini sangat langka yang dapat menjadi pegawai atau karyawan, guru atau dosen, perawat atau dokter dan tenaga/staf ahli di luar negeri seperti di negara Arab, Timur Jauh, Eropa, dan Amerika. Bahkan yang menjadi TKI atau TKW di luar negeri yang berasal dari Kalsel sangat kecil jumlahnya bila dibandingkan dengan mereka yang berasal dari Pulau Jawa, Sumatra, Madura dan Sulawesi.

Kenyataan itu tidak terlepas dari rendahnya kepedulian sebagian besar pejabat dan masyarakat kita terhadap peningkatan mutu pendidikan yang mampu bersaing di tingkat internasional. Walaupun kita masih saja berputak-putik pada lingkup sempit dan terbatas.

Pejabat, pengusaha, pakar dan tokoh masyarakat di daerah yang peduli pentingnya pendidikan bermutu tinggi, diharapkan dapat membuka mata terhadap kenyataan dan perkembangan yang terjadi. Generasi muda di daerah ini khususnya pelajar dan mahasiswa tidak perlu putus asa. Paling sedikit ada secercah asa (harapan) untuk dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan bersaing secara global. **Pertama**, adanya wacana dan sedikit komitmen dari pemerintah untuk meningkatkan anggaran pendidikan minimal 20 persen. Untuk itu, kita harus terus menerus berjuang secara sungguh-sungguh namun santun, tanpa tindakan anarkis agar peningkatan itu segera menjadi kenyataan. **Kedua**, adanya rencana penerapan pembelajaran dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) di semua jenis dan jenjang pendidikan. Dengan penerapan kurikulum ini dimungkinkan siswa/mahasiswa yang mempunyai keinginan kuat untuk berprestasi, dapat memperoleh kesempatan. Pembelajaran dengan KBK, peserta didik diberikan kesempatan untuk berkembang; seperti penguasaan bahasa asing, matematika, IPA, IPS, Olahraga, Kesenian dan Sebagainya. selama sekolah,

khususnya kepada sekolah dan guru benar-benar profesional maka siswa/mahasiswa akan dapat mengembangkan diri untuk dapat bersaing, baik tingkat nasional maupun internasional. **Ketiga**, adanya rencana pengembangan empat SMA di Kalsel untuk memiliki kelas bertaraf internasional, yaitu dua SMA di Banjarmasin dan masing-masing satu SMA di Banjarbaru dan Kabupaten banjar. Kendati masih pada tingkat persiapan atau usulan dan keterbatasan sumberdaya yang ada untuk tahun 2005/2006, paling tidak ini merupakan peluang emas bagi sebagian kecil peserta didik di daerah ini untuk berkompetisi mendapatkan kesempatan itu.

Dengan mengembangkan SMA/MA yang sudah ada menjadi sekolah bertaraf internasional, barangkali lebih efektif dari pada mengirim anak-anak kita sekolah di luar negeri. Misalnya mengirim 25 siswa kita dengan biaya Rp.150 juta per orang. Untuk itu, diperlukan total biaya sebesar Rp. 3.75 miliar. Padahal dengan dana sebesar itu dapat dikembangkan atau dibangun sebuah sekolah baru bertaraf internasional. Sementara yang namanya sekolah, dapat berkesinambungan selama puluhan tahun atau lebih.

Yang menjadi permasalahan sekaligus 'katanya' menjadi kebiasaan orang Banjar adalah kurang kompak, suka berjalan sendiri-sendiri *kada mau babawaan*. Kadang-kadang yang sudah maju atau berhasil kurang suka membantu yang tertinggal. Di sisi lain mereka yang tertinggal berlagak sombong, atau kadang-kadang mau diberi bahu malah maunya ke kepala.

Namun hal itu mungkin hanya 'katanya' atau kebiasaan yang tidak seluruhnya benar. Sepanjang keberadaan lembaga pendidikan yang bertaraf internasional benar-benar diperlukan di Kalsel, sudah pasti akan mendapat dukungan. Demi kemajuan daerah dan masyarakat sudah pasti akan mendapat kontribusi dari banyak pihak.

Bagaimana profil sekolah bertaraf internasional, memang ada acuan yang lengkap. Acuan itu sudah ada di Depdiknas. Ditjen Dikdasmen dan *ADB Decentralized Senior Secondary Rducation Project dan Brtitish Council & Associates*.

Dengan acuan itu, sekarang tiba waktunya pejabat, pengusaha dan tokoh masyarakat yang peduli terhadap pendidikan di daerah ini memikirkan mutu dan pendidikan yang lebih tinggi demi masa depan generasi muda kita. Di era otonomi daerah dan globalisasi kesempatan itu sangat terbuka lebar bagi generasi penerus kita, untuk dapat berkiprah dan bersaing dalam membangun bangsa dengan SDM yang lebih unggul dan handal.

Masyarakat Kalsel pentas berterima kasih dan bangga atas peranan sekolah, pesantren dan perguruan tinggi di daerah ini. Keberadaam Unlam dan IAIN Antasari beserta perguruan dan sekolah tinggi yang berada dalam pembinaannya, tidak sedikit peranannya dalam meningkatkan kualitas SDM di daerah ini.

Kita mendambakan keberadaan lembaga pendidikan bertaraf internasional di Kalsel ini adalah memacu peserta didik kita untuk dapat Go Internasional. Generasi yang memiliki wawasan, pemikiran dan kiprah yang terbuka luas dan jauh ke depan, tidak seperti 'kodok dalam tempurung'.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pendidikan internasional utamanya dalam *transfer of Technology*, yaitu:

1. Tidak menjadikan satu bangsa terus menerus bergantung pada bangsa yang lain.
2. Sesuai dengan budaya sendiri/tidak bertentangan dengan budaya sendiri.
3. Tidak bertentangan dengan nilai sosial, mencegah teknologi yang bertentangan dengan nilai-nilai kita/agama yang kita anut.
4. Tidak membuat golongan elit menjadi penguasa bagi golongan bawah.
5. Pendidikan bangsa yang memadai bagi yang mau mengikuti pendidikan di negar-negara tertentu.
6. Biaya hidup dan tunjangan pendidikan yang cukup bagi peserta pendidikan lanjutan.
7. Pendidikan yang disediakan bagi tenaga akademik dalam kerjasama kelembagaan.

D. Latihan

1. Jelaskan tendensi dan latar belakang diselenggarakannya pendidikan internasional!
2. Jelaskan asumsi pendidikan internasional!
3. Jelaskan konteks pendidikan internasional dalam *inter cultural education!*
4. Jelaskan hubungan antara pendidikan internasional dan pertukaran siswa/mahasiswa!
5. Deskripsikan pelaksanaan pendidikan internasional di Indonesia!
6. Apa saja permasalahan yang timbul sebagai implikasi pelaksanaan pendidikan internasional?
7. Berikan alternatif solusi terhadap permasalahan pendidikan internasional yang telah Anda kemukakan!

BAB X

PENDIDIKAN WANITA

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari uraian materi pada bab ini, maka mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan Konsep dasar Pendidikan Wanita/Gender
2. Menjelaskan Urgensi Pendidikan Wanita
3. Menjelaskan Berbagai Manifestasi Ketidakadilan Gender
4. Menyebutkan Faktor Penyebab Ketidakadilan Gender
5. Menjelaskan kaitan Antara Mendidik Anak Perempuan sama dengan Menampung Masa Depan
6. Menjelaskan Konsep dasar Citra Wanita
7. Menjelaskan hubungan Antara Ideologi Gender dan Pengembangan Karier Perempuan
8. Menjelaskan hubungan Antara Wanita dan Kepemimpinan

B. Pendahuluan

Wanita Indonesia sudah sejak lama menjadi pusat perhatian dalam sastra Indonesia. Sosok wanita yang ditampilkan dalam novel 'Azab dan Sengsara' disusul 'Siti Nurbaya' hingga kini menjadi sebuah mitos. Novel ini merupakan sangat emansipasi wanita yang saraf dengan gugatan terhadap nasib wanita Indonesia pada zamannya, bahwa tokoh wanita dalam Siti Nurbaya sebagai modal dan model yang hingga kini dimiliki oleh manusia Indonesia dalam menilai kehidupan peran dan kedudukan wanita. Kenyataannya menunjukkan bahwa peran dan kedudukan wanita tahun 2000-an tidak jauh berbeda dengan peran dan kedudukan wanita dalam karya-karya sebelumnya. Mungkin tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Siti Nurbaya muncul kembali dengan gaya modern.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan posisi wanita sejak dulu sampai sekarang berada pada posisi tersudut atau tidak menguntungkan. Padahal, kemampuan dan potensi wanita masa kini tidak kalah dengan kemampuan yang dimiliki oleh kaum pria. Penindasan kaum wanita itu, bukan hanya ditampilkan oleh tokoh wanita dalam novel-novel Balai Pustaka (Djumingin, 2001), melainkan juga oleh tokoh wanita dalam novel masa kini,

seperti “Jntara Bianglala” dan “Perempuan Jogja” karya Ahmad Tosari. Selanjutnya, ketidakberuntungan wanita tidak hanya ditampilkan oleh pengarang dalam karyanya, tetapi juga penindasan wanita itu terjadi juga di masyarakat atau dalam kenyataan hidup sehari-hari, tidak jarang kita melihat wanita yang dipukuli oleh suaminya, bahkan tidak melihat tempat dimanapun mereka ingin memukulnya baik itu di rumah maupun di jalan atau tempat-tempat keramaian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan suami terhadap istri bukan bersumber dari kesalahan istri semata, melainkan sebagian besar disebabkan oleh suami. Dalam beberapa penelitian terungkap pula bahwa ada hubungan signifikan antara pendidikan, sosial ekonomi, kesadaran budaya, kesadaran beragama, dan kesadaran hukum terhadap kekerasan suami terhadap istri. Hal ini membuktikan bahwa diskriminasi dan subordinasi terhadap perempuan bukan semata-mata disebabkan oleh kekurangan kaum wanita, melainkan juga disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya pandangan dan sikap kaum laki-laki yang menganggap wanita adalah sebagai subordinatif dari mereka. Jika itu benar, maka wanita akan tertindas sepanjang masa, sampai kapan dan dimana pun kaum laki-laki menginginkannya.

Menurut Martoenoes Arifin kualitas Sumber Daya Manusia wanita amat tertinggal dibanding dengan lelaki, kenyataan menunjukkan bahwa:

1. Di desa peluang wanita untuk memperoleh pendidikan lebih kecil dari laki-laki.
2. Keterampilan yang dimiliki wanita desa lebih rendah dibandingkan laki-laki.
3. Di kota hampir semua lapangan dimonopoli oleh laki-laki terutama pekerjaan yang membentuk keterampilan khusus.
4. Deskriminasi yang terjadi selama ini membuat sumber daya wanita dalam kesamaan kultural budaya.

C. Uraian Materi

1. Konsep Pendidikan Wanita/Gender

Gender sering dikacaukan pengertiannya dengan jenis kelamin (biologis). Pengertian jenis kelamin merupakan pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya laki-laki adalah manusia yang memiliki penis dan memproduksi sperma sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi, seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui. Ketentuan biologis ini secara permanen tidak dapat dipertukarkan dan telah menjadi kodrat dari Tuhan.

Lain halnya dengan konsep gender yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural, misalnya bahwa perempuan itu dikenal lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, cekatan, dan perkasa. Ciri dan sifat-sifat itu dapat dipertukarkan oleh karena urusan domestik dapat saja dikerjakan oleh kaum laki-laki bukan hanya oleh kaum wanita saja. Sebaliknya, bidang publik dapat juga dilakukan oleh kaum wanita, bukan hanya oleh kaum laki-laki.

Gender merupakan "konstruksi sosial tentang peran laki-laki dan wanita sebagaimana dituntut oleh masyarakat dan diperankan oleh mereka masing-masing" (Hafidz, 1995:5).

Tujuan pendidikan adalah menjadikan manusia sesungguhnya dalam arti manusia seutuhnya, orang bugis menyebutnya dengan istilah *mancaji tau tongeng*. Pencapaian tujuan pendidikan itu diperoleh melalui bimbingan orang tua dan masyarakat sekitar. Pola pengasuhan orang tua ketika anak masih kecil (usia 5 tahun ke bawah) belum mengenal perbedaan peran gender. Anak laki-laki dan perempuan dalam hal ini dibimbing, diasuh dan dididik untuk mengenali norma-norma yang paling dasar, yaitu pengenalan mengenai baik dan buruk, pantas dengan tidak pantas sebagai seorang manusia yang mempunyai nilai pribadi sesuai dengan tatanan hidup yang berlaku. Periode ini biasanya berlangsung satu sampai dua tahun dan tidak sama bagi semua anak, karena setiap individu mempunyai karakteristik masing-masing.

Setelah anak mencapai usia tujuh sampai sembilan tahun, mulailah anak laki-laki dan wanita dipisahkan. Mereka mulai diarahkan untuk memasuki proses pembentukan menurut jenis kelaminnya. Periode pembentukan ini ada kalanya berlangsung sampai dua-tiga tahun atau bahkan lebih. Mereka benar-benar diperkenalkan dengan sifat-sifat kelakian dan keperempuanan yang sesungguhnya.

2. Urgensi Pendidikan Wanita

Pendidikan sangat dibutuhkan oleh setiap masyarakat desa ataupun kota, berbanding terbalik pemahaman pendidikan masyarakat dahulu yang tidak memprioritaskan melainkan lebih mementingkan pekerjaan. Apalagi di pelosok-pelosok desa pendidikan hanyalah menya-nyikan waktu untuk belajar, karena persepektif mayoritas masyarakat pedalaman, orang yang sekolah tidak sekolah pasti akhir-akhirnya bekerja juga. Sedangkan pendidikan untuk kalangan perempuan lebih memprihatinkan, sebab mayoritas orang tua menikahkan anaknya sebelum lulus Sekolah Dasar (SD) karena perempuan pantas di dapur, sumur dan kasur.

Oleh karena itu, mari kita renungkan apakah benar perempuan tidak mempunyai tempat untuk mengenyam pendidikan setara dengan laki-laki. Mari kita sosialisasikan pentingnya pendidikan untuk perempuan, sehingga perempuan juga mempunyai hak dan kewajiban untuk tau, agar perempuan-perempuan pedesaan mempunyai kesempatan untuk bersaing dalam membantu kemajuan bangsa Indonesia ini.

Definisi perempuan dalam kehidupan adalah sosok yang ikut serta dalam kemajuan Negara seperti pepatah mengatakan “setiap kesuksesan laki-laki di belakang ada seorang perempuan-perempuan akan melahirkan penerus bangsa”. Perempuan menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) orang yang dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui. Contohnya perempuan yang luar biasa Aisyah istri Rasulullah putri Abu Bakar As-Shiddiq adalah perempuan cerdas dalam pembentukan syariat Islam, ia dikenal orang yang menyimpan mushaf Al-Qur’an.

Sedangkan perempuan dalam pandangan sejarah kemerdekaan Indonesia, perempuan membentuk sebuah organisasi yang dipelopori oleh R. A. Kartini sebelum tahun 1928 atas usaha Budi Utomo berdirilah organisasi Putri Merdeka di Jakarta. Perempuan dalam sejarah sebagai madrasah pertama untuk putra-putrinya. Pahlawan R. A. Kartini sebagai perempuan yang membela hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan, dahulu sangatlah sulit dan banyak rintangan untuk sekolah, karena wanita dilakukan secara tidak adil oleh para kononialisme Belanda.

Perempuan dahulu menciptakan organisasi-organisasi setelah organisasi Putri Merdeka terciptalah organisasi Wanita Mulyo, Wanita Kholik, dan Wanita Utomo. Semua organisasi perempuan tersebut untuk menciptakan perempuan yang sama mengenyam pendidikan. Kalau kita istilahkan perempuan berpendidikan tinggi adalah untuk kebaikan Negara memberikan generasi militan, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab.

Perempuan yang berpendidikan tinggi akan mengetahui cara menjadi ibu rumah tangga yang baik, dapat membedakan mana yang baik dan buruk serta tidak lagi diistilahkan bahwa perempuan tempatnya hanya di dapur, sumur dan kasur, tetapi juga ikut andil terhadap Negara, salah satu contoh perempuan hebat tahun 2010-2016 yang telah memberi kontribusi kemajuan Surabaya yaitu ibu Tri Rismaharini sebagai wali kota Surabaya. Jadi, memang benar perempuan tempatnya hanya di dapur, sumur, dan kasur adalah benar kalau ditinjau peran wanita dalam kedudukan keluarga. Sebagaimana sudah kita ketahui dalam keseharian perempuan sebagai ibu rumah tangga melayani anak-anaknya dan suaminya.

Selain perempuan sebagai ibu rumah tangga perempuan juga mempunyai cita-cita untuk memperoleh HAM (hak asasi manusia) untuk ikut serta dalam berjalannya roda pemerintahan seperti pahlawan Indonesia

oleh perempuan hebat, M. Chistina Tiahahu, Cut Nya Dein, Cut Mutia, dan R. A. Kartini, sebagai fakta bahwa perempuan dapat menjadi contoh karena dapat memberi sumbangsih terhadap kemerdekaan republik Indonesia.

Di dalam era Globalisasi pada saat ini, ternyata isu mengenai tingkat pendidikan menjadi salah satu topik yang sangat menarik dan juga sangat relevan untuk dibicarakan di kalangan masyarakat pada saat ini. Karena, proses memperoleh pendidikan mempunyai peranan besar untuk tercapainya suatu tujuan, yaitu perubahan pada pola sikap seseorang untuk menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Tetapi pada kenyataannya, pandangan terhadap kaum wanita di lingkungan masyarakat tertentu di Indonesia pada saat ini masih terlihat sangat minim. Di lingkungan tertentu, kaum wanita bahkan tidak mendapatkan perhatian untuk memperoleh pendidikan sebagaimana mestinya. Bahkan ada juga kaum wanita yang tidak diberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan seperti layaknya kaum pria, apakah hal ini petanda bahwa pendidikan tidak penting bagi kaum wanita?

Pendidikan sangat penting untuk menunjang hidup seseorang, salah satunya yaitu untuk menunjang karir khususnya bagi seorang pria. Walaupun pada kenyataannya seseorang dapat sukses dalam berkarir tanpa melewati jenjang pendidikan, namun sebaiknya seseorang ditunjang dengan pendidikan karena hal tersebut akan lebih baik. Selain untuk menunjang karir seseorang, pendidikan juga berfungsi untuk memperbaiki pola pikir, memperbanyak relasi, dan menambah wawasan yang mungkin akan berguna untuk diri sendiri, keluarga, sahabat, orang lain, dan khususnya bagi seorang suami apabila suatu saat nanti seorang wanita akan menjadi istri.

Indonesia sudah memiliki sejarah yang panjang tentang wanita dan pendidikan. Beberapa pejuang kaum wanita Indonesia yang ikut serta dalam aktivitas politik dan pendidikan yaitu Cut Nyak Dien, Martha Tiahahu, Yolanda Maramis, dsb. Sedangkan R.A Kartini dan Dewi Sartika adalah orang yang memperjuangkan hak-hak wanita untuk memperoleh pendidikan yang setara. Hal ini sudah membuktikan bahwa para pahlawan kita telah memikirkan kondisi wanita pada saat itu dan ingin memperbaiki nasib wanita dengan melakukan tindakan-tindakan yang nyata. Hal ini dilakukan karena para pejuang kaum wanita di Indonesia pada saat itu sudah memikirkan betapa pentingnya arti pendidikan bagi kaum wanita.

Menurut (Subadio & Ihromi, 1978) pendidikan untuk kaum pria mempunyai kegunaan yang langsung terlihat dan bersifat ekonomis. Pendidikan kaum wanita lebih penting artinya untuk pendidikan bangsa dan dengan demikian secara tidak langsung mendorong dengan kuat perkembangan sosial dan ekonomi bangsa itu sendiri. Oleh karena itu,

seharusnya kaum wanita tidak pernah bosan dan menyerah untuk terus memperjuangkan hak-hak wanita.

Tetapi di Indonesia ini tidak sedikit juga orang yang berpikir bahwa pendidikan tidak terlalu penting bagi wanita, karena bila pada saatnya nanti seorang wanita menikah dan menjadi seorang istri, maka wanitalah yang akan diberikan nafkah oleh suaminya, bukan malah wanita yang memberikan nafkah kepada suaminya. Bahkan ada juga yang tidak diberikan kesempatan untuk memperoleh kesempatan pendidikan seperti kaum pria. Yang lebih disayangkan lagi, masih banyak juga kaum wanita yang merasa bahwa dirinya masih kurang dari kaum pria. Dan ada juga kaum wanita yang masih mempunyai tanggapan *“Untuk apa sekolah susah-susah kalau nantinya hanya mengurus anak?”*. Memang benar bahwa saya juga tidak ragu sedikitpun mengenai istilah *“ujung-ujungnya wanita pasti kembali ke dapur juga”*. Karena semua itu adalah realita yang memang sulit untuk dibantahkan.

Perempuan dianggap berada diposisi paling lemah untuk memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih terbatas dibandingkan dengan laki-laki (Sitoresmi & Ilmiah, 2009). Sampai saat ini masih banyak perempuan yang belum memiliki kesempatan besar untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Hal ini mungkin terjadi karena adanya alasan ekonomi, keluarga, dan juga budaya yang menjadi salah satu faktor utama yang membatasi wanita untuk memperoleh kesempatan pendidikan.

Fakta-fakta tersebut merupakan fenomena sosial yang menjadi salah satu dampak dari perubahan di dalam masyarakat, karena banyaknya perbedaan persepsi antara kaum wanita dengan masyarakat awam lainnya terhadap penilaian tentang pendidikan. Perbedaan persepsi untuk memperoleh kesempatan pendidikan bagi wanita tidak lepas dari latar belakang dan budaya yang ada di masyarakatnya. Padahal, pendidikan merupakan hak bagi setiap orang baik pria maupun wanita. Tetapi sulit kita pungkiri apabila ada yang berpendapat bahwa pria dan wanita mempunyai kedudukan dan persamaan hanya sampai pada batas spritual saja dan masyarakat dibiarkan untuk membuat batasan-batasan berdasarkan gender.

Perempuan memiliki peranan yang sangat penting dan fungsi yang sangat kuat di dalam keluarga dan lingkungan masyarakatnya. Tetapi sayangnya, masih banyak wanita yang belum bisa memainkan peran dan fungsinya dengan baik. Ini diakibatkan karena faktor kemiskinan. Dan faktor tersebut terjadi akibat rendahnya tingkat pendidikan bagi kaum wanita. Terdapat dua aspek yang menjadi faktor utama untuk lebih memberdayakan kaum wanita, yaitu aspek pendidikan dan aspek ekonomi. Kebijakan pendidikan dan ekonomi ini harus sangat diperhatikan oleh kaum wanita. Karena jika seorang wanita memiliki status ekonomi yang kuat, dan

mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang tinggi maka wanita tersebut akan mendapatkan peranan dan fungsi yang sangat penting untuk keluarga dan lingkungan masyarakatnya.

Pendidikan adalah salah satu jalan yang menjadikan perempuan sebagai agen perubahan, bukan sekedar penerima pasif program-program pemberdayaan. Pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang memungkinkan perempuan memiliki independensi (kemandirian) ekonomi dengan bekerja baik di luar maupun di dalam rumah tinggalnya (Khayati, n.d.). Dari definisi tersebut, maka seharusnya tidak ada lagi alasan untuk mendiskriminasikan atau menelantarkan pendidikan bagi kaum wanita. Dan wanita tentunya juga mempunyai hak untuk belajar di bidang apa saja.

Secara alamiah, memang benar pria berbeda dengan wanita, baik secara fisik maupun secara psikologi. Jika dilihat secara fisik, tentu sangat terlihat jelas perbedaannya. Oleh karena itu, wajar jika masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa wanita harus hidup di lingkungan keluarganya, supaya rumah tangganya lebih tentram, damai, bahagia, dan sejahtera. Demikian juga dengan pria, pria mempunyai tugas untuk mencari nafkah dan bekerja untuk keluarga, sedangkan wanita sebagai pengelola dan pengatur di dalam rumah tangga.

Seiring dengan perkembangan zaman, tugas wanita memang masih tidak bisa lepas dari tanggung jawab sebagai pengelola dan pengatur di dalam rumah tangganya. Apabila suatu saat nanti seorang wanita menjadi istri, maka wanita tersebut akan memiliki anak-anak yang tentunya lebih dekat dengan ibunya dibandingkan dengan ayahnya. Ini dikarenakan sebagian besar waktu seorang ibu adalah di rumah, sehingga waktu untuk bersama anak-anaknya pun lebih banyak dibandingkan suaminya.

Seorang wanita juga harus memiliki pengetahuan yang sangat luas agar wanita tersebut dapat membuat perencanaan, lalu melakukan suatu perencanaan tersebut, dan dapat mengevaluasi pengelolaan di dalam keluarganya dengan baik. Agar dapat tercapainya suatu keadaan di mana kedamaian dan ketentraman, serta kebahagiaan dapat diciptakan secara kondusif di dalam keluarga, karena sudah terpenuhinya kebutuhan lahir maupun batin pada setiap anggota di dalam keluarga tersebut.

Wanita mempunyai peranan yang sangat penting untuk anak dan keluarganya. Tidak hanya itu, seorang wanita juga dapat berkontribusi lebih di dalam lingkungan dan masyarakatnya jika wanita tersebut memiliki pendidikan yang tinggi. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa wanita tersebut dapat lebih bermanfaat dan berkah untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Bukankah kita hidup memang untuk mencari keberkahan Tuhan kita masing-masing?

Otak dan hati yang dimiliki seseorang mempunyai kapasitas yang sangat jauh lebih banyak dari apa yang kita bayangkan selama ini. Jadi, jika kita mampu menguasai banyak bidang. Mengapa harus terpaku hanya dalam 1 bidang saja? Bahkan, otak dan hati kita bila semakin di asah maka akan semakin berfungsi dengan baik juga.

Pada akhirnya, perempuan memang memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan ini. Seharusnya kaum wanita juga tidak boleh bosan dan menyerah untuk terus memperjuangkan hak-hak wanita, terutama hak pendidikan bagi wanita. Jadi, untuk kaum wanita yang ada di negeri ini, marilah kita mempunyai semangat yang berkobar untuk memperoleh kesempatan berpendidikan yang tinggi.

3. Berbagai Manifestasi Ketidakadilan Gender

Ketidakadilan gender termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan yang marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan, dan beban kerja perempuan (Fakih, 1997:12-23).

a. Gender dan marginalisasi perempuan

Marginalisasi atau pemiskinan adalah proses tindakan yang dilakukan oleh kebijakan pemerintah, keyakinan atau tafsiran agama, tradisi/kebiasaan, bahkan asumsi ilmu pengetahuan yang menyebabkan kemiskinan bagi perempuan. Misalnya: program swadaya pangan atau revolusi hijau secara ekonomis telah menyingkirkan kaum perempuan dari pekerjaannya sehingga memiskinkan mereka. Marginalisasi juga diperkuat oleh adat-istiadat maupun tafsiran keagamaan misalnya banyak di atas suku-suku di Indonesia yang tidak memberi hak kepada kaum perempuan untuk mendapatkan warisan sama sekali (Fakih, 1997:14)

b. Gender dan subordinasi

Pandangan gender ternyata bisa menimbulkan subordinasi terhadap perempuan. Anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak menguntungkan.

c. Gender dan stereotipe

Stereotipe adalah penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Stereotipe pada perempuan, misalnya lawan jenisnya, maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotipe ini. Bahkan, jika ada pemerkosaan yang dialami perempuan, masyarakat cenderung menyalahkan korbannya.

- d. Gender dan kekerasan
Kekerasan (violence) adalah serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan gender, diantaranya: perkosaan terhadap perempuan, pemukulan/serangan fisik dalam rumah tangga, bentuk penyiksaan yang mengarah pada organ alat kelamin, misalnya penyunatan pada anak perempuan, pelacuran, pornografi, pemaksaan sterilisasi dalam KB, kekerasan terselubung dan pelecehan seksual.
- e. Gender dan beban kerja perempuan
Adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok menjadi kepala rumah tangga berakibat semua pekerjaan rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan. Konsekuensinya, banyak kaum perempuan yang harus bekerja keras dan lama, terlebih jika sebagai kariawan atau pekerja di luar rumah, maka ia memikul beban kerja ganda. Biar gender ini mengakibatkan beban kerja perempuan ke arah pekerjaan domestik yang dianggap dan dinilai lebih rendah daripada jenis pekerjaan laki-laki, sehingga dikategorikan bukan produktif dan tidak diperhitungkan dalam statistik ekonomi negara (Fakih, 1997:21-23).

4. Faktor Penyebab Ketidakadilan Gender

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan gender, yaitu :

- a. Pertanyaan dalam Al-Quran disalahtafsirkan
Pada dasarnya ini adalah ajaran agama, khususnya islam adalah menganjurkan dan menegakkan prinsip keadilan, misalnya istilah *qawwamun* (pemimpin) disalahtafsirkan oleh sebagian orang sebagai kekuasaan, oleh karena itu, istri atau perempuan harus tunduk kepada laki-laki, padahal dalam Al-Quran tidak ada diskriminasi, tidak ada subordinasi terhadap perempuan.
Subordinasi terhadap kaum perempuan merupakan suatu keyakinan yang dikembangkan di masyarakat yang tidak sesuai atau bertentangan dengan semangat keadilan seperti dalam Al-Quran surat Al-Hujarat ayat 14 yang berbunyi:
“sesungguhnya telah Aku ciptakan kalian laki-laki dan perempuan dan Aku jadikan kalian berbangsa dan bersuku-suku agar kalian lebih sering mengenal; sesungguhnya yang mulia di antara kalian adalah yang paling taqwa.”

Pemahaman yang biasa gender itu, juga membawa akibat pada persoalan warisan dan kesaksian, di mana nilai kaum perempuan dianggap separuh dari kaum laki-laki. Penafsiran tradisi yang salah akan Islam juga menganggap bahwa kaum perempuan sama sekali tidak memiliki hak berproduksi dan reproduksi mereka. Padahal pada ayat yang lain telah dinyatakan bahwa perempuan memiliki hak-hak reproduksi, meliputi: hak jaminan keselamatan dan kesehatan yang berkenaan dengan pilihan-pilihan untuk menjalankan dan menggunakan atau menolak penggunaan organ reproduksinya, hak untuk memilih pasangan, hak untuk menikmati dan menolak hubungan seksual.

b. Kebijakan negara untuk perempuan

- 1) UUD 1945 (pasal 27 ayat 20) yang berbunyi; “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kehidupan”. Dalam prakteknya, kaum perempuan lebih banyak bekerja pada bidang domestik daripada publik atau politik.
- 2) UU No. 1 tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya UU no.12 tahun 1948 (pasal 1) tidak diperbolehkan perempuan yang bekerja umur 14 tahun ke bawah, tetapi kenyataannya hal ini tidak ditepati.
- 3) UU No. 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala diskriminasi terhadap perempuan, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa semua menganggap tenaga kerja wanita sebagai bujangan implikasi diskriminasi imbalan jasa (Djumaldji, 1989:58).
- 4) Ketentuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja (pasal 3 ayat 1) belum mencapai tujuan, tampak ada pelanggaran mempekerjakan tenaga kerja wanita yang hamil dan masih di bawah umur.
- 5) Ketentuan tentang perlindungan khusus bagi wanita (UU No.12 tahun 1998) yang meliputi cuti haid, cuti hamil, melahirkan serta kesempatan menyusui anak ternyata dalam praktek, cuti haid tidak selalu diberikan dan diganti dengan uang insentif. Bahkan tenaga kerja wanita terpaksa mengundurkan diri bila hamil atau diadakan pemutusan kerja (PHK)
- 6) Konvensi pengupahan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk pekerja yang sama nilainya. Pada

prakteknya dana kesehatan yang dimiliki istri sebagai pegawai tidak diperhitungkan.

- c. Nilai budaya yang langgeng
Sejarah manusia, baik dulu hingga sekarang tampak bahwa laki-laki dan perempuan tidak setara. Wanita selalu mengalami ketidakberuntungan yang disebabkan oleh nilai budaya yang terpateri di masyarakat seakan-akan tak dapat diubah oleh waktu dan zaman. Ketidakberuntungan wanita ini dapat dilihat dari berbagai bidang.

5. Mendidik Anak Perempuan Menampung Masa Depan

Keberadaan kaum perempuan yang memprihatinkan di negara-negara sedang berkembang sungguh menyentuh hati Dr Nils Daulaire ketika bersama anak perempuannya berusia 11 tahun berjalan-jalan di sebuah daerah pedesaan Nepal (kawasan Pergunungan Himalaya) .

Pada suatu hari sang ayah bersama putrinya itu berhenti sejenak untuk berbincang-bincang dengan dua anak laki-laki Nepal, yang kemudian dengan heran menatap si gadis Amerika berambut pirang yang jangkung itu. Kedua anak laki-laki itu mengira gadis yang bersama Daulaire itu adalah istrinya, tetapi setelah dijelaskan bahwa dia sebagai putrinya yang masih berstatus pelajar, kedua bocah ini menjadi bingung karena yang mereka ketahui selama ini adalah para gadis negeri itu tidak pernah mengenal pendidikan.

Seketika itulah terjadilah percakapan singkat sebagai berikut: “Bagaimanakah keadaan anak-anak perempuan di sekolahmu?” tanya gadis Amerika yang bisa berbahasa Nepal itu. “Anak perempuan? Tidak ada anak perempuan di sekolah kami. Mengapa engkau bertanya pertanyaan semacam itu?” jawab kedua bocah Nepal itu ternyata anak-anak perempuan di Nepal umumnya harus bekerja dan yang bersekolah hanyalah anak lelaki, sehingga gadis tadi bertanya kembali kepada kedua bocah itu, “Mengapa kalian tidak bekerja?” “Kami harus ke sekolah,” jawab kedua anak putra itu. Bagi Daulaire, yang juga sebagai penasehat senior pada Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), ilustrasi di atas menunjukkan betapa sulitnya masyarakat di negara-negara sedang berkembang memahami pentingnya pendidikan bagi anak-anak perempuan. Saat ini sudah di pertiga dari satu miliar manusia yang buta aksara di seluruh dunia adalah perempuan. Namun pernah dalam suatu konferensi di Washington sekitar 500 pejabat kesehatan dan pendidikan dari seluruh dunia bertemu di bawah pengawasan USAID dengan para pejabat AS dan PBB guna bertukar pikiran tentang cara perubahan keadaan kaum wanita yang memprihatinkan itu.

Mengapa repot? Kaum perempuan berpendidikan cenderung lebih membatasi jumlah kelahiran, membentuk keluarga kecil, menjaga kelangsungan hidup dan dapat mendidik anak-anak mereka,” kata Daulaire dalam suatu wawancara dengan kantor berita *Reuteri*. ”ternyata salah satu daya dorong yang kuat dalam pembangunan pada tingkat rumah tangga ialah pendidikan anak-anak perempuan pada khususnya dan wanita pada umumnya,” katanya.

Menurut Daulaire, di manapun program pendidikan wanita ini dilakukan, hasilnya selalu memuaskan. Hasil yang diperoleh dari pendidikan kaum wanita dalam hubungan kesehatan, kesuburan dan perkembangannya, jauh lebih baik dari pada yang berlaku bagi anak-anak pria. Anak-anak pria memang memanfaatkan pendidikan mereka tetapi tidak diteruskan dalam seluruh keluarga seperti yang dilakukan anak-anak perempuan.

Di Nepal tempat Daulaire pernah bekerja di bidang kesehatan ibu dan anak, upaya pendidikan ini dapat meningkatkan hampir 50 persen wanita di sana bebas buta huruf. Daulaire mengatakan, bahwa pada 1991, hanya 22 persen wanita di Nepal yang melek aksara. Tetapi pada 1997 persentasenya meningkat menjadi 32 persen. Dan jumlahnya terus meningkat.

Melalui program pendidikan majalah-majalah bergambar dengan uraian sederhana tentang kesehatan, peternakan hewan, dan pengaturan ekonomi rumah tangga. Karena para wanita itu bekerja di rumah-rumah tangga dan di ladang, pelajaran diberikan pada sore hari. Para guru orang Nepal asli yang sudah terlatih harus datang ke desa-desa dan mengajar kelompok-kelompok kecil wanita. “para wanita itu harus melakukan sesuatu yang bisa dan sederhana sesuai kehidupan sehari-hari, mudah diterima dan menyenangkan,” kata Daulaire. Ternyata separuh dari jutaan wanita di Nepal telah dilatih dengan cara seperti ini dan para suami mereka tidak keberatan dengan program tersebut. salah satu hal yang kami dapati dalam program pendidikan ini, walaupun kecil artinya dan tanpa gembar gembor, wanita dilibatkan dalam suatu situasi di mana mereka dapat menciptakan suatu yang baru secara ekonomis,” kata Daulaire. Sekali mereka dapat melakukan penjumlahan sederhana dan cara pembukuan, mereka diajarkan membuat program simpan pinjam. Setiap kelompok masyarakat mempunyai perkumpulan simpan pinjam tersendiri dan dapat memberi pinjaman sampai US\$500 atau lebih. Setiap anggota yang mau meminjam harus diteliti oleh kelompoknya dan semua wanita dalam perkumpulannya sama-sama bertanggung jawab atas pinjaman tersebut. Misalnya bila seorang wanita diberi pinjaam untuk membeli sebuah mesin jahit, wanita tersebut harus benar-benar bisa menjahit untuk memperoleh uang. Jadi, menurut Daulaire, wanita yang memiliki pendidikan dasar dari suatu keterampilan tertentu, pintu terbuka bagi dia untuk mencari uang.

Daulaire mengatakan 98 persen dari uang yang dipinjamkan umumnya dapat dibayar kembali oleh si peminjam. Dan para wanita lainnya yang tertarik untuk berlangganan bahan-bahan bacaan yang menyangkut kehidupan mereka cenderung dapat mengajarkannya lagi kepada para putri mereka.

USAID berharap, mengentaskan buta huruf di sejumlah negara dengan inisiatif pendidikan anak gadis dan wanita yang tujuan akhirnya menuju pada pendidikan menyeluruh “kami bekerja sama dengan departemen pendidikan di banyak negara,” kata Daulaire. Sebagian besar uang dari negara saya sekarang mengalir ke berbagai universitas dan mayoritas penduduk yang membutuhkannya, katanya. Pentingnya pendidikan bagi anak perempuan menurut Daulaire, adalah kunci bagi pembangunan suatu dunia yang modern. (**baroto-miol**).

Menurut Martoenoes Arifin ada beberapa asumsi yang mendasari pelaksanaan pendidikan wanita, yaitu:

1. Bahwa anak laki-laki itu secara kodrat di karuniai kelebihan dari laki-laki oleh karena laki-laki adalah pemimpin atau membimbing bagi wanita.
2. Wanita di samping memiliki kekurangan, juga memiliki kelebihan dari laki-laki oleh karenanya wanita jika memperoleh kesempatan yang sama untuk hal yang netral dapat berprestasi sama dengan laki-laki dan untuk hal-hal khusus bahkan dapat melampaui prestasi laki-laki.

Asumsi kedua lebih realist dan lebih tepat untuk lanjutan pendidikan gender. Sementara pelaksanaan pendidikan wanita menurutnya bahwa:

1. Pendidikan wanita yang diberikan ke sistem persekolahan menampilkan program khusus pendidikan wanita.
2. Pendidikan wanita di keluarga merupakan dasar dan penunjang pelajaran pendidikan wanita di sekolah.
3. Pendidikan wanita untuk menunjukkan keterampilan kerja dapat dilaksanakan di lingkungan kerja atau di berikan koordinasi lingkungan kerja.

6. Konsep Citra Wanita

a. Cinta wanita dalam aspek fisik

Menurut Saldi (1988-164) citra fisik wanita adalah citra fisik dewasa, wanita yang sudah berumah tangga. Secara fisiologis, wanita dewasa dicirikan oleh tanda-tanda jasmani, antara lain: dengan dialaminya haid dan perubahan fisik lainnya seperti tumbuhnya bulu di bagian badan tertentu,

perubahan suara, siklus haid, buah dada membesar dan lain sebagainya. dalam aspek fisik ini, wanita mengalami hal-hal yang khas, yang tidak dialami pria, misalnya hanya wanita yang bisa hamil, melahirkan dan menyusui anak-anaknya.

b. Citra wanita dalam aspek psikis

Ditinjau dari segi psikisnya wanita adalah makhluk yang berfikir, berperasaan dan beraspirasi. Dengan meningkatkan faktor fisik dan psikis, keduanya ikut mempengaruhi dan menentukan citra perilakunya.

Kartono (1981:175) dalam aspek psikisnya kejiwaan wanita dewasa ditandai antara lain oleh sikap bertanggung jawab penuh terhadap diri sendiri. Ada keputusan hati yang dipilih wanita sesuai dengan aspek psikisnya sebagai wanita dewasa. Berbagai aktivitas yang ditempuhnya sebagai konsekuensi tanggung jawab pembentukan pribadi. Selanjutnya Kartono mengatakan bahwa aspek psikis ini dapat dicitrakan dari gambaran pribadi, dengan memilih relasi sosial yang sifatnya stabil. Misalnya perkawinan, pilihan sikap, pilihan pekerjaan dan sebagainya. citra wanita dalam aspek psikis adalah wanita dewasa yang berkarakteristik stabil, wanita yang tetap memilih perannya, baik sebagai ibu rumah tangga, istri, pembantu rumah tangga, maupun sebagai individu wanita secara umum.

Sugiasuti (2000:107) berpendapat bahwa psikis wanita tercitrakan pula sebagai insan yang bersifat sosial. Artinya, wanita menonjolkan sifat sosialnya dan memperhatikan sesama kaumnya. Sikap ini memperhatikan wanita sebagai insan sosial mencari perhatian di luar dirinya, yang juga diarahkan kepada suami dan anak-anaknya. Wanita dicitrakan sebagai pengasuh suami dan anak-anaknya, yang dituntut dengan rasa keibuan. Oleh karena itu, psikis wanita tercitrakan sebagai psikis orang terbuka, sehingga ia cepat membuka diri bagi orang lain baik sesama wanita maupun bagi lawan jenis.

c. Citra diri wanita

Berdasarkan klasifikasi citra fisik dan psikis maka dapat diabstaraksikan kedua citra diri wanita. Dalam hal ini wanita dewasa menjadi subjek yang aktif dan dinamis. Dari aspek fisik citra wanita itu melalui pengalaman-pengalaman tertentu yang dialaminya, yang tidak dialami oleh pria misalnya sobeknya selaput darah, melahirkan dan menyusui anaknya. Citra diri wanita ini berbeda juga dengan pria antara lain fisik yang lembut, lincah dan lemah, struktur tingkah lakunya cara berpakaian dan citra fisiknya.

Citra diri wanita memperlihatkan bahwa apa yang dipandang sebagai perilaku wanita bergantung pada bagaiman aspek fisik disosialisasikan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Nilai-nilai itu terwujud atas dasar pandangan wanita itu sendiri dan pandangan pria dalam

masyarakat.dengan demikian sebenarnya aspek fisik, psikis dan sosial itu saling berkaitan sebagai pendukung terciptanya citra diri wanita.

d. Citra sosial wanita

Citra wanita dalam aspek sosial yaitu peran wanita dalam keluarga dan peran wanita dalam masyarakat. Peran ialah yang dimainkan oleh seseorang pada setiap keadaan dan cara tingkah laku untuk menyelaraskan diri dan keadaan (Wolfman, 1989:10). Peran dapat berarti seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peranan wanita artinya bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan wanita, yaitu ada tujuh peranan yang dapat dimainkan wanita yang sebagian berorientasi pada keluarga dan sebagian berorientasi pada masyarakat. Ketujuh peranan tadi adalah: 1). Sebagai orang tua, 2). Sebagai istri, 3). Di dalam rumah tangga, 4). Dalam kekerabatan, 5). Pribadi, 6). Komunitas, dan 7). Di dalam pekerjaan (Oppong dan Church, 1981:1) peran-peran itu menyangkut peran wanita sebagai individu dan peran wanita sebagai makhluk sosial.

7. Ideologi Gender dan Pengembangan Karier Perempuan

Sejarah kehidupan perempuan dalam pekerjaan melalui proses sosialisasi yang berbeda terhadap pengenalan kerja antara pria dan wanita. Proses sosialisasi tersebut tanpa pada pembagian kerja anak pria dan wanita dalam keluarga yang berlanjut dalam masyarakat (budaya). Berdasar pada ideologi gender yang dianut, masyarakat kemudian menciptakan peran gender antar anak pria dan wanita yang bersifat oposisional corner dalam (Saptari & Holzner, 1995). Dalam pembagian peran gender ini anak wanita lebih banyak diarahkan pada peran-peran domestik, produktif, feminim, dan jika wanita itu bekerja buka sebagai pencari nafkah utama, publik, maskulin, dan pencari nafkah utama tetapi hanya sebagai pencari nafkah tambahan *secondary earner* (Fakih, 1997). Karena itu wanita cocok bekerja di rumah, sebagai ibu rumah tangga, pendamping suami, merawat dan mengasuh/membesarkan anak, sedangkan anak pria sangat cocok bekerja di luar rumah.

Sejumlah literatur mengkonfirmasi bahwa wanita sebagai kelompok lebih terkonsentrasi pada pekerjaan-pekerjaan status rendah, gaji rendah, dan tidak diperhitungkan atau tidak dianggap sebagai pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau peran kerumah-tanggan, dan karir-karir atau peran-peran yang dianggap sekunder (prioritas kedua). Jika wanita bekerja di luar rumah, maka pekerjaan yang tidak terlalu menuntut pemikiran rumit, atau jenis pekerjaan yang menuntut keterampilan praktis, misalnya pekerjaan

sebagai guru, sekretaris, perawat (Brown&Brools, 1987; Isaacson&Brown, 1993).

Walaupun jenis pekerjaan seperti guru, sekretaris dan perawat seolah-olah lekat pada perempuan (*stereotip gender*), namun jika pekerjaan tersebut ditingkatkan ke jenjang yang lebih seperti menjadi kepala sekolah, sekretaris wilayah daerah, dan kepala keperawatan, maka tidak secara otomatis jenis-jenis pekerjaan tersebut menjadi milik perempuan.

Sistem patriarkhi yaitu suatu sistem hubungan sosial antara wanita dan pria dimana pria mendominasi kehidupan wanita. Kehidupan wanita, agaknya telah menghambat perempuan untuk melangkah maju yang bekerja sebagai guru diarahkan untuk menangani pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan intern sekolah, dan jika pekerjaan tersebut menyangkut aspek yang lebih luas maka hal itu menjadi tugas guru pria.

Di Benedetto&Tittle (dalam Isaacson&Brown, 1993) mengemukakan bahwa salah satu perbandingan yang sering digunakan sebagai pendekatan untuk membedakan proses perencanaan karir antara pria dan wanita adalah dengan melihat perbedaan-perbedaan perspektif di antara mereka. Dalam hal ini wanita merencanakan pekerjaan/karier mereka berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang berhubungan dengan keluarga atau karir. Sementara pria merencanakan karir berdasar pada peran-peran yang bersifat independen selanjutnya dikemukakan bahwa anggota gerakan gender menemukan bahwa faktor-faktor lain yang mempengaruhi perkembangan karir wanita antara lain: tujuan-tujuan hidup, perilaku interpersonal, dan masalah-masalah insidental seperti perkosaan, dan pelecehan seksual (*Isaacson&Brown, ibid*)

Dalam pengembangan profesi, wanita sering diperhadapkan pada perlakuan diskriminatif (Smita&kristi, 1997), karena perempuan mengalami masa perubahan biologis, seperti menstruasi dan kehamilan. Juga wanita mengalami konflik peran sebagai konsekuensi dari peran gandanya. Demikian pula dengan kesempatan untuk melanjutkan studi, mengikuti seminar, penataran atau pelatihan, dan kegiatan-kegiatan yang relevan dengan ilmunya. Faktor lain yang mendasar sehubungan dengan pemilihan dan pengembangan karir tidak hanya didasarkan pada bagaimana mereka memandang diri sendiri, dan melakukan pilihan-pilihan karir, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana orang lain (pekerja-pekerja lain atau rekan kerja) menerima dan berinteraksi dengan mereka, dan hal ini sangat mempengaruhi pilihan kesuksesan dan mobilitas karir mereka.

Bagi guru wanita, dikotomi peran gender menimbulkan sejumlah problem, antar lain: Pertama, sekalipun mereka telah menekuni karir sebagai guru, terjun kedua publik produktif, namun mereka tetap dituntut bertanggung jawab terhadap penyelesaian tugas-tugas domestik reproduktif. Kedua, dalam

melaksanakan tugasnya sebagai guru di sekolah, mereka dituntut memperhatikan kinerja profesionalnya. Banyaknya waktu dan tenaga yang dikeluarkan dalam merampung tugas-tugas domestik reproduktif menyebabkan guru wanita tersebut kehilangan banyak kesempatan menekuni tugas profesionalnya. Akibatnya kinerja dan etos kerja mereka pun menjadi rendah. Kondisi seperti itu pada akhirnya sering kali dijadikan alasan pembenaran bahwa mereka tidak layak untuk dipromosikan menjadi kepala sekolah yang membutuhkan pengenerahan perhatian yang lebih besar.

8. Wanita dan Kepemimpinan

Pada dasarnya wanita yang lahir ke dunia ini membawa sejumlah satu di antara potensi itu adalah menjadi pemimpin (baik pria maupun wanita) untuk menjadi seorang pemimpin, terutama pemimpin di luar rumah dibutuhkan persyaratan-persyaratan khusus, sesuai dengan bidang yang akan dimasuki. Karena itu seorang calon pemimpin harus menjalani pendidikan formal, di samping pendidikan informal dan non formal.

Pada bagian terdahulu telah diuraikan tentang perbedaan pembentukan anak pria dan wanita. Pada pria dituntut sebagai pencari nafkah utama, dan pada wanita bukan sebagai pencari nafkah utama, dan bahkan bukan hanya menjadi pemimpin diutamakan pria (hanid, 1995). Berdasarkan tuntutan itu maka pria lebih diprioritaskan dalam hal pendidikan formal dibandingkan wanita. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Goldenberf&Goldenberg (1985) yang mendeskripsikan bahwa dalam masyarakat tradisional orientasi pendidikan bagi wanita adalah rumah atau anak. Jika wanita disekolahkan maka sekolah yang akan dimasukinya adalah sekolah yang berhubungan dengan kerumahtanggan dan perawatan anak (stereotipe gender dalam pendidikan dan pekerjaan). Misalnya sekolah kesejahteraan keluarga, sekolah keperawatan, sekolah-sekolah kejuruan dan sesuai dengan orientasi pendidikan mereka, jenis dan level pendidikan yang sesuai dengan orientasi pendidikan mereka, jenis dan level yang dapat menunjang pekerjaan-pekerjaan rumah tangga (Goldenberg&Goldenberg, 1985).

Dalam masyarakat modern, pajangan tersebut di atas telah bergeser dan mulai ditinggalkan. Wanita telah memahami bahwa pendidikan adalah “sarana yang ampuh untuk menghapus kesenjangan dan menciptakan kesamaan (Naisbit, 1995). Golemen (1996) mengemukakan bahwa sesungguhnya” manusia memiliki dua sisi kemampuan, sisi ang satu adalah kemampuan untuk menggunakan rasionya, dan sisi yang lain adalah kemampuan untuk menggunakan perasaan/emosinya. “pertama, merupakan kemampuan rasional, adalah model pemahaman yang lazim disadari: lebih menonjol kesadarannya, bijaksana, mampu bertindak hati-hati dan

merefleksi. Kedua, merupakan kemampuan emosional, yaitu model pemahaman yang impulsif dan berpengaruh besar dan kadang-kadang tidak logis. Pikiran yang pertama, lebih menekankan pada upaya untuk memecahkan masalah secara logis rasional dengan memanfaatkan kemampuan rasio/akal. Yang selanjutnya dikenal dengan kecerdasan intelektual (IQ). Sedangkan yang kedua, lebih menunjukkan pada kemampuan merespon setiap fenomena secara psikologis-emosional, yang selanjutnya dikenal dengan sebagai kecerdasan emosional (EQ).

Patton (1998) mengemukakan bahwa untuk menjadi pemimpin yang berhak hendaknya memiliki EQ yang tinggi di samping IQ. EQ merupakan kualitas-kualitas emosional yang sangat penting bagi keberhasilan manusia. Yang meliputi: empati, mengungkapkan dan memahami perasaan, mengendalikan marah, kemandirian, kemampuan penyesuaian diri, disukai, kemampuan menyelesaikan masalah-masalah antar pribadi, ketekunan, kesetiakawanan, keramahan dan sikap hormat (Shapiro, 1997). IQ adalah kapasitas dan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau memecahkan suatu problem yang dihadapainya melalui hasil kerja otak yang bertuang dalam alur-alur pemikiran rasional.

Sejumlah ahli mengemukakan bahwa, kepemimpinan seseorang akan berhasil jika ia memiliki EQ yang lebih tinggi daripada IQ, namun lebih baik lagi jika EQ dan IQ sama tinggi (Shapiro, 1997; Gottman & De Claire; Patton, 1998). Dengan EQ yang tinggi individu akan lebih mudah berinteraksi sosial sebagai syarat utama menjadi pemimpin. Dalam pengembangan kepribadian perempuan, mereka lebih diarahkan kepada pribadi yang penuh pengabdian dan kasih sayang, setia dan loyal terhadap suami (Goldenberg & Golderber, 1985). Ini sejalan dengan pembentukan anak perempuan bugis yang ditanamkan sejak dini, menuntut pribadi-pribadi untuk berperilaku sabar, mengalah, "lebih hormat dan mengutamakan pria" penuh pengabdian dan kasih sayang, setia dan loyal kepada suami (Panagi, 1989), merupakan faktor-faktor penunjang bagi wanita untuk memiliki EQ yang tinggi sehingga ia dapat mudah berempati kepada sesamanya, berbeda dengan pria, mereka tidak terbiasa dengan perilaku-perilaku seperti itu, sehingga hampir semua tindakan diukur dengan IQ nya, cara kerja tampak seperti robot yang mengabaikan hubungan sosial sebagai syarat utama menjadi pemimpin. Karena itu laki-laki lebih mudah stres jika menghadapi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan perilaku-perilaku manusia yang menyimpang.

Dalam era globalisasi sekarang ini, makin banyak persoalan-persoalan yang rumit dan kompleks, diperlukan pemimpin yang berkualitas. Dengan tidak mengabaikan IQ, pemilikan EQ yang tinggi pada wanita merupakan keunggulan baginya, karena mereka sudah terbiasa dengan perlakuan yang kurang/tidak menguntungkan sehingga mereka tidak mudah

stress jika menghadapi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan perilaku manusia yang menyimpang. Dengan dasar pemikiran itu maka peluang wanita untuk menjadi kepala sekolah sangat besar.

D. Latihan

1. Jelaskan konsep dasar pendidikan wanita/Gender!
2. Jelaskan urgensi pendidikan wanita!
3. Jelaskan berbagai manifestasi tentang ketidakadilan gender!
4. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor penyebab ketidakadilan gender!
5. Jelaskan kaitan antara mendidik anak perempuan sama dengan menampung masa depan!
6. Jelaskan konsep dasar citra wanita!
7. Jelaskan hubungan antara Ideologi gender dan pengembangan karier Perempuan!
8. Jelaskan hubungan antara wanita dan kepemimpinan

BAB XI

PENDIDIKAN SEKS

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari uraian materi pada bab ini, maka mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan asumsi dan konsep pendidikan seks
2. Menjelaskan pentingnya pendidikan seks di keluarga
3. Menjelaskan peranan sekolah dalam pendidikan Sseks
4. Menjelaskan tujuan pendidikan seks
5. Mengidentifikasi hubungan antara remaja dan hubungan seksual pranikah
6. Mengidentifikasi hubungan antara pacaran dan pendidikan seks
7. Mengidentifikasi keterkaitan antara remaja, pornografi dan pendidikan Seks
8. Menjelaskan pentingnya pendidikan seks dan kespro masuk dalam kurikulum

B. Pendahuluan

Dewasa ini, kehidupan seks bebas telah merebak ke kalangan kehidupan remaja dan anak. Hal ini dapat kita semak melalui penuturan yang disampaikan oleh Mestika (1996) yang merangkum hasil penelitian para pengamat masalah sosial remaja di beberapa kota besar. Hasil penelitian tersebut antara lain: Sarwono (1970) meneliti 117 remaja di Jakarta dan menemukan bahwa 4,1% pernah melakukan hubungan seks. Beberapa bulan kemudian, Eko (1983) meneliti 461 remaja, dan dari penelitian ini diperoleh data bahwa 8,2% di antaranya pernah melakukan hubungan seks dan 10% di antaranya menganggap bahwa hubungan seks pra nikah adalah wajar.

Di Semarang, Satoto (1992) mengadakan penelitian terhadap 1086 responden pelajar SMP-SMU dan menemukan data bahwa 4,1% remaja putra dan 5,1% remaja putri pernah melakukan hubungan seks. Pada tahun yang sama Tjitarra mensurvei 205 remaja yang hamil tanpa diketahui. Survei yang dilakukan Tjitarra juga memaparkan bahwa mayoritas dari mereka berpendidikan SMA ke atas, 23% di antarnya berusia 15-20 tahun dan 77% berusia 20-25 tahun.

Selain kehidupan seks bebas, kejahatan seks terhadap anak-anak saat ini ternyata tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak dikenal oleh korbanya. Dalam beberapa kasus yang terjadi, kejahatan seks justru dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan kehidupan anak. Rangkuman terhadap kejahatan seks ini ditampilkan dalam sarasehan yang bertepatan "Fenomena Seks Terhadap Anak-Anak" yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Wanita – Lembaga Penelitian Unair Surabaya dua tahun yang lalu dan pernah dimuat di Suara Pembaharuan tahun 1996.

Data yang ada mengenai kejahatan seks, selama tahun 1995 terjadi 12 kasus kejahatan seks yang dilakukan oleh orang tua kandung maupun tiri, 7 kasus dilakukan oleh saudaranya, 4 kasus oleh guru dan oleh teman atau kenalan sebanyak 49 kasus. Keadaan seperti itu jelas sangat memprihatinkan.

Kebutuhan akan pemahaman yang benar tentang hakikat seksualitas manusia di kalangan remaja kian mendesak untuk dipenuhi jika peran massa dalam mengkomunikasikan pesan-pesannya juga diperhatikan dengan seksama. Hal itu perlu mendapat perhatian, ketika media massa dalam pesannya sering melecehkan seksualitas manusia walaupun tujuan utama dari media massa adalah semata-mata untuk menarik minat konsumen terhadap suatu barang dagang. Kartono (1994) menyarankan agar format penyusunan dan penyajian di media massa diatur, sehingga materi maupun pesan yang disampaikan benar-benar bermuatan nilai-nilai pendidikan.

Pendidikan seks bebas dan kejahatan yang terjadi belakangan ini adalah hal-hal yang perlu diketahui oleh remaja agar mereka dapat mengantisipasi dan mengatasi masalah tersebut. Remaja masa kini perlu disadarkan akan perlunya sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri dan lingkungannya demi masa depan yang cerah. Remaja juga perlu ditumbuhkan kesadaran akan perlunya suatu sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap dirinya dan lingkungan melalui informasi tentang hakikat seksualitas pada diri mereka dan pada diri manusia pada umumnya secara benar.

Informasi yang benar dapat diartikan melalui pendidikan seks. Pendidikan seks ini dapat diberikan oleh orang tua ataupun pihak sekolah.

C. Uraian Materi

1. Asumsi dan Konsep Pendidikan Seks

Pendidikan seks merupakan salah satu aspek pendidikan SDM yang perlu mempunyai pengkajian. Syamsuddin mendefinisikan pendidikan seks sebagai usaha untuk membimbing seseorang agar dapat mengerti benar-benar tentang arti kehidupan seksnya. Sehingga dapat mempergunakannya dengan baik selama hidupnya. Dr. A. Nasih Ulwan menyebutkan bahwa

pendidikan seks adalah upaya penyadaran pengajaran dan penerangan tentang masalah-masalah seks yang diberikan kepada anak agar ia mengerti masalah-masalah yang berkenaan dengan seks, naluri dan perkawinan, sehingga jika anak telah dewasa dan dapat memahami unsur-unsur kehidupan ia telah mengetahui masalah-masalah yang di halalkan dan di haramkan bahkan mampu menerapkan tingkah laku islami sebagai akhlak, kebiasaan, dan tidak mengikuti syahwat maupun cara-cara hedonistik.

Perkembangan masyarakat (*social Development*), Penyusunan Nilai (*Social Detlook*), Penemuan ilmiah (*Sociativitas*), dsb. selama ini turut memberikan dampak bila hubungan dan pergaulan bebas sejenis yang mulai jauh dari yang diharapkan. Sementara itu pendidikan seks di sekolah selama ini masih dianggap tabu bahwa pendidikan seks di dalam masyarakat dan di rumah tangga selama ini juga belum punya arti apa-apa. Agaknya kebutuhan akan pendidikan seks yang diberikan di sekolah dan di rumah semakin hari semakin penting. Apa alasan dan bagaimana solusinya pendidikan seks itu agar perlu dikembangkan asumsi berikut ini:

- a. Manusia umumnya Homo Seksualitas dalam arti selalu mendekati berhubungan dan mendekati lawan jenis.
- b. Seks adalah suatu anugrah bagi manusia dan harus dipandang sebagai kebijakan manusia dan kebijakannya itu sendiri.
- c. Cita dan kasih sayang adalah satu sifat hakekatnya pendidikan seks.

Ada beberapa konsepsi pelaksanaan pendidikan seks:

- a. Menurut S.Freud manusia pada hakekatnya adalah Homo artinya dalam berbuat selalu terdorong dari dalam. Apakah yang terdorong dari dalam itu? Bagi Freud adalah libido seksual akan dorongan seks.
- b. Dorongan seks (Libido) itu sudah ada sejak manusia itu selagi bayi bagi perilaku bayi mengisap jari, membawa apa saja yang dipegangnya kemulut, bermain dengan sendiri, merasa senang membuka baju dan mempertontonkan auratnya kepada orang lain, hal tersebut dapat diterjemahkan/diklasifikasikan dari libido sekaligus itu. Perkembangan libido seksualitas dari anak ke orang dewasa merupakan perkembangan alami.
- c. Freud membedakan seks pada anak dan seks pada orang dewasa sbb: "bahwa seks pada anak dalam arti sesungguhnya belum". Seks pada anak barulah dalam arti kelunakan atau dalam arti erotis (rasa senang). Misalnya arti merasa senang dan puas mengisap jarinya bahkan tidur nyenyak karenanya. Sedang anak akan merasa sedang mempertontonkan kepada orang lain.

- d. Bagi Freud semua itu merupakan hal yang penting janganlah sampai mengalami siksa (terikat pada keadaan lampau). Contoh fiksasi itu makanya orang dewasa berlebihan menanamkan fiksasi pada net. Orang dewasa/perempuan yang senang berpakaian serba modern yang menanamkan fiksasi pada fase genetika, dsb.
- e. Menurut W. Stern (Paedagago Belanda) cinta sejati adalah cinta seorang ibu terhadap anaknya. Cinta terhadap manusia lainnya bukanlah cinta sejati, karena masih dicampur oleh unsur biologis.
- f. Pendidikan terhadap seks terdahulu pula bertumbuh pada pemenuhan kebutuhan terhadap seks itu, sehingga kita memiliki satu konsep pendidikan seks yang kuat dan jelas apabila pendidikan seks itu hendaknya dilaksanakan di sekolah.
- g. Salah satu prinsip pendidikan mendasar tentang seks tadi, contoh dalam pendidikan seks itu semua masyarakat perlu diadakan. Adapun yang perlu dicegah adalah masyarakat yang bersifat keras, jadi pendidikan seks yang blak-blakan tidak sesuai dengan kodrat awal (kelunakan).
- h. Oleh karenanya strategi pendidikan seks yang tepat bukan / *adone you help, expose you*. Jadi tidak membiarkannya secara terbuka melainkan lebih mendalam dengan perasaan-perasaan yang jelas.

2. Pendidikan Seks di Keluarga

Membuka komunikasi mengenai seksualitas harus dijalin sejak kecil memulai pendidikan seks dalam keluarga. Seks juga dilihat bukan sebagai sesuatu yang tabu, tetapi merupakan bagian dari kehidupan manusia dalam *proporsi* yang wajar. Bila seks masih dianggap tabu, maka akan banyak ditemukan salah pengertian dan problema seksual yang terselubung. Akibatnya timbul berbagai masalah seksual dan kejiwaan.

“Korban di kalangan remaja akibat hubungan seks bebas sangat banyak. Hal ini selain disebabkan kurangnya informasi tentang seks, juga karena remaja sangat mudah mengatakan *I love you*. Jadi kurang memadainya penerangan seksual pada remaja bisa menyebabkan masalah seksual pada mereka, “ ungkap psikiater Bagian Psikiatri FK Unpad/RSHS, Teddy Hidayat, pada seminar sehari Kesehatan Reproduksi di Aula Dinas kesehatan Jabar yang diadakan Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Cabang Bandung /Jabar dalam rangka Pertemuan Ilmiah Tahunan ke-XIV POGI, Sabtu (22/5). Menurut dia, dalam usaha mengerti perubahan pada diri sendiri, remaja berusaha mencari keterangan ke sana-sini, tetapi sering usahanya tidak berhasil. Akibatnya keterangan didapat dari

sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya dari bacaan porno, blue film, dll.

Remaja menurut Teddy, terdorong untuk membuktikan identitas dirinya sebagai pria atau wanita. Terkadang dorongan itu terjadi secara berlebihan, sehingga menimbulkan berbagai masalah seksual. Pada remaja pria dorongan yang berlebihan ini dapat menjerumuskan kepada kenakalan remaja.

“Dari hasil poling dari 200 mahasiswa yang duduk di semester I, II dan III di sebuah perguruan tinggi ternama di Bandung, 10% di antaranya mendapat informasi mengenai seks dari situs porno dan 60% lainnya dari film porno. Sisanya dari koran, tabloid, serta majalah,” jelas Teddy. Selain itu, dari 200 responden, 50% mahasiswa di antaranya telah melakukan hubungan badan satu kali dan 20% di antaranya lebih dari dua kali atau berganti pasangan. Namun data ini hanya bersumber dari satu perguruan tinggi saja. Jadi jika respondennya lebih dari satu universitas, maka kemungkinan data tersebut bisa lebih.

3. Peranan Sekolah dalam Pendidikan Seks

Pada dasarnya pendidikan seks yang terbaik adalah yang diberikan oleh orang tua sendiri. Diwujudkan melalui cara hidup orang tua dalam keluarga sebagai suami istri yang bersatu dalam perkawinan (Aryatmi, 1985; Tukan; 1989; Howard, 1990). Pendidikan seks ini sebaiknya diberikan dalam suasana akrab dan terbuka dari hati ke hati antara orang tua dan anak. Kesulitan yang timbul kemudian adalah apabila pengetahuan orang tua kurang memadai (secara teoritis dan objektif) menyebabkan sikap kurang terbuka dan cenderung tidak mendapatkan informasi seks yang tidak sehat. Tentang hal ini Davis (1957) menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut: informasi seks yang tidak sehat pada usia remaja mengakibatkan remaja terlibat dalam kasus-kasus berupa konflik-konflik dan gangguan mental, ide-ide yang salah dalam ketakutan-ketakutan yang berhubungan dengan seks (Bibby, 1957).

Melihat kenyataan tersebut, jelas keluarga membutuhkan pihak lain dalam melengkapi upaya pembelajaran alami terhadap hakikat seksualitas manusia. Pihak lain yang cukup berkompeten untuk menambah dan melengkapi pengetahuan orang tua, menjadi perantara orang tua dan anak dalam memberikan pendidikan seks adalah sekolah. Hal ini didukung oleh Killander (1971) yang menjelaskan peran sekolah sebagai lembaga yang mempunyai situasi kondusif serta edukatif tempat berlangsungnya proses pendidikan demi kedewasaan anak didik. Sekolah merupakan lingkungan kedua setelah keluarga, di mana anak mendapatkan kasih sayang, pendidikan dan perlindungan (wirawan, 1986).

Oleh karena itu, pendidikan seks di sekolah merupakan komplemen dari pendidikan seks di rumah. Hal ini pernah ditegaskan oleh Pusat Kehidupan Keluarga di USA (Killander, 1971). Peran sekolah dalam memberikan pendidikan seks harus dipahami sebagai perlengkapan pengetahuan dari rumah dan situasi lain yang berupaya keras untuk mendidik anak-anak tentang seksualitas dan bukan berarti bahwa sekolah mengambil porsi orang tua (Killander, 1971; Tukan, 1992).

Tujuan pendidikan seks di sekolah seperti yang diungkapkan oleh Federasi Kehidupan Keluarga Internasional ialah:

1. Memahami seksualitas sebagai bagian dari kehidupan yang esensi dan normal.
2. Mengerti perkembangan fisik dan perkembangan emosional manusia.
3. Memahami dan menerima individualitas pola perkembangan pribadi.
4. Memahami kenyataan seksualitas manusia dan reproduksi manusia.
5. Mengkomunikasikan secara efektif tentang pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan seksualitas dan perilaku sosial.
6. Mengetahui konsekuensi serta pribadi sosial dari sikap seksual yang tidak bertanggung jawab.
7. Mengembangkan sikap tanggung jawab dalam hubungan interpersonal dan perilaku sosial.
8. Mengenal dan mampu mengambil langkah efektif terhadap penyimpangan perilaku seksual.
9. Merencanakan kemandirian di masa depan, sebuah tempat dalam masyarakat, pernikahan dan kehidupan keluarga.

Bagi guru yang memberikan pendidikan seks, Killander (1971) mengungkapkan bahwa guru mempunyai peran yang besar, yaitu:

1. Membantu menyeleksi sasaran sosialitas dan pribadi yang dapat dicapai oleh anak didik.
2. Membantu siswa untuk menyadari bahwa sarana tersebut sesuai untuk mereka dan membimbing mereka untuk menerimanya sebagai bagian dari hidup.
3. Membimbing mereka untuk memilih aktivitas-aktivitas dan pengalaman yang baik dalam merencanakan masa depan.

Oleh karena itu, Flake-Hobson (Joice, 1996) menyatakan bahwa pendidikan seks di sekolah harus meliputi pengajaran antara lain:

1. Mengizinkan anak untuk berperan sesuai dengan jenis kelamin dalam ekspresi mereka, kepribadian mereka dan interaksi mereka dengan teman-temannya di kelas.
2. Mengajak siswa untuk berdiskusi mengenai hal-hal yang berkenaan dengan sopan santun terhadap lawan jenis.
3. Memperkenalkan siswa terhadap perkembangan peran seks. Misalnya seorang perempuan akan menjadi siswa yang berstatus ibu rumah tangga atau istri.
4. Menyediakan alat-alat audio visual mengenai perkembangan peran seks kepada siswa dan mengajak mereka untuk berdiskusi.
5. Memperkenalkan siswa kepada bermacam-macam peran seks antara laki-laki dan perempuan.

Tukan (1993) menguraikan materi pendidikan seks di sekolah sebagai berikut:

1. Siswa SD kelas 5 dan 6
Tentang ciri seksualitas primer dan sekunder serang pria, proses terjadinya mimpi basah, menjaga kebersihan kelamin, memakai bahasa yang baik dan benar tentang seks, kepribadian seorang siswa.
2. Siswa SLTPK kelas 2 dan 3
Memperluas apa yang telah dibicarakan di SD kelas 5 dan 6, yakni identitas remaja, pergaulan, dari mana kau berasal, proses melahirkan, dan tanggung jawab moral dalam pergaulan.
3. Siswa SLTA kelas 1 dan 2
Mendalami lagi apa yang telah diberikan di SD dan SLTP yakni secara psikologi pria dan wanita, paham keluarga secara sosiologi, masalah pacaran dan tunangan, komunikasi, pilihan cara hidup menikah atau membujang, pergaulan pria dan wanita, tubuh manusia yang bermakna, penilaian etis yang bertanggung jawab sekitar masalah-masalah seksual dan perkawinan.

Dengan demikian, peranan sekolah dalam memberikan pendidikan seks merupakan suatu tanggung jawab moral bagi perkembangan anak didik. Peranan sekolah harus dimengerti bahwa sekolah merupakan suatu institusi yang bersifat komplementer dan membantu orang tua dalam

memperlancar tugas dan peranan orang tua terutama dalam menanamkan sikap dan perilaku seksual anak terhadap hakikat seksualitas manusia.

Pendidikan seks haruslah dipandang sebagai suatu proses pengalihan nilai-nilai tentang seks yang benar yang didapat anak sebagai bimbingan, teladan dan kepedulian para orang tua dan pendidik dalam membantu anak membangun sikap batin yang sesuai dengan kodrat manusia, tidak hanya akal budi tetapi juga hati nurani. Pendidikan seks juga mempunyai fungsi memberikan landasan dalam membangun suatu hubungan yang objektif dan wajar antara anak dengan tubuhnya.

4. Tujuan Pendidikan Seks

Tujuan pendidikan seks sesuai usia perkembangan pun berbeda-beda. Seperti pada usia balita, tujuannya adalah untuk memperkenalkan organ seks yang dimiliki, seperti menjelaskan anggota tubuh lainnya, termasuk menjelaskan fungsi serta cara melindunginya. Jika tidak dilakukan lebih awal maka ada kemungkinan anak akan mendapatkan banyak masalah seperti memiliki kebiasaan suka memegang alat kemaluan sebelum tidur, suka memegang payudara orang lain atau masalah lainnya.

Untuk usia sekolah mulai 6-10 tahun, pendidikan seks bertujuan untuk memahami perbedaan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), menginformasikan asal-usul manusia, membersihkan alat genital dengan benar agar terhindar dari kuman dan penyakit. Sedangkan usia menjelang remaja, pendidikan seks bertujuan untuk menerangkan masa pubertas dan karakteristiknya, serta menerima perubahan dari bentuk tubuh. Secara garis besarnya, pendidikan seks diberikan sejak usia dini (dan pada usia remaja) dengan tujuan sebagai berikut:

1. Membantu anak mengetahui topik-topik biologis seperti pertumbuhan, masa puber, dan kehamilan
2. Mencegah anak-anak dari tindak kekerasan.
3. Mengurangi rasa bersalah, rasa malu, dan kecemasan akibat tindakan seksual.
4. Mencegah remaja perempuan di bawah umur dari kehamilan.
5. Mencegah remaja di bawah umur terlibat dalam hubungan seksual Mengurangi kasus infeksi melalui seks.
6. Membantu anak muda yang bertanya tentang peran laki-laki dan perempuan di masyarakat

Adapun nilai-nilai pendidikan seks berdasarkan umur anak, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Umur 3-5 tahun

Pada rentang umur ini, sebaiknya diajarkan mengenai organ tubuh dan fungsi masing-masing organ tubuh, jangan ragu juga untuk memperkenalkan alat kelamin si kecil. Saat yang paling tepat untuk mengajarkannya adalah di saat sedang memandikannya. Diharapkan untuk hindari penyebutan yang dianggap tidak sopan di masyarakat untuk menyebut alat kelamin yang dimilikinya. Misalkan seperti vagina atau penis, jangan diistilahkan dengan kata lain seperti “apem” atau “burung”. Ajarkan juga kepada anak bahwa seluruh tubuhnya, termasuk alat kelaminnya, adalah milik pribadinya yang harus dijaga baik-baik.

Dengan demikian, anak harus diajarkan untuk tidak menunjukkan kelaminnya secara sembarangan. Tekankan kepada mereka bahwa mereka memiliki hak dan bisa saja menolak pelukan atau ciuman dan segala macam bentuk kasih sayang yang dinyatakan melalui sentuhan fisik. Hal ini menjadi penting, karena disukai atau tidak, banyak pelaku pelecehan seksual adalah orang-orang yang dekat dengan kehidupan si anak. Orang tua juga diharapkan untuk tidak memaksa seorang anak untuk memeluk atau mencium orang lain jika dia tidak menginginkannya agar si anak bisa belajar untuk menyatakan penolakannya.

2. Umur 6-9 tahun

Di rentang umur ini, si kecil diajarkan mengenai apa saja yang harus dilakukan untuk melindungi dirinya sendiri. Orang tua bisa mengajarkan anak menolak untuk membuka pakaian bahkan jika ada imbalan sekalipun atau menolak diraba alat kelaminnya oleh temannya. Selain itu, di rentang umur ini, Anda bisa menggunakan hewan tertentu yang tumbuh dengan cepat dan terlihat jelas perbedaan jenis kelaminnya (seperti: anak ayam) di saat bertumbuh dewasa untuk mengajarkan mengenai perkembangan alat reproduksi. Ajaklah anak anda untuk turut mengamati perkembangannya. Jika mereka tidak terlalu memperhatikan hingga detail terkecil, Anda bisa berikan informasi lebih lanjut nanti sembari menekankan bahwa alat kelamin mereka juga akan berubah seiring mereka bertumbuh dewasa nanti. Orang tua harus memperhatikan suasana hati anak agar saat menyampaikan materi seksualitas, si anak tidak merasa terpojokkan, malu, bodoh, ataupun menjadi terlalu liar dalam menyikapi seks.

3. Umur 9-12 tahun

Berikan informasi lebih mendetail apa saja yang akan berubah dari tubuh si anak saat menjelang masa puber yang cenderung untuk berbeda-beda di setiap individu. Ajarkan kepada anak bagaimana menyikapi menstruasi ataupun mimpi basah yang akan mereka alami nanti sebagai bagian normal dari tahap perkembangan individu. Pada umur 10 tahun,

sebelum menjelang masa puber, Anda sudah bisa memulai topik mengenai kesehatan alat kelamin. Pastikan juga pada anak Anda, jika dia mengikuti semua peraturan kesehatan ini, maka mereka tak perlu banyak khawatir.

4. Umur 12 -14 tahun

Dorongan seksual di masa puber memang sangat meningkat, oleh karena itu, orang tua mengajarkan apa itu sistem reproduksi dan bagaimana caranya bekerja. Penekanan terhadap perbedaan antara kematangan fisik dan emosional untuk hubungan seksual juga sangat penting untuk diajarkan. Beritahukan kepada anak segala macam konsekuensi yang ada dari segi biologis, psikologis, dan sosial jika mereka melakukan hubungan seksual. Orang tua selain mengajarkan keterbukaan komunikasi dengan anak terutama dalam membicarakan seksualitas, juga perlu menambahkan keuntungan menghindari aktivitas seksual terlalu dini sebelum mencapai masa dewasa.

Hindari penggunaan kata-kata yang menghakimi remaja agar ia tidak merasa ragu, takut, enggan ataupun marah saat membicarakan pengalaman seksual mereka. Jika orang tua merasa agak berat untuk membicarakan topik-topik seksual dengan anak, orang tua bisa meminta bantuan psikolog atau konselor untuk memberikan pendidikan seksual kepada anak dan membantu orang tua merasa nyaman membicarakan topik ini.

5. Remaja dan Hubungan Seksual Pranikah

Remaja kota kini semakin berani melakukan hubungan seksual pranikah. Nampaknya hal itu berkaitan dengan hasil sebuah penelitian, 10-12% remaja di Jakarta pengetahuan seksnya sangat kurang. Ini mengisyaratkan pendidikan seks bagi anak dan remaja secara intensif terutama di rumah dan di sekolah, semakin penting. Pengetahuan yang setengah-setengah justru lebih berbahaya ketimbang tidak tahu sama sekali. Kata-kata bijak ini nampaknya juga berlaku bagi para remaja tentang pengetahuan seks kendati dalam hal ini ketidaktahuan bukan berarti lebih tidak berbahaya. Data yang dikumpulkan dr. Boyke, Dian Nugraha, SDOG, ahli kebidanan dan penyakit kandungan pada RS Dharmais, menunjukkan 16-20% dari remaja yang berkonsultasi kepadanya telah melakukan hubungan seks pranikah. Dalam catatannya jumlah kasus itu cenderung naik; awal tahun 1980-an angka itu sekitar 5-10%.

Sementara itu Dra. Yulia S. Singgih Gunarsa, psikolog dan konselor di sebuah sekolah swasta di Jakarta, juga melihat fenomena banyaknya pasangan remaja yang berhubungan dengan calo jasa pengguguran kandungan di Jakarta Pusat dan penggunaan obat-obat pencegah kehamilan. Data tersebut mungkin tidak mewakili kenyataan yang

sebenarnya, yang bisa menunjukkan angka tinggi atau lebih rendah. Namun setidaknya kasus hubungan seksual pranikah itu ada hubungannya dengan hasil suatu penelitian. Para dokter di Jakarta. Seperti dikutip Boyke, 10-12% remaja di Jakarta pengetahuan seksnya sangat kurang. Dalam kaitan dengan hubungan seksual, bisa diambil contoh ada remaja yang berpendapat, kalau hanya sekali bersetubuh tidak bakal terjadi kehamilan. Atau, meloncat-loncat atau mandi sampai bersih segera setelah melakukan hubungan seksual bisa mencegah kehamilan.

Pengetahuan seks yang hanya setengah-setengah tidak hanya mendorong remaja untuk mencoba-coba, tetapi juga bisa menimbulkan salah persepsi. Misalnya saja, berciuman atau berenang di kolam yang “tercemar” sperma bisa mengakibatkan kehamilan, mimpi basah dikira mengidap penyakit kotor, kecil hati gara-gara ukuran penis kecil, sering melakukan onani bisa menimbulkan impotensi.

Beberapa akibat yang tentunya memprihatinkan ialah terjadinya pengguguran kandungan dengan berbagai resikonya, perceraian pasangan keluarga muda, atau terjangkitnya penyakit menular seksual, termasuk HIV yang kini sudah mendekam di tubuh ratusan orang Indonesia. Bandingkan dengan temuan M. Maheu, Ph. D., psikolog yang berpraktek di Kalifornia, AS, bahwa setiap tahun terdapat 1 dari 18 gadis remaja Amerika Serikat hamil sebelum menikah dan 1 dari 5 pasien AIDS tertular HIV pada usia remaja.

Melihat kenyataan itu, pendidikan seks secara intensif sejak dini hingga masa remaja tidak bisa ditawar-tawar lagi. Apalagi mengingat, “Sebagian besar penularan AIDS terjadi melalui hubungan seksual,” tegas Boyke yang juga pengasuh rubrik konsultasi seks di majalah dan radio. Kalau tidak, mereka yang kini remaja tidak bisa berbuat banyak saat memasuki usia produktif di abad XXI mendatang. Seperti dikutip Boyke, survai oleh WHO tentang pendidikan seks membuktikan, pendidikan seks bisa mengurangi atau mencegah perilaku hubungan seks sembarangan, yang berarti pula mengurangi tertularnya penyakit-penyakit akibat hubungan seks bebas.

Disebutkan pula, pendidikan seks yang benar memasukkan unsur-unsur hak azasi manusia. Juga nilai-nilai kultur dan agama diikutsertakan di dalamnya sehingga akan merupakan pendidikan akhlak dan moral juga. Dengan itu diharapkan angka perceraian yang berdampak kurang baik terhadap anak-anak pun dapat dikurangi. Hanya yang terjadi hingga kini, “Pendidikan seks di Indonesia masih mengundang kontroversi. Masih banyak anggota masyarakat yang belum menyetujui pendidikan seks di rumah maupun di sekolah.” Tutar dr. Gerard paat, konsultan keluarga RS Sint Carolus.

Sekalipun untuk tujuan pendidikan, anggapan tabu untuk berbicara soal seks masih menancap dalam benak sebagian masyarakat. Akibatnya, anak-anak yang beranjak remaja jarang yang mendapatkan bekal pengetahuan seks yang cukup orang tua. Padahal tidak jarang para remaja sendiri yang berinisiatif bertanya, tetapi justru sering disambut dengan “kemarahan orang tua . “Boro-boro mau *ngejelasin* soal seks, baru *nanya* sedikit *aja*, *nyokap* (ibu) sudah *mbentak*, ‘eh itu tabu, jangan *diomongin!*’ “aku seorang remaja putri.

Bahkan anak-anak yang kedua orang tuanya bekerja rata-rata kehilangan panutan. “Orang tua yang mestinya menjadi tokoh panutan utama, justru kurang berperan karena kesibukan mereka sendiri,” kata dr. Paat, yang sejak akhir tahun 1960-an memberikan penyuluhan seks di sekolah dan luar sekolah. Dampaknya tentu bisa kemana-mana. Antara lain dalam memilih konsumsi tontonan di TV yang masih berat dengan tayangan film barat dengan budaya dan gaya hidup yang berbeda. kehidupan dunia barat yang digambarkan dalam film ataupun video, menurut Boyke, sering kali menunjukkan kehidupan seks bebas di kalangan remaja. tanyangan serial semacam *Beverly Hill* atau *Bay Watch* , Boyke menyebut contoh, dengan bintang-bintang molek dan tampan itu mudah sekali merasuk ke dalam benak remaja. Sehingga mereka bisa amat mudah meniru gaya hidup muda-mudi dalam film itu. “Justru ketika informasi itu tidak bisa kita hindari, peranan orang tua untuk memberikan pengertian yang benar pada anak-anak menjadi penting, “tutur Boyke.

Minimnya pengetahuan seks masih ditambah lagi dengan mudahnya mendapatkan prasarana untuk melakukan seks bebas seperti motel, *cottage*, vila; alat kontrasepsi; lebih mudanya rata-rata gadis mendapatkan haid (9-11 th); serta tertundanya usia perkawinan. Semua itu juga faktor yang ikut mempengaruhi remaja melakukan seks bebas dan kumpul kebo. Celaknya, “Remaja yang sudah terbiasa mengadakan hubungan seksual akan sulit menghentikannya,” jelas Paat. Itu bukan semata-mata karena faktor ketagihan, tapi terutama akibat timbulnya persepsi bahwa melakukan hubungan seksual sudah merupakan hal biasa.

Kalau itu sampai terjadi, orang tua harus ikut bertanggung jawab. “Orang tualah yang harusnya pertama-tama memberikan pengetahuan seks bagi anak-anaknya. Informasi seks dari teman, film, atau buku, yang hanya setengah-setengah tanpa pengarah, mudah menjerumuskan. Apalagi kalau si kecil tidak tahu resiko melakukan hubungan seksual pranikah,” kata Boyke. Menurut Paat, pendidikan seks pasif, karena tanpa komunikasi dua arah semacam itu, sudah bisa mempengaruhi sikap serta perilaku seseorang. “dalam pendidikan seks anak tidak cukup hanya melihat dan mendengarkan sekali-dua kali, tapi harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan,”

katanya. Sebab itu, pendidikan seks hendaknya menjadi bagian penting dalam pendidikan di sekolah. Orang tua dan pendidik wajib meluruskan informasi yang tidak benar disertai penjelasan resiko perilaku seks yang salah. Namun, pendidikan seks di Indonesia mestinya hanya pelengkap pendidikan seks di rumah. Bukan justru menjadi yang utama seperti terjadi selama ini, kendati pendidikan seks di sekolah, menurut beberapa pengamat tadi, masih belum optimal.

6. Pacaran dan Pendidikan Seks

Pemberian pengetahuan seks mesti di rumah dilakukan sejak dini dan dimulai dengan perilaku keseharian anak-anak. Ketika masih anak-anak misalnya, berikan pengertian kepada mereka agar tidak keluar dari kamar mandi sambil telanjang, menutup pintu kamar mandi ketika sedang mandi, mengetuk pintu terlebih dahulu sebelum masuk kamar orang tua.

Ketika sudah menginjak bangku SD, remaja putri khususnya, mesti sudah dipersiapkan menghadapi masa akil balik. Pada usia sekitar 14 tahun, remaja putri maupun putra rata-rata mulai ingin tahu segala sesuatu tentang lawan jenisnya. “ini merupakan proses pendewasaan diri, dan tidak bisa dicegah, “tegas Boyke. Di sinilah orang tua mesti mulai lebih sering mengadakan pendekatan dan memasukkan nilai-nilai moral kepada anak.

Pada saat mereka mulai pacaran di usia yang cukup, kata Boyke, tak perlu dilarang-larang. Berpacaran merupakan latihan pendewasaan dan pematangan emosi. Dengan berpacaran mereka bisa merasakan rindu atau rasa memiliki, berlatih bagaimana harus ber-*sharing* dengan pasangan. Pada masa ini orang tua remaja putri hendaknya berperan menjadi teman berdiskusi sambil meneliti siapa pacarnya itu.

Dalam hal ini dibutuhkan komunikasi lebih terbuka antara orang tua dan anak. Melalui komunikasi, yang acap kali banyak diabaikan perannya, orang tua dapat memasukkan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Misalnya, batas mereka boleh bermesraan dan apa konsekuensinya kalau batas itu dilanggar. Kepercayaan dari orang tua akan membuat mereka lebih bertanggung jawab.

Berpacaran secara sembunyi-sembunyi akibat diberi kepercayaan justru tidak menguntungkan. “ingat, kasus-kasus kehamilan pranikah umumnya dilakukan oleh mereka yang *back street*, kata Boyke. “mungkin juga akibat hubungan dengan orang tua kurang akrab atau orang tua terlalu kaku.”

Dr. Paat dan dr. Boyke mengatakan, penjelasan mengenai risiko melakukan hubungan seksual pranikah perlu ditekankan. Umumnya, kehamilan, kemungkinan terinfeksi HIV atau tertular penyakit kelamin kalau bergonta-ganti pasangan. Bila terjadi kehamilan dan kandungan terpaksa digugurkan, mereka menghadapi kemungkinan pendarahan, infeksi,

kemandulan, bahkan kematian, belum lagi stres atau rasa berdosa yang bakal dihadapi si anak. Juga diingatkan, dengan anak yang mereka lahirkan di luar nikah, mereka juga yang mesti bertanggung jawab sebagai ayah dan ibunya. Jangan lupa pula, “jagalah agar jiwa mereka tidak banyak terganggu, apalagi selama mereka masih belum dewasa, masih harus sekolah, dan lain-lain,” tambah Yulia.

Penjelasan yang baik mampu membuka mata mereka betapa melakukan hubungan seksual pranikah itu tidak ada untungnya. Ini misalnya terbukti ketika dr. Boyke membagikan kuesioner kepada peserta seminar remaja. Jawaban mereka sebelum dan sesudah mendengarkan ceramah bertolak belakang. Sebelum seminar, mereka rata-rata menyetujui hubungan seksual sebelum nikah. Tapi sesudahnya 90% peserta menyatakan tidak setuju. Juga terungkap, mereka setuju adanya pendidikan seks, hanya tidak tahu ke mana memperolehnya.

Penyampaian materi pendidikan seks di rumah sebaiknya dilakukan kedua orang tua. “sebelum usia 10 tahun pendidikan bisa diberikikan secara bergantian, tapi umumnya ibu lebih berperan,” kata Paat. Menjelang akil balik, saat sudah terjadi proses diferensiasi jenis kelamin dan mulai muncul rasa malu (pada wanita mengalami haid, pertumbuhan payudara, dan pada laki-laki mengalami mimpi basah dan perubahan suara), sebaiknya ibu memberi penjelasan kepada anak perempuan dan ayah kepada anak laki-laki. “Sekali waktu boleh diadakan komunikasi silang. Misalnya kepada anak perempuannya seorang ayah dapat berdiskusi bagaimana perasaan-perasaan pria bila jatuh cinta, atau sebaliknya kepada anak laki-lakinya, ibu bisa mengungkapkan bagaimana perasaan seorang wanita bila didekati pria.”

Menjelaskan tentang seks juga tidak perlu secara eksklusif. Itu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Saat sedang sibuk memasak, misalnya tiba-tiba si anak bertanya tentang kehamilan. Sang ibu tidak perlu menanggapi jawaban atau menjanjikan jawaban akan diberikan panjang lebar di kamar, tapi bisa langsung saat itu juga. Tindakan eksklusif, menurut Paat, malah membuat si anak bisa berkesimpulan, seks merupakan sesuatu yang luar biasa dan harus dirahasiakan. Padahal pertanyaan seperti itu lumrah dan merupakan bagian dari kehidupannya.

“Kalau anak kita sama sekali tidak pernah bertanya soal seks, jangan dikira pasti beres. Coba pancinglah dengan buku,” jelas Paat. “keterangan dalam buku yang kurang jelas biasa didiskusikan dengan orang tua,” tambah Boyke.

Pendidikan seks di sekolah, demikian Yulia dan Paat, hendanya tidak terpisah dari pendidikan pada umumnya, dan bersifat terpadu. Ia bisa dimasukkan ke dalam pelajaran ilmu Biologi, kesehatan, moral dan etika

secara bertahap dan terus menerus. Mereka mensyaratkan pendekatan pada pendidikan moral, meski tidak perlu sedetail pendidikan agama, agar pendidikan seks diterima murid sebagai suatu ilmu yang tidak untuk dipraktekkan sebelum waktunya.

Sekali waktu penyuluhan seks juga perlu diadakan. Misalnya, soal menghadapi masa haid dan mimpi basah bila diberikan kepada anak kelas VI SD, proses terjadinya bayi (spermatozoa bertemu dengan sel telur) mulai diberikan kepada murid SLTP. Selanjutnya masalah kebebasan seks, alat kontrasepsi sampai hubungan seks (bukan tekniknya) diberikan kepada anak SLTA.

Menurut Yulia, penjelasan tentang program pendidikan seks hendak disampaikan kepada murid perlu juga diketahui orang tua murid. Maksudnya, agar mereka bisa memberi jawaban dan tidak terkejut bila tiba-tiba si anak atau remaja bertanya soal seks kepada mereka. "Karena, kadang-kadang ada anak yang dengan begitu bangga bercerita tentang pengetahuan seks yang baru diberikan di sekolah." Tutur Yulia.

Dr. Paat dan dr. Boyke saling berbeda pendapat dalam soal penyampaian informasi tentang alat kontrasepsi. "Alat kontrasepsi macam kondom bukan rahasia lagi, karena dapat dibeli di mana-mana. Yang penting, mereka diberi penjelasan bahwa pemakaian sebelum menikah merupakan pelanggaran nilai-nilai moral dan agama," kata Paat. Sedangkan Boyke kurang setuju memperkenalkan pemakaiannya kepada remaja, karena khawatir disalah gunakan.

Lebih tepat, kata Paat, kalau tema penyuluhan didasarkan pada pendekatan pemecahan masalah (*problem solving approach*), yakni penyuluhan disertai kesempatan berkonsultasi dengan guru, konsultan psikologi di sekolah, atau guru agama. Pasalnya, masalah yang dihadapi setiap murid berbeda-beda.

Dalam hal ini Dra. Yulia menganggap penting peran guru bimbingan dan penyuluhan (BP). Guru-guru ini tidak cuman sebagai guru BP, tetapi juga mesti tahu soal pendidikan seks. "Kadang-kadang murid segan bertanya kepada orang tua. Atau pernah bertanya malah dimarahi bapak atau ibunya," jelas yulia. Dengan adanya kesempatan berkonsultasi, si anak bisa mengutarakan masalah pribadinya.

Selain di sekolah, "di tingkat RT pun sebetulnya bisa sekali waktu diselenggarakan ceramah tentang seks bagi para orang tua atau remaja dengan bantuan dokter puskesmas untuk mengisi kekosongan itu," kaa Boyke. Usul itu boleh juga. Bagaimanapun pendidikan seks bukan semata-mata tanggung jawab orang tua dan pendidik tetapi juga masyarakat.

7. Remaja, Pornografi dan Pendidikan Seks

Salah satu televisi swasta beberapa waktu lalu menayangkan kasus pemerkosaan yang dilakukan sekelompok oknum pelajar SLTP dan SLTA secara beramai-ramai di wilayah Jawa Timur. Dari hasil pemeriksaan aparat, perilaku memalukan ini akibat pengaruh minuman keras dan sering menonton VCD porno.

Dalam cerita rubrik Curhat, *Kompas*, pernah ada sebuah cerita tentang seorang remaja yang menutup pintunya rapat-rapat hanya karena ingin membuka kartu remi *full color* yang gambarnya aduhai dan *syuur*. Merebaknya pornografi sungguh amat memprihatinkan, apalagi bacaan-bacaan dan sejenisnya, yang saat ini sudah bias diakses oleh siapapun (termasuk remaja).

Beberapa waktu lalu survei terhadap pornografi menggambarkan, banyak media massa yang masuk kategori porongrafi, di dalamnya memuat isi dan gambar secara vulgar dan permisif. Banyak foto perempuan yang berpose seronok dan berpakaian mini, bahkan hanya ditutupi daun pisang, dan masih banyak kasus serupa yang seringkali masih saja menghiasi wajah media massa kita.

Situasi maraknya pornografi sebagai media yang menyesatkan hingga berimplikasi terhadap dekadensi moral, kriminalitas, dan kekerasan seks yang dilakukan remaja, sesungguhnya bukan sebuah kasus baru yang mengisi lembaran surat kabar ataupun media elektronik.

Kasus-kasus kekerasan seksual, kehamilan tidak dikehendaki (KTD) pada remaja dan sejenisnya, tampaknya masih belum banyak diangkat ke permukaan sehingga “seolah-olah” masalah ini dianggap “kasuistik” yang tidak penting untuk dikaji lebih jauh. Padahal, timbulnya kasus-kasus seputar KTD remaja, kekerasan seksual, penyakit menular seksual (PMS) pada remaja bahkan sampai aborsi, tidak lepas dari (salah satunya) minimnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja.

8. Pendidikan Seks = Pornografi?

Pendidikan kesehatan reproduksi remaja sebagai salah satu upaya untuk “mengeremV” kasus-kasus itu, sampai saat ini masih saja diperdebatkan (bahkan banyak yang enggak setuju). Sementara, pornografi tiap saat ditemui remaja. Beberapa kajian menunjukkan, remaja haus akan informasi mengenai persoalan seksualitas dan kesehatan reproduksi.

Penelitian Djaelani yang dikutip Saifuddin (1999:6) menyatakan, 94 persen remaja menyatakan butuh nasihat mengenai seks dan kesehatan reproduksi. Namun, repotnya sebagian besar remaja justru tidak dapat mengakses sumber informasi yang tepat. Jika mereka kesulitan untuk mendapatkan informasi melalui formal, terutama dari lingkungan sekolah dan

petugas kesehatan, maka kecenderungan yang muncul adalah coba-coba sendiri mencari sumber informal.

Sebagaimana dipaparkan Elizabeth B Hurlock (1994:226), informasi mereka coba dipenuhi dengan cara membahas bersama teman-teman, buku-buku tentang seks, atau mengadakan percobaan dengan jalan masturbasi, bercumbu atau berhubungan seksual. Kebanyakan masih ada anggapan, seksualitas dan kesehatan reproduksi dinilai masih tabu dibicarakan remaja. Ada kekhawatiran (asumsi) untuk membicarakan persoalan seksualitas kepada remaja sama hanya memancing remaja untuk melakukan tindakan coba-coba.

Sebenarnya, masalah seksualitas remaja adalah problem yang tidak henti-hentinya diperdebatkan. Ada dua pendapat tentang perlu tidaknya remaja mendapatkan informasi seksualitas. Argumen pertama memandang, bila remaja mendapat informasi tentang seks, khususnya masalah pelayanan kesehatan reproduksi, justru akan mendorong remaja melakukan aktivitas seksual dan promiskuitas lebih dini.

Sedangkan pendapat kedua mengatakan, remaja membutuhkan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya dan implikasinya pada perilaku seksual dalam rangka menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran terhadap kesehatannya.

Remaja sendiri merupakan kelompok umur yang sedang mengalami perkembangan. Banyak di antara remaja berada dalam kebingungan memikirkan keadaan dirinya. Sayangnya, untuk mengetahui persoalan seksualitas masih terdapat tembok penghalang. Padahal, mestinya jauh lebih baik memberikan informasi yang tepat pada mereka daripada memberikan mereka mencari tahu dengan caranya sendiri.

Pendidikan seksualitas masih dianggap sebagai bentuk pornografi. Padahal, dalam gambaran penelitian yang pernah dilakukan oleh Pusat Studi Seksualita PKBI-DIY di wilayah Yogyakarta pada pertengahan tahun 2000 terhadap persepsi remaja dan guru (mewakili orang tua), dianggap itu tidak sepenuhnya terbukti.

Selama ini, pendidikan seks dipersepsikan sebagai sebuah hal yang sifatnya pornografi yang tidak boleh dibicarakan, apalagi oleh remaja. Dari hasil kuesioner menggambarkan, hanya sekitar 14-29 persen (responden guru) yang menyatakan, pendidikan seks sama dengan pornografi dari remaja sendiri anggapan tentang pendidikan seks sama dengan pornografi tidak terbukti (0 persen).

9. Remaja dan Pendidikan Seks

Masih sangat sedikit pihak yang mengerti dan memahami betapa pentingnya pendidikan seksualitas bagi remaja. Faktor kuat yang membuat

pendidikan seksualitas sulit diimplementasikan secara formal adalah persoalan budaya dan agama.

Selain itu, faktor lain yang ikut mempengaruhi adalah kentalnya budaya patriarki yang mengakar di masyarakat. Seksualitas masih dianggap sbagai isu perempuan belaka. Pornografi merupakan hal yang ramai dibicarakan kerana berdampak negatif, dan salah satunya upaya membentengi remaja dari pengetahuan seka yang menyesatkan adalah dengan memberikan pendidikan seksualitas yang benar. WHO mnyebutkan ada dua keuntungan yang dapat diperoleh dari pendidikan seksualitas. **Pertama**, mengurangi jumlah remaja yaang melakukan hubungan seks sebelum menikah. **Kedua**, bagi remaja yang sudah melakukan hubungan seksual, mereka akan melindungi dirinya dari penularan penyakit menular seksual dan HIV/AIDS.

Mengingat rasa ingin tahu remaja yang begitu besar, pendidikan seksualitas yang diberikan harus sesuai kebutuhan remaja, serta tidak menyimpang dari prinsip pendidikan seksualitas itu sendiri. Maka pendidikan seksualitas harus memepertimbangkan:

- 1) Pertama, pendidikan seksualitas harus didasarkan penghormatan hak reproduksi dan hak seksual remaja untuk mempunyai pilihan.
- 2) Kedua, berdasarkan pada kesetaraan gender.
- 3) Ketiga, partisipasi remaja secara penuh dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan sekssualitas.
- 4) Keempat, bukan cuman dilakukan secara formal, tetapi juga nonformal.

Sampai kapankah kita masih terus memperdebatkan persoalan pendidikan seksualitas untuk remaja, sedangkan remaja sebenarnya “diam-diam” sudah mencari informasi yang menyesatkan tentang seks dari pornografi.

10. Pendidikan Seks, Kespro Sebaiknya Masuk Kurikulum

Pertama seputar fungsi organ reproduksi, perilaku seks saat pacaran, infeksi menular seksual (IMS), kehamilan tak dikehendaki (KTD), kontrasepsi, pelecehan seksual, homoseksual, sampai masalah kepercayaan diri sering dilontarkan remaja pada *Youth center* Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). Isi pertanyaan tersebut menrefleksikan kekurangannya akses mereka pada informasi mengenai kaitan seks dan kesehatan reproduksi (kespro). Padahal, dalam ICPD (Konferensi

kependudukan dan Pembangunan) di Kairi, Mesir, 21994, hak kespro seseorang harus dijamin.” Kata Humas PKBI Yahya Ma’shum.

Kesepakatan ini telah ditanda tangani pula oleh pemerintah Indonesia. Sehingga hak-hak kespro merupakan kewajiban pemerintah untuk menjaminkannya. Dalam ICPD, selanjutnya, hak kespro meliputi hak mendapatkan informasi tentang kespro, hak mendapatkan informasi tentang seksualitas yang benar dan bertanggungjawab, hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan kespro, hak kebebasan berpikir dan membuat keputusan tentang kespro, hak untuk hidup (dilindungi dari kematian akibat kehamilan), hak menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran, hak atas kebebasan dan keamanan dalam pelayanan kespro, hak untuk bebas dari penganiayaan termasuk pelecehan menyangkut kespro, hak atas kerahasiaan pribadi dalam menjalankan reproduksinya, membangun dan merencanakan keluarga, hak atas kebebasan berkumpul dan berpolitik yang menyangkut kespro, dan hak atas kebebasan dari segala jenis diskriminasi dalam kespro.

Nah, hak-hak itulah, kata Yahya, yang dipahami, bahkan tidak diketahui para remaja. Parahnya lagi, pemerintah sebagai pelaksana kewajiban negara pada rakyatnya pun tidak mengindahkannya. Akibatnya, tingkat kematian ibu dan anak masih tinggi. Demikian halnya tingkat keterjangkitan remaja oleh IMS masih sama tingginya.

Kondisi itu, lanjut Yahya, bisa dilihat dari data hasil penilaian PKBI 2001 terhadap responden remaja khususnya siswa SMU dan mahasiswa. Penelitian tersebut dilaksanakan di lima kota, yakni Kupang (NTT), Palembang (Sumsel), Singkawang (Kalbar), Cirebon, dan Tasikmalaya (Jabar). Penelitian melibatkan 2.479 responden berusia 15-24 tahun.

“Hasil penelitian menunjukkan 52,67% responden memiliki pengetahuan kespro tidak memadai, karena sumber pengetahuan mereka hanya dari teman. Sedangkan sebanyak 72,77% memiliki pengetahuan memadai mengenai cara penularan IMS terutama HIV/AIDS. Sekitar 16,46% (227 orang) responden mengaku pernah melakukan hubungan seksual,” jelas Yahya.

Dari jumlah remaja yang melakukan hubungan seks itu, sebanyak 74,89% (170 orang) melakukan dengan pacar, dan dari jumlah itu pula sebanyak 46,26% (sekitar 78 orang) melakukan hubungan seks secara rutin 1-2 kali sebulan. Selebihnya, melakukan 1-2 kali seminggu, bahkan ada yang melakukan setiap hari. “Dari responden pelaku seks aktif itu, hanya 91 orang (40,09%) menggunakan alat kontrasepsi. Sedangkan untuk mencegah kehamilan, 70,39% responden mengaku mengenal alat kontrasepsi kondom. Selain itu, sebesar 59,65% mengenal jamu, dan selebihnya mempercayai mitos, seperti makan nanas muda, loncat-loncat, atau jongkok setelah bersenggama.”

Jika hubungan seksual ternyata membuahkan kehamilan, lanjut Yahya, sebesar 64,44% responden memilih bertanggung jawab dan melanjutkan ke pernikahan. Sedangkan saat menghadapi permasalahan kespro, 51,08% responden mengatasinya sendiri. Sebanyak 23,42% mengaku sudah mengenal dan menggunakan jasa Pusat pelayanan Remaja.

Merespon hasil penelitian tersebut, kata Yahya, PKBI pun mendirikan Youth Center di berbagai daerah. Melalui wadah tersebut, paparnya, remaja bisa menyalurkan unek-uneknya berkenaan dengan kespro dan persoalan di sekitarnya. Sejak dirintis pada tahun 1990, *Youth Center* telah tersebar di 24 provinsi dan tiga kabupaten. "Semua kegiatan wadah ini mulai dari tata letak bangunan, dekorasi, perkumpulan dan aktivitasnya melibatkan remaja," tuturnya. Selain tempat remaja beraktivitas dan memberikan pengetahuan kespro, *Youth Center* juga memberikan pelayanan medis. Wadah ini juga menjalin kerja sama dengan sekolah-sekolah dan organisasi remaja, seperti pramuka dan lainnya, guna mengembangkan program sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kespro remaja. Dan yang paling penting, di *Youth Center* digalakkan pula upaya advokasi kespro remaja. Menurut Yahya, KIE kespro inilah yang seharusnya diperkenalkan di sekolah, bahkan dimasukkan ke dalam kurikulum. "Di Sumatra Barat, melalui Sanggar Konsultasi Remaja, KIE kespro telah menjadi program ekstra kulikuler di SMU. Di Jakarta kita sudah bekerja sama dengan beberapa sekolah melaksanakan program ini. Bahkan di Jateng KIE ini diusulkan menjadi muatan lokal di kurikulum sekolah.

Lebih lanjut, Yahya mengatakan, masyarakat hendaknya tidak menilai pendidikan seks atau KIE kespro, seolah-olah menyetujui remaja berbuat seks bebas. Sebab, pelajaran seks justru menanamkan rasa tanggung jawab di kalangan remaja akan seks dan kespronya. Selain itu, lanjutnya, program KIE kespro sangat diperlukan sebagai upaya mengurangi penyebaran IMS, seperti HIV/AIDS di kalangan remaja.

D. Latihan

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pendidikan seks!
2. Jelaskan pentingnya pendidikan seks dimulai dari keluarga!
3. Jelaskan peranan sekolah dalam pendidikan seks!
4. Jelaskan tujuan diadakannya pendidikan seks!
5. Jelaskan hubungan antara remaja dan hubungan seksual pranikah!
6. Jelaskan hubungan antara pacaran dan pendidikan seks!
7. Jelaskan keterkaitan antara remaja, pornografi dan pendidikan seks!
8. Apakah pentingnya pendidikan seks dan kespro masuk dalam kurikulum?

DAFTAR PUSTAKA

- Abrasyi, Al. Athiyah, DR Muhammad, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, (Terjemahan) Bulan Bintang, Jakarta 1970.
- Alexander. WM. *Secondary Education*, Rinehart & Company Inc., New York 1956.
- Anderson, Robert N., *Teaching in World of Change*. Narcourt, Brace and World Inc., New York 1966.
- Ali Saifuddin, *Agama Filsafat dan Keberdayaan*, Lembaga Penerbit IKIP, Malang 1970
- Billy Cyrill, 1957, *Sex Education: A Guide For Parents, Teacher And Youth Leader*, New York, St. Martin's.
- Bandura, A and Walters, RH., *Social Learning and Personality Development*. Holt, New York 1964.
- Belth, Marc., *Education as a Decipline*, Allyn and Bacm, Boston 1965.
- Benedicts, Ruth, *Patterns of Culture*, Houghon Mafflin, Company, Boston 1959.
- Bigge, Boyd N., *Learning Theories for Teachers*, Harper and Row Publishes, New York 1976.
- Bode, Boyd N., *Modern Educational Theories*, Macmillan, New York 1927.
- Breneld, Theodore, *Education as Power*, Fawcett Publication, 67 west 44th street, New York 1965.
- Claulan, SS., *Inovation in Teaching Learning Process*. Vekas publishing House PVT Ltd., New Delhi 1979.
- Clark, Leonard N. Cs., *Secondary School Teaching Methods*, Macmillan, New York 1967.

- Combs, Arthur W., *Educational Accountability, Beyond Behavioral Objectives*, Association for Supervision and Development, Washington DC 1972.
- Clark, David H. 1983. *How Secondary School Graduates Perform in the Labor Market: A Study of Indonesia*. Washington DC: The World Bank.
- Dewey, John, *Democracy And Education*, Macmillan, New York 1916.
- Douglass, Harl R., *Modern Methods an High Scholl Teeaching*. Boston, Houghton Mifflin 1926.
- DriyarkaraSl., Prof. DR. *Filsafat Manusia*. Penerbit Kanisius, Yogyakarta 1969.
- Durjheim, Emile, *Pendidikan Moral*, (Alih bahas oleh Drs. Lukas Ginting), Penerbit Erlangga, Jakarta 1990.
- Djuningis, S. 2002. *Hubungan antara Pendidikan, Ekonomi, Budaya, Agama, dan Hukum terhadap Kekerasan Suami terhadap Istri: Suatu Kasus kekerasan Suami terhadap Istri Dikota Makassar*. Laporan Penelitian. Makassar; Lemlit UNM.
- Evans, Rupert N. 1974. *Foundation of Vocational Education*, Ohio: Charles E. Merrill Publishing Co.
- Fakih, M. 1997. *Analisis Jender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pitik Pelajar Offset.
- FMIPA IPB. 1998. *Studi SMU Besar – Buku I: Laporan Utama Jakarta*: Direktorat Pendidikan Menengah Umum Ditjen Dikdasmen.
- Frans Magnis Suseno, *Berfilsafat dari Konteks*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1992.
- Hight F., *The Art of Teaching*, A. Vintage Book K 1, new York 1956.
- Hans, N., *Comparative Education*. Routledge & Kegan Paul limited, London 1950.

- Hamalik Oemar, 2002. *Pendidikan Guru*. Bumi Aksara; Bandung
- KI Hajar Dewantara, *Masalah Kebudayaan*, (Kenangaan Promosi Doktor Hinpris Causa), BP Taman Siswa, Yogyakarta 1957.
- Klubertanz, George P., *The Philosophy of Humas Nature*, Apsleton century, New York 1953.
- Kartono, Kartini, 1981. *Psykologi Wanita 1*. Alumni.
- Kartono, Kartini, 1985, *Peranan Keluarga Memandu Anak*, Rajawali, Jakarta.
- Killander, Frederick, 1971, *Sex Education In The School*, New York, The Macmillan Company.
- KAJ, 1984, *Pendidikan Kehidupan Keluarga*. Obor. Jakarta.
- Konsultasi khusus Penulis dengan Bapak Martoenoes Arifin. Pada tahun 2005. Makassar.
- Lee. LA., *Teaching As A Man's Job*, Phi Delta Kapan, Bloomington, Ind. 1938.
- Like Wilardjo, *Realita dan Desiderata*, Daily Wacana University Press. Yogyakarta 1990.
- Muchlas Samani. *Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan*. Makalah Disampaikan pada Diskusi di Pusat Penelitian Kebijakan Balitbang Depdiknas Jakarta, 23 Oktober 2000.
- Mochlman, AH, Cs. *Comprative Education*, The zzzzzzzdryden Press, New York 1957.
- Nasution, S. 1983. *Sosiologi Pendidikan*. Bumi Aksara Bandung.
- Olivia, Peter F., *The Seconary School To Day*, Celevelland World Publishing, 1967.
- Oliver, Donald W., Cs., *Teaching Public Issues in the High School*, Boston 1966.

- Oentoro, Johanes. 2000. *Perbaikan Sistem Pendidikan untuk Menunjang Dunia Industri*. Makalah Utama pada Konvensi Nasional Pendidikan IV di Jakarta, 19-22 September 2000.
- Opping, C and K. church, 1981. *A Field to Research of Woment: Focused Biographies*. Geneva:ILO
- Rusk, Robert, *The Doctrine of Great Educations*, Macmillan Co. Ltd., London 1957.
1998. *Pendidikan Menengah Kejuruan Menyongsong Millenium III*. Pidato pengukuhan sebagai guru Besar dalam Bidang pendidikan Kejuruan di Universitas Negeri Surabaya.
- Singh, LC, *Micro Teaching in Teacher Education*. NCERT, New Delhi 1976.
- Scleffler, Israel, *Conditions of Knowledge: an Introduction to Epistimology and Education*. Chicago 1965.
- Sudjana, Nana. 1987. *Dasar-Dasar proses Belajar Mengajar*. Sinar baru Algensia. Bandung.
- Sallis, Edward. 1993. *Total Quality Management in Education*. London: kogan Fage Limited.
- Samani, Muchlas. 1991. *Keefektifan Pendidikan pada STM: Studi Pelacakan terhadap Lulusan STM di Kotamadya Surabaya*. Jakarta; PPS IKIP Jakarta.
- Sugiasurti. 2000. *Wanita di Mata Wanita*. Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia.
- Sadli Saparindah. 1988. "Pengembangan Diri Wanita dalam Keluarga dan Lingkungan Sosial" dalam Selo Sumardjan (ed). Masyarakat dan Kebudayaan. Jakarta: Djambatan.
- Sulastrianingsih Djumingin. 2005. *Citra Tokoh Wanita dalam Novel indonesia tahun 1980-2000-an*. Laporan Penelitian. Makassar: Lemlit UNM.

- Sulaiman Samad. Dkk. 2004. *Profesi Keguruan*. FIP UNM. Jakarta.
- Taba, Hild, Cs., *Thinking in Elementary School Children*, San Fransisco Stat College, 1964.
- Tilaar, H.A.R. 2004. *Paradigma baru Pendidikan Nasional*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Taha, H. Nasaruddin. *Tokoh-Tokoh Pendidikan Islam di Zaman Jaya Imam Ghazali, Ibnu Khaldun*, Penerbit Mutiara, Jakarta 1978.
- Titus, Harold N., *Living Issues in Philosophy*, Amerika Book Company, New ork 1953.
- Tito, Pusat tudi Seksualitas-PKBI DIY. Sumber: Media Indonesia Online.
- Tukan, Johan Suban, 1991, *Bina remaja*, Galaxy Puspa Mega, Jakarta.
- Unwin, D. and Leedham J., *Aspects of Educational technology*, Vol. 1 London 1967.
- Verduen, JR., *Concep Models in Teacher education: an Approach to Teaching and Learning*, Washington DC 1967.
- Wilson, J., *Moral Thinking*, Heineman, London 1971.
- Wen sayling, 2003. *Future of Education*, Lucky Publishers. Batam Center.
- Wollfman, Brunetta R. 1989. *Peran Kaum Perempuan* (terjemahan Anton Soetomo). Yogyakarta; Kanisius.
- Yunita Maria Yeni, *Guru Bimbingan Konseking SLTPK V*. BPK Penabur KPS Jakarta.
- Yulia S. Singgih Gunarsa, Artikel Lepas/Intisari. Maret 1997.

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Nurhikmah H., S.Pd., M.Si. meraih gelar Sarjana di Program Studi Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Ujungpandang tahun 1996, meraih gelar Magister di Program Studi Sosiologi Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin tahun 2002. Sejak tahun 2003 mengabdikan diri di UNM dan menjadi CPNS 2005 selanjutnya PNS tahun 2006 sebagai dosen tetap di Prodi Teknologi Pendidikan S1 FIP UNM. Di tahun yang sama melanjutkan pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang Program Studi Teknologi Pembelajaran dan meraih gelar Doktor di tahun 2011. Menjabat sebagai Kepala Laboratorium Teknologi Pendidikan S1 FIP UNM pada tahun 2011, menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Teknologi Pendidikan S1 pada tahun 2011 sampai 2016, menjabat sebagai Ketua Penjamin Mutu Pascasarjana UNM 2016 sampai sekarang, dan Ketua Prodi Teknologi Pendidikan S2 Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar pada tahun 2017 sampai saat ini.